



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

Analisis Dampak Desentralisasi Terhadap Ketimpangan Perekonomian Daerah di Sumatera Barat

SKRIPSI



**NILA SILVIA
06151109**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

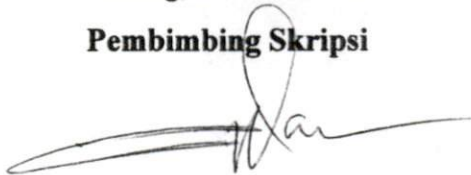
Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa :

Nama : **NILA SILVIA**
No.BP : **06 151 109**
Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**
Jurusan : **Ilmu Ekonomi**
Judul Skripsi : **Analisis Dampak Desentralisasi Terhadap Ketimpangan Perekonomian Daerah Di Sumatera Barat**

Telah diseminarkan pada tanggal 31 Agustus 2010 dan telah disetujui dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Padang, 21 Oktober 2010

Pembimbing Skripsi



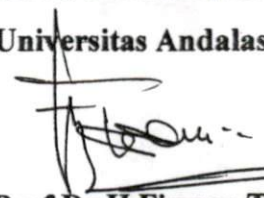
Drs. H. Zulkarnaini Ras M.Si

NIP. 19512301979031001


Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE,MA
NIP. 195410091980121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Andalas



Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA, Ing
NIP. 130.812.952

	No. Alumni Universitas	NILA SILVIA	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		

a) Tempat/Tanggal Lahir : Bandung / 23 Mei 1988 b) Nama Orang Tua : Asril Hasan & Arniaty Ramly c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No. BP : 06151109 f) Tanggal Lulus : 31 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,38 i) Lama Studi : 4 Tahun h) Alamat Orang Tua : Kampung Tanjung Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Patamanan, Kabupaten Padang Pariaman

Analisis Dampak Desentralisasi Terhadap Ketimpangan Perekonomian Daerah Di Sumatera Barat

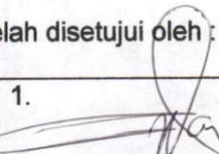
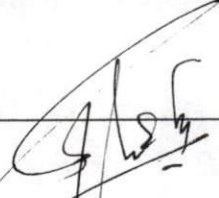
Skripsi S1 oleh: Nila Silvia
Pembimbing Skripsi: Drs.H. Zulkaraini Ras, M.Si

Abstrak

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (desentralisasi) diharapkan mampu mengatasi ketimpangan perekonomian antar daerah. Ketimpangan antar daerah ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan sektor ekonomi unggulan yang dimiliki suatu daerah. Penelitian ini mencoba mengurai permasalahan diatas dengan menggunakan Analisis Location Quation, Shift Share Analisis, dan Tipology Klassen. Dengan menggunakan ketiga alat analisis tersebut, peneliti menemukan bahwa setelah desentralisasi sebagian besar kabupaten / kota mampu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sektor basisnya. Walaupun demikian ketimpangan antar kabupaten / kota semakin besar karena terdapatnya perbedaan kemampuan daerah untuk memaksimalkan potensi sektor basisnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 31 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3.
Nama Terang	Drs. H. Zulkarnaini Ras M.Si (Pembimbing)	Dra. Syukriati/Syukur M.Si (Pembahas I)	Lukman, SE, M.Si (Pembahas II)

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP KETIMPANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DI SUMATERA BARAT". Salawat dan salam penulis kepada Nabi Muhammad S.A.W. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa'ala 'ali Muhammad.

Maksud dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Ekonomi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Zulkarnaini Ras M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis melalui diskusi, masukan dan arahan serta kebaikan-kebaikan Bapak selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA.
3. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA. Ing.
4. Kepala Program Studi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Bapak Febriandi Prima Putra, SE, MS.i.
5. Ibuk Dra. Syukriati Syukur M.Si dan Bapak Lukman, SE, M.Si selaku pembahas skripsi yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi.

6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staff pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis selama proses menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
7. Seluruh karyawan dan karyawan yang telah membantu kelancaran proses administrasi dalam lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
8. Dengan segala ketulusan hati dan rasa cinta, persembahkan dan terima kasih yang sangat istimewa dari penulis kepada orang tua dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku semua di Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2006 terutama JIE'06 Ganjil yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Kritik dan saran dari semua pihak senantiasa dapat diterima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Padang, 19 Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. KERANGKA TEORI DAN STUDI LITERATUR.....	9
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Desentralisasi Sebagai Suatu Konsep.....	9
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita.....	11
2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Daerah.....	13
2.1.4 Teori Basis Ekonomi.....	15
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto.....	16
2.2 Studi Literatur.....	19
BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Data dan Sumber Data.....	24
3.2 Teknik Pengolahan.....	25
3.2.1 Location Quotient.....	25
3.2.2 Shift Share Analisis.....	27
3.2.3 Tipologi Sektoral.....	29

3.2.4 Tipologi Klassen.....	30
3.3 Variabel Penelitian.....	33
3.4 Kerangka Pikir Analisis.....	35
3.5 Metode Analisi Data.....	36
BAB IV. GAMBARAN UMUM SUMATERA BARAT.....	37
4.1 Keadaan Geografis.....	37
4.2 Pemerintahan.....	38
4.3 Tinjauan Ekonomi Sumatera Barat.....	39
4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.....	39
4.3.2 Struktur Perekonomian Sumatera Barat.....	42
4.3.3 PDRB Perkapita.....	47
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
5.1 Analisis Sektor-sektor Basis.....	49
5.1.1 Analisis Sektor Basis Pada Kabupaten di Sumbar.....	49
5.1.2 Analisis Sektor Basis Pada Kota di Sumbar.....	74
5.2 Analisis Tipologi Klassen Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	92
5.2.1 Tipologi Klassen Sebelum Desentralisasi.....	92
5.2.2 Tipologi Klassen Setelah Desentralisasi.....	94
BAB VI. PENUTUP.....	95
6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel No.	Halaman
1. Makna Tipologi Sektoral.....	32
2. Klasifikasi Tipologi Klassen Berdasarkan Pendekatan Daerah.....	33
3. Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Sebelum Desentralisasi.....	41
4. Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Sebelum Desentralisasi.....	43
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing Sektor.....	45
6. Kontribusi Masing-Masing Sektor.....	47
7. PDRB Perkapita Kabupaten/kota di Sumbar.....	49
8. Tipologi Sektoral Kab. Pessel Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	52
9. Tipologi Sektoral Kab. Solok Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	54
10. Tipologi Sektoral Kab. Swl/ Sjj Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	57
11. Tipologi Sektoral Kab. Tnh Dtr Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	60
12. Tipologi Sektoral Kab. Pdg Prmn Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	63
13. Tipologi Sektoral Kab. Agam Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	66
14. Tipologi Sektoral Kab. 50 Kota Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	69
15. Tipologi Sektoral Kab. Pasamn Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	72
16. Tipologi Sektoral Kota Pdg Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	75
17. Tipologi Sektoral Kota Solok Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	79
18. Tipologi Sektoral Kota Swlnto Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	81
19. Tipologi Sektoral Kota Pdg. Pjg Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	84
20. Tipologi Sektoral Kota Bukttgi Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	87
21. Tipologi Sektoral Kota Pykmbh Sebelum dan Setelah Desentralisasi.....	91
22. Klasifikasi Kab / Kota Menurut Tipologi Klassen Sblm Desntrlsasi.....	93
23. Klasifikasi Kab / Kota Menurut Tipologi Klassen Stlh Desntrlsasi.....	94

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahap pembangunan di Indonesia, dimana pada saat itu merupakan masa pemerintahan orde baru yang berkuasa, pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan untuk menitikberatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas pembangunan. Hal ini bertujuan agar dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan sehingga dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai maka kesejahteraan masyarakat pun akan semakin meningkat dari waktu ke waktu (Soekirno, 1985).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memulai pembangunan ekonomi nasional di Pulau Jawa. Alasan fokus pembangunan dilakukan di Pulau Jawa karena adanya ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut dibandingkan dengan daerah – daerah lainnya. Selain itu pembangunan hanya terpusat pada sektor tertentu yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Dengan melakukan hal tersebut dipercayai bahwa nantinya hasil dari pembangunan tersebut akan menetes pada sektor lainnya dan wilayah Indonesia nantinya (*trickle down effect*) (Tambunan, dalam Parhah 2006).

Sehingga dapat kita ketahui bahwa selama masa pemerintahan orde baru telah terbangun sistem pemerintahan sentralistik, dimana pemerintah pusat

memegang kendali penuh terhadap pemerintah daerah. Ruang yang diberikan bagi aparat di daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sangat sempit, bahkan kerap kali potensi yang ada di daerah tersentral kepusat, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi pusat terhadap daerah tanpa mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan daerah itu sendiri. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, baik dari segi pembangunan, akses informasi dan terutama kemakmuran masyarakatnya. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipastikan bahwa pada era orde baru inilah awal bermulanya ketidakseimbangan dalam pembangunan antar daerah yang akhirnya berujung pada ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pendapatan.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul baik dari tingkat nasional maupun dari tingkat daerah akibat kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan orde baru ini, maka terjadinya reformasi politik yang disertai reformasi ekonomi, sehingga diterapkanlah kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) sebagai solusi alternatif dalam mengatasi berbagai masalah diatas. Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001, setelah dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang pelaksanaan sistem desentralisasi. Dalam rangka membangun daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh (Sofwani, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, ternyata dengan adanya kebijakan desentralisasi tersebut mampu membawa perubahan positif bagi perekonomian di tingkat nasional maupun di tingkat-daerah. Salah satu hasil penelitian tersebut adalah yang dilakukan Puji Wibowo pada tahun 2008 yang berjudul "Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah", dengan menggunakan estimasi panel *fixed effect* disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi daerah selama periode 1999-2004. Selain ditemukan juga bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi setelah tahun 2001 secara rata-rata relatif lebih baik dibandingkan dengan sebelum tahun 2001.

Namun, jika dilihat dari sisi ketimpangan pendapatan yang terjadi setelah pelaksanaan desentralisasi, ternyata ditemukan bahwa setelah desentralisasi ketimpangan pendapatan semakin besar. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari Kajian Pengeluaran Publik pada tahun 2007 mengenai "Desentralisasi Fiskal Dan Kesenjangan Daerah", kesenjangan fiskal secara signifikan di seluruh daerah telah terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan sistem desentralisasi. Pada 1999, kabupaten / kota paling kaya memiliki pendapatan fiskal per kapita sebesar 30 kali daripada daerah paling miskin. Angka ini masih tetap sama pada 2004, empat tahun setelah pelaksanaan sistem desentralisasi. Akan tetapi, *disparitas* (perbedaan) fiskal lebih rendah di tingkat provinsi daripada kabupaten / kota. Sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi, provinsi paling kaya memiliki tingkat pendapatan 13 kali lebih besar daripada provinsi paling miskin. Kesimpulan dari

temuan di atas adalah “*pengaruh desentralisasi (otonomi daerah) pada mulanya meminimalisir kesenjangan / ketimpangan antara pulau yang ada di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu otonomi daerah justru memperbesar kesenjangan pembangunan antara kabupaten / kota (wilayah)*”.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Di kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat sendiri sebagai wilayah tujuan utama penelitian ini, terlihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sjafrizal (2008) mengenai ketimpangan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat dengan menggunakan alat ukur *Williamson Indeks* dan data PDRB provinsi Sumatera Barat pada periode waktu 2000-2005 menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antara kabupaten / kota di provinsi Sumatera Barat adalah cukup tinggi dengan indeks berkisar antara 0,4-0,5. Sementara itu, terlihat pula adanya tendensi peningkatan ketimpangan dari tahun ke tahun. (Sjafrizal, 2008). Karena itu, tidaklah mengherankan jika pada kabupaten / kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat ini terdapat daerah yang tergolong maju (*Developed Region*) dan daerah yang tergolong wilayah terbelakang (*UnderDeveloped Region*).

Hal ini menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah di masing-masing kabupaten / kota di Sumatera Barat agar mampu melihat dan mengelola potensi apa yang dimiliki oleh daerahnya agar dapat meningkatkan kemampuan daerah tersebut menjadi lebih baik lagi dan secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula agar pemerintah daerah

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan pendapatan perkapita di masing-masing kabupaten / kota. Dengan demikian dengan adanya desentralisasi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah daerah yang maju dan meminimalisir jumlah daerah tertinggal yang ada di kabupaten / kota provinsi Sumatera Barat, artinya pemerintah daerah dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Sumatera Barat.

Berdasarkan fenomena yang digambarkan di atas maka penulis mengambil judul penelitian ini adalah “ **Analisis Dampak Desentralisasi Terhadap Ketimpangan Perekonomian Daerah Di Sumatera Barat**”

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antara kabupaten / kota yang ada di Sumatera Barat. Tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa faktor lain yang juga menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut Sjafrizal (2008) Variabel-variabel tersebut antara lain adalah; konsentrasi kegiatan sektor ekonomi antar daerah, perdagangan, faktor produksi antar daerah, alokasi investasi(pemerintah dan swasta) dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah.

Namun peneliti berusaha memfokuskan penelitian ini pada konsentrasi kegiatan sektor ekonomi antar daerah. Karena proses pembangunan daerah akan lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi, demikian pula sebaliknya. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah dapat diukur dengan indeks *Location Quotien* (LQ). Indeks ini dapat dihitung dengan

menggunakan data nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam PDRB masing-masing daerah untuk masing-masing sektor. Dengan menggunakan indeks LQ dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang menjadi unggulan (basis ekonomi) di kabupaten / kota, sehingga pemerintah daerah tersebut mampu mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh daerahnya dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian ini pun mengamati apakah ada perubahan pola struktur perekonomian yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan pada masing – masing daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Ketimpangan pendapatan antara kabupaten / kota yang terjadi di Sumatera Barat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya merupakan suatu fenomena yang tengah terjadi beberapa tahun belakang sebelum dan setelah sistem desentralisasi dilaksanakan, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari berbagai sumber. Tentunya hal itu bertolak belakang dari tujuan di bentuknya desentralisasi yaitu untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat dari pusat pemerintahan (Pulau Jawa) hingga daerah terpencil. Hasil yang ditemui di lapangan berupa ketimpangan pembangunan dan pendapatan, akibatnya akan memberikan perbedaan yang jelas antara si kaya dan si miskin, dengan kata lain daerah yang kaya dengan sumber daya dan mampu memanfaatkannya akan semakin berkembang berbeda dengan daerah yang miskin sumber daya tentunya membuat daerah itu akan semakin

terbelakang. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dengan adanya kewenangan daerah dalam merencanakan perekonomiannya (desentralisasi / otonomi daerah) terjadi perubahan potensi dari masing-masing sektor unggulan yang terdapat pada masing-masing kabupaten / kota di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah bentuk ketimpangan perekonomian sebelum dan sesudah desentralisasi serta sektor apa saja yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah?

Untuk memecahkan masalah tersebut perlu adanya usaha peningkatan kemampuan di bidang ekonomi (PDRB) dengan pendekatan basis ekonomi. Pendekatan basis ekonomi ini ditujukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling unggul dan strategis untuk dikembangkan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Melihat dan menganalisis kewenangan daerah dalam merencanakan perekonomiannya (desentralisasi / otonomi daerah) yang mempengaruhi terjadi perubahan tingkat kepotensialan dari masing-masing sektor unggulan yang terdapat pada masing-masing kabupaten / kota di Sumatera Barat menjadi lebih baik dari sebelumnya
2. Menganalisis bentuk ketimpangan perekonomian yang terjadi sebelum dan sesudah desentralisasi dan sektor apa saja yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk merancang kebijakannya dalam mengelola sektor ekonomi unggulan serta struktur pertumbuhan ekonomi yang ada pada kabupaten / kota di Sumatera Barat. Kebijakan tersebut adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan ketimpangan semakin berkurang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baru mengenai studi tentang masalah ketimpangan di Sumatera Barat.
3. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan tentang pertumbuhan dan ketimpangan di Sumatera Barat. Sehingga demikian dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut atau untuk perbandingan dengan penelitian di daerah lain.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Desentralisasi sebagai Suatu Konsep

Secara harfiah kata desentralisasi adalah lawan dari kata sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan (adjective) berkaitan dengan suatu kewenangan (authority) pemerintahan, lalu ada istilah misalnya kantor pusat, pemerintah pusat dan sebagainya. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintahan menyangkut berbagai aspek misalnya bidang politik, urusan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi dan aspek fiskal.

Ada berbagai pengertian desentralisasi, Leemans, membedakannya menjadi dua macam, yaitu representative local government dan fiel administration (Leemamns, dalam Kuncoro 2004). Maddick mendefenisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi (Maddick, dalam Kuncoro 2004). Devolusi adalah penyerahaan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi – fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atau fungsi – fungsi tertentu kepada staf pemerintahan pusat yang tinggal diluar kantor pusat.

Chive dan Philippe membedakan pengartian desentralisasi tergantung kepada lingkupnya (Perancis atau Anglo – Saxon). Menurut konsep Perancis desentralisasi adalah transfer yuridis dari pemerintah pusat yang memungkinkan

sebuah daerah dari segi otonom. Sedangkan menurut Anglo – Saxon desentralisasi adalah “pewaris”. Arti ini mencakup dekonsentrasi dan desentralisasi menurut konsep perancis.

Menurut Mahfuz Sidik. dalam (Ramahdani, 209) secara umum desentralisasi mencakup aspek- aspek penting sebagai berikut :

1. Desentralisasi Administrasi

Pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggung jawaban dibarengi dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (public service). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan (financial management) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan di daerah (local government). Dalam sistem desentralisasi administratif yang terjadi di Indonesia terdapat tiga bentuk yaitu ;

- a. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada kantor-kantor departemen yang ada di daerah artinya pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan departemen di suatu daerah.
- b. Desentralisasi atau Otonomi, yaitu pelimpahan wewenang yang lebih luas dari departemen kepada pemerintah lokal dan didukung dengan dana. Jadi secara tegas ada tugas kegiatan dan biayanya (budget).
- c. Bantuan (medebewind), yaitu pelaksanaan urusan atau kegiatan tertentu oleh daerah yang memperoleh pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pusat, namun decision terakhir berada pada pihak pemberi wewenang.

2. *Desentralisasi Politik*

Desentralisasi Politik yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan public dan hal ini berkaitan dengan proses yang lebih demokrasi dengan memberikan kewenangan pada perwakilan rakyat untuk lebih berperan dalam memformulasikan dan melaksanakan kebijakan publik.

2.1.2 **Perubahan Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi adalah komponen dari peranan sektor-sektor perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dari kontribusi masing-masing dalam PDRB. Sedangkan, corak perubahan struktur PDRB dapat ditunjukkan dengan melihat perubahan sumbangan masing-masing sektor terhadap produksi daerah. Perubahan didalam struktur ekonomi biasanya ditunjukkan dengan adanya perkembangan kontribusi antara sektor pertanian dan sektor industri terhadap pembentukan PDRB (Soekirno,1985). Dalam GBHN tahun 1993 ditegaskan bahwa pembangunan jangka panjang harus mampu membawa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sehingga tidak hanya meningkatkan produksi nasional yang berasal dari sektor pertanian tetapi diluar sektor pertanian pun akan semakin besar dan sektor industri yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Teori tentang perubahan struktur ekonomi yaitu:

1. Pola-pola Pembangunan (Soekirno,1985)

Analisis yang dikemukakan oleh Hollis B. Chenery ini memusatkan perhatiannya kepada proses yang mengubah secara bertahap struktur ekonomi,

Menurut Kuznets dalam (Wijayanto, 2005) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau di mungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya hanya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi factor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Selain ditentukan oleh nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut, kemakmuran suatu wilayah juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Tarigan, dalam Prayitno 2009).

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu proses perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun

berikutnya. Sedangkan, untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun tersebut.

2.1.3 Ketimpangan Pembangunan Daerah

Ketimpangan pembangunan daerah dapat terjadi karena berbagai hal. Sebelum menyusun suatu strategi untuk mengurangi ketimpangan antara daerah, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan ketimpangan pembangunan daerah. Penyebab ketimpangan pembangunan daerah, menurut Sjafrizal (2008) adalah:

a. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Penyebab pertama yang menimbulkan ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar daerah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. daerah yang memiliki kandungan SDA yang tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat. Begitu juga sebaliknya.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antara wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang

lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Apabila mobalitas kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar akan menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan .

d.. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, terdapatnya SDA yang lebih banyak pada daerah tersebut disamping itu terdapatnya lahan subur. Kedua, meratanya fasilitas transportasi baik darat, laut dan udara. Ketiga, kondisi kependudukan juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia yang tersedia dengan kualitas yang lebih baik

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu hal yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

2.1.4 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat *endogenous* (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2004).

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut,

sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis (Richardson, dalam Fatmasari 2007).

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan sektor-sektor yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sector yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Lincolin, 1999).

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (*Location Quotient, LQ*). *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik *LQ* berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2004) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau

merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS, 2004).

Seperti dikatakan di atas, penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut :

a). PDRB Menurut Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*).

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sector ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total produksi bruto sector atau sub sector tersebut.

Pendekatan produksi banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sector yang produksinya berbentuk fisik/barang. PDRB menurut pendekatan produksi terbagi atas 9 lapangan usaha (sector) yaitu : pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas

dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan lainnya; jasa-jasa. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan PDRB menurut pendekatan produksi (Suryana, 2000).

b) PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS, 2004).

c) PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (*Expend. Approach*).

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS, 2004).

2. Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang

dialokasikan ; jumlah produksi fisik; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut :

- a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

2.2 Studi Literatur

Untuk membantu penelitian ini, terdapat beberapa hasil temuan dari peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan kesenjangan pendapatan (ketimpangan pendapatan) dan pertumbuhan ekonomi yang kali ini penulis kemas dari berbagai sumber yang dirasa akan cukup melengkapi serta memperkuat

analisis dan menjadi bahan rujukan. Penelitian-penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Penelitian	Hasil
1.	Myrdal dalam Waluyo (2004)	mengemukakan bahwa besarnya <i>backwash effect</i> yang lebih besar daripada <i>spread effect</i> akan menyebabkan ketimpangan antardaerah. <i>Backwash effect</i> disebabkan oleh adanya migrasi tenaga kerja dan modal dari daerah miskin ke daerah kaya. Sedangkan <i>spread effect</i> disebabkan oleh meningkatnya <i>market share</i> dari produk pertanian dan akan merangsang ke arah kemajuan teknik. Pendapat Myrdal didukung oleh Hirschman (1968) bahwa terjadinya <i>trickle down effect</i> dari daerah <i>core</i> ke daerah <i>periphery</i> yang lebih kecil daripada <i>polarization effect</i> akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan antara daerah.
2.	Hendra Esmara (1975), Islam dan Khan (1986), dan Nasjid Majidi (1997)	Dengan menggunakan data PDRB riil dikemukakan bahwa selama periode 1968-1997 indeks ketimpangan pendapatan antardaerah semakin meningkat. DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, dan Riau merupakan propinsi yang paling makmur, sedangkan propinsi terparah yaitu: Nusa Tenggara Timur dan Barat, Bengkulu dan Jambi. Secara umum propinsi-propinsi di daerah timur Indonesia menempati posisi rendah.

3.	Takahiro Akita (2003)	menggunakan data PDB per-kapita China dan Indonesia dengan teknik <i>two stage nested Theil inequality decomposition</i> . Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: <i>Satu</i> ; Dalam pandangan efisiensi, ketimpangan pendapatan antardaerah disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya alam dan rendahnya kualitas transportasi di beberapa daerah. <i>Dua</i> ; Di China 60% wilayah dalam provinsi menunjukkan ketimpangan pendapatan yang tinggi, sedangkan di Indonesia setengahnya mengalami ketimpangan
4.	Sjafrizal (2008) menggunakan metode LQ dan Shift-share analysis dan model basis ekspor	Sumatera Barat mempunyai empat sektor yang memiliki keuntungan komperatif, yaitu sektor pertanian, listrik, gas dan air minum, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Peranan kontribusi nasional terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sekitar 9,9%. Peran dari struktur ekonomi daerah sebesar 89,4% dan sisanya keuntungan kompetitif daerah sebesar 0,7%. Ekspor mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat.
5.	Sutarno dan Kuncoro (2003)	Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu daerah/kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/ daerah tertinggal. Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan,

		baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.
6.	Tony Irawan dan Djoni Hartono (2008)	Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa selama pelaksanaan desentralisasi, hampir semua propinsi memiliki pertumbuhan yang positif kecuali Papua pada periode 2003 sampai dengan tahun 2006. Namun, desentralisasi tidak banyak membantu dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini disimpulkan karena peneliti menemukan, bahwa gini koefisien berfluktuasi dan bahkan meningkat secara substansial di tahun 2005 baik di tingkat nasional dan tingkat provinsi.
7.	Christopher H. Wheeler (2006)	Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa desentralisasi perkotaan dapat dikaitkan dengan heterogenitas industri yang lebih besar (melebihi yang kontrol untuk analisis di sini), dalam artian daerah pinggiran kota mungkin memiliki banyak pekerjaan baik dengan upah rendah, maupun upah tinggi, atau keduanya .
8.	Nobuo Akai (2005)	Tulisan ini telah memperkirakan dampak nyata dari desentralisasi fiskal menggunakan data yang tepat menetapkan dan beberapa indikator desentralisasi fiskal. Sebagai hasilnya, peneliti telah menyajikan bukti empiris baru dimana desentralisasi fiskal sebagai perangkat komitmen dapat mengurangi kesenjangan regional.
9.	Hiroshi Sakamoto (2006)	Peneliti berhasil menunjukkan bahwa kesenjangan wilayah Indonesia menjadi

		kecenderungan untuk semakin luas dalam kasus non minyak/gas, sedangkan menjadi kecenderungan untuk berkurang dalam kasus minyak/gas dengan menggunakan model rantai Markov.
10.	Takahiro Akita (2002)	Di Negara Indonesia dan China kesenjangan dalam provinsi jauh lebih menonjol daripada antar regional. Pengamatan ini menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan harus melihat tidak hanya pada antar regional atau kesenjangan antara-provinsi tetapi juga dalam ketidaksetaraan provinsi untuk merumuskan kebijakan daerah yang lebih baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang sudah diolah atau dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah berdasarkan urutan waktu (*time series data*) untuk kurun waktu tahun 1994-2007. Data yang digunakan meliputi, PDRB atas dasar harga konstan untuk Provinsi Sumatera Barat, data PDRB atas dasar harga konstan yang diperinci menurut kabupaten / kota di Sumatera Barat.

Ditinjau dari analisis antar region menurut provinsi juga menurut pulau atau menurut kawasan, akan memberikan gambaran perbedaan pola perkembangan suatu daerah dengan daerah lainnya, yang antara lain disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber-sumber alam, kondisi infra struktur, dan faktor produksi yang tersedia. Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya (BPS, 2003).

3.2 Teknik Pengolahan

3.2.1 Location Quotient

Location Quotient adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu membaginya menjadi dua golongan yaitu sektor basis dan sector non basis. Analisis *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Metode LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian suatu wilayah yang mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Atau dengan kata lain untuk mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran penetapan sektor unggulan sebagai *leading sector* perekonomian suatu wilayah.

Untuk menghitung nilai LQ digunakan rumus sebagai berikut (Warpani, dalam Fatmasari 2007):

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Keterangan :

LQ = Indeks Location Quotion

S_i : PDRB Sektor i di Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat

S : PDRB total di Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat

Ni : PDRB Sektor i di Provinsi Sumatera Barat

N : PDRB total Sektor i di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa :

- o Jika nilai LQ lebih besar dari 1, suatu sektor merupakan sektor basis
- o Jika nilai LQ lebih kecil dari 1, suatu sektor merupakan sektor non-basis
- o Jika nilai LQ sama dengan 1, suatu sektor merupakan sektor non-basis.

Asumsi dari teknik ini adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional, produktivitas tenaga kerja sama dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen.

Secara keseluruhan analisis LQ memberikan petunjuk yang sangat baik untuk melihat keadaan ekonomi wilayah dan potensinya dimasa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah, selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan baik antar daerah maupun dalam suatu daerah, serta adanya perbedaan sumberdaya yang bisa dikembangkan disetiap daerah. Kelemahan dari metoda LQ tersebut hendaknya tidak terlalu ditonjolkan karena metoda LQ memiliki pula kelebihan penting, yaitu memperhitungkan ekspor tidak langsung dan ekspor langsung (Tarigan, 2004).

3.2.2 Shift-Share Analysis

Analisis shift-share dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di daerah kabupaten dengan daerah propinsi atau daerah propinsi dengan wilayah nasional. Metode Shift-share ini lebih tajam dibandingkan metode LQ. Pada metode LQ tidak memberikan penjelasan factor-faktor penyebab perubahan, sedangkan metode shift-share memberikan perincian factor-faktor penyebab perubahan struktur perekonomian suatu daerah dalam pertumbuhannya dari waktu ke waktu (Sjafrizal, 2008).

Analisis *Shift Share* juga digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sector yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya (Arsyad, dalam Fatmasari 2007).

Selain itu, analisis *Shift Share* dapat pula digunakan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah. Dengan menggunakan alat analisis ini akan dapat diketahui apakah penyebab ketimpangan itu berasal dari luar daerah (*Regional Share*) atau dari dalam daerah itu sendiri (*Proportionality Shift dan Differential Shift*). Namun pembahasan yang akan dilakukan hanyalah untuk menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan yang berasal dari dalam daerah yang diamati, dengan menggunakan komponen *Proportionality Shift dan Differential Shift*.

Pergeseran proporsional (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan.

Pergeseran diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektor-sektor daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya daripada industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan

Formulasi dari analisis shift-share (Sjafrizal, 2008) adalah:

$$\Delta y_i = y_i \left(\frac{Y'}{Y^0} - 1 \right) + y_i \left[\left(\frac{Y'_i}{Y_i^0} \right) - \left(\frac{Y'}{Y^0} \right) \right] + y_i \left[\left(\frac{y'_i}{y_i^0} \right) - \left(\frac{Y'_i}{Y_i^0} \right) \right]$$

Dimana:

Δy_i = Perubahan nilai tambah sektor i di tingkat daerah

y_i = Nilai tambah sektor i di tingkat daerah

y_i^0 = Nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada awal tahun periode

y'_i = Nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada akhir tahun periode

Y_i^0 = Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada awal tahun periode

Y'_i = Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada akhir tahun periode

Y^0 = Nilai tambah total di tingkat nasional pada awal tahun periode

Y' = Nilai tambah total di tingkat nasional pada akhir tahun periode

Jika *proportional shift* (P_j) $y_i \left[\left(\frac{Y'_i}{Y_i^0} \right) - \left(\frac{Y'}{Y^0} \right) \right] > 0$, maka Kabupaten / kota

Provinsi Sumatera Barat akan berspesialisasi pada sector yang di tingkat propinsi tumbuh lebih cepat. Sebaliknya jika $P_j < 0$, maka Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat akan berspesialisasi pada sector yang di tingkat propinsi tumbuh lebih lambat.

Bila *differential shift* (D_j) $y_i \left[\left(\frac{y'_i}{y_i^0} \right) - \left(\frac{Y'_i}{Y_i^0} \right) \right] > 0$, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat lebih cepat dari pertumbuhan sektor yang sama di Sumatera Barat dan bila $D_j < 0$, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Barat relatif lebih lambat dari pertumbuhan sektor yang sama di Sumatera Barat.

3.2.3 Tipologi Sektoral

Analisis ini mengembangkan hasil perhitungan indeks *Location Quotient*, komponen *differential shift*, dan komponen *proportional shift* untuk ditentukan tipologi sektoral. Tipologi ini mengklasifikasikan sektor basis dan non basis serta komponen pertumbuhan internal dan eksternal. Dengan menggabungkan indeks *LQ* dengan komponen D_j dan P_j dalam analisis *Shift Share*, tipologi sektoral diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat hasil analisis. Namun analisis ini hanya difokuskan pada pengklasifikasian sektor basis yang terdapat pada suatu daerah. Tipologi sektoral tersebut adalah sebagai berikut (Saerofie, dalam Fatmasari 2007) :

Tipologi I :

Sektor tersebut adalah sektor basis dengan *LQ* rata-rata > 1 dan pertumbuhan di daerah lebih cepat dibandingkan propinsi (D_j rata-rata > 0) meskipun di tingkat propinsi pertumbuhannya cepat (P_j rata-rata > 0).

Tipologi II :

Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata > 1 dan pertumbuhan di daerah lebih cepat dibandingkan dengan propinsi (Dj rata-rata > 0) karena ditingkat propinsi pertumbuhannya lambat (Pj rata-rata < 0).

Tipologi III :

Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata > 1 dan di di daerah pertumbuhannya lebih lambat dibanding propinsi (Dj rata-rata < 0) karena ditingkat propinsi pertumbuhannya cepat (Pj rata-rata > 0).

Tipologi IV :

Sektor tersebut adalah sektor basis dengan LQ rata-rata > 1 dan di di daerah pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan propinsi (Dj rata-rata < 0) padahal ditingkat propinsi pertumbuhannya juga lambat (Pj rata-rata < 0).

Tabel 3.1 Makna Tipologi Sektor Ekonomi

Tipologi	Rata-rata LQ	Rata-rata Pj	Rata-rata Dj	Tingkat Kepotensialan
I	$LQ > 1$	$Pj > 0$	$Dj > 0$	Istimewa
II	$LQ > 1$	$Pj < 0$	$Dj > 0$	Baik Sekali
III	$LQ > 1$	$Pj > 0$	$Dj < 0$	Baik
IV	$LQ > 1$	$Pj < 0$	$Dj < 0$	Lebih dari Cukup

3.2.4 Tipologi Klassen

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita

daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Syafrizal, 1997).

Alat analisis Tipologi *Klassen* merupakan gabungan atau perpaduan antara alat analisis hasil bagi lokasi atau *Location Quotient* (LQ) dengan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Tipologi *Klassen* dapat digunakan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral maupun daerah. Data yang biasa digunakan dalam analisis ini adalah data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 3.2 Klasifikasi Tipologi *Klassen* Pendekatan Daerah

<p>Kuadran I</p> <p>Daerah maju dan tumbuh dengan pesat</p> <p>$g^* > g^{**}$, dan $Y^* > Y^{**}$</p>	<p>Kuadran II</p> <p>Daerah maju tapi tertekan</p> <p>$g^* < g^{**}$, dan $Y^* > Y^{**}$</p>
<p>Kuadran III</p> <p>Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat</p> <p>$g^* > g^{**}$, dan $Y^* > Y^{**}$</p>	<p>Kuadran IV</p> <p>Daerah relative tertinggal</p> <p>$g^* < g^{**}$, dan $Y^* < Y^{**}$</p>

Klasifikasi menurut daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

1. Daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran daerah dengan laju pertumbuhan PDRB (g^*) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g^{**})

dan memiliki pertumbuhan PDRB per kapita (Y^*) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (Y^{**}). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g^* > g^{**}$, $Y^* > Y^{**}$.

2. Daerah maju tapi tertekan (Kuadran II). Daerah yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g^*) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g^{**}), tetapi memiliki pertumbuhan PDRB per kapita (Y^*) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (Y^{**}). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g^* < g^{**}$, dan $Y^* > Y^{**}$.

3. Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g^*) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g^{**}), tetapi pertumbuhan PDRB per kapita daerah tersebut (Y^*) lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (Y^{**}). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g^* > g^{**}$, dan $Y^* < Y^{**}$.

4. Daerah relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g^*) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g^{**}) dan sekaligus pertumbuhan PDRB per kapita (Y^*) yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (Y^{**}) klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g^* < g^{**}$, dan $Y^* < Y^{**}$.

3.3 Variable Penelitian

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 1998). Variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dalam penelitian ini dilihat menurut pendekatan produksi yaitu merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor. Dalam penyajian ini PDRB dihitung berdasarkan harga tetap (harga konstan), yaitu harga yang berlaku pada tahun dasar yang dipilih, yaitu tahun 2000. Perhitungan berdasarkan harga konstan ini dilakukan karena sudah dibersihkan dari unsur inflasi.

Laju pertumbuhan ekonomi

2. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam persen per tahun. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembangunan daerah dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB setiap tahunnya.

3. Pertumbuhan sektor ekonomi

Pertumbuhan sektor ekonomi adalah pertumbuhan nilai barang dan jasa dari setiap sektor ekonomi yang dihitung dari angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam persentase.

4. Sektor-sektor ekonomi

Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi.

5. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi antara pendapatan regional (PDRB) suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (BPS, 2003).

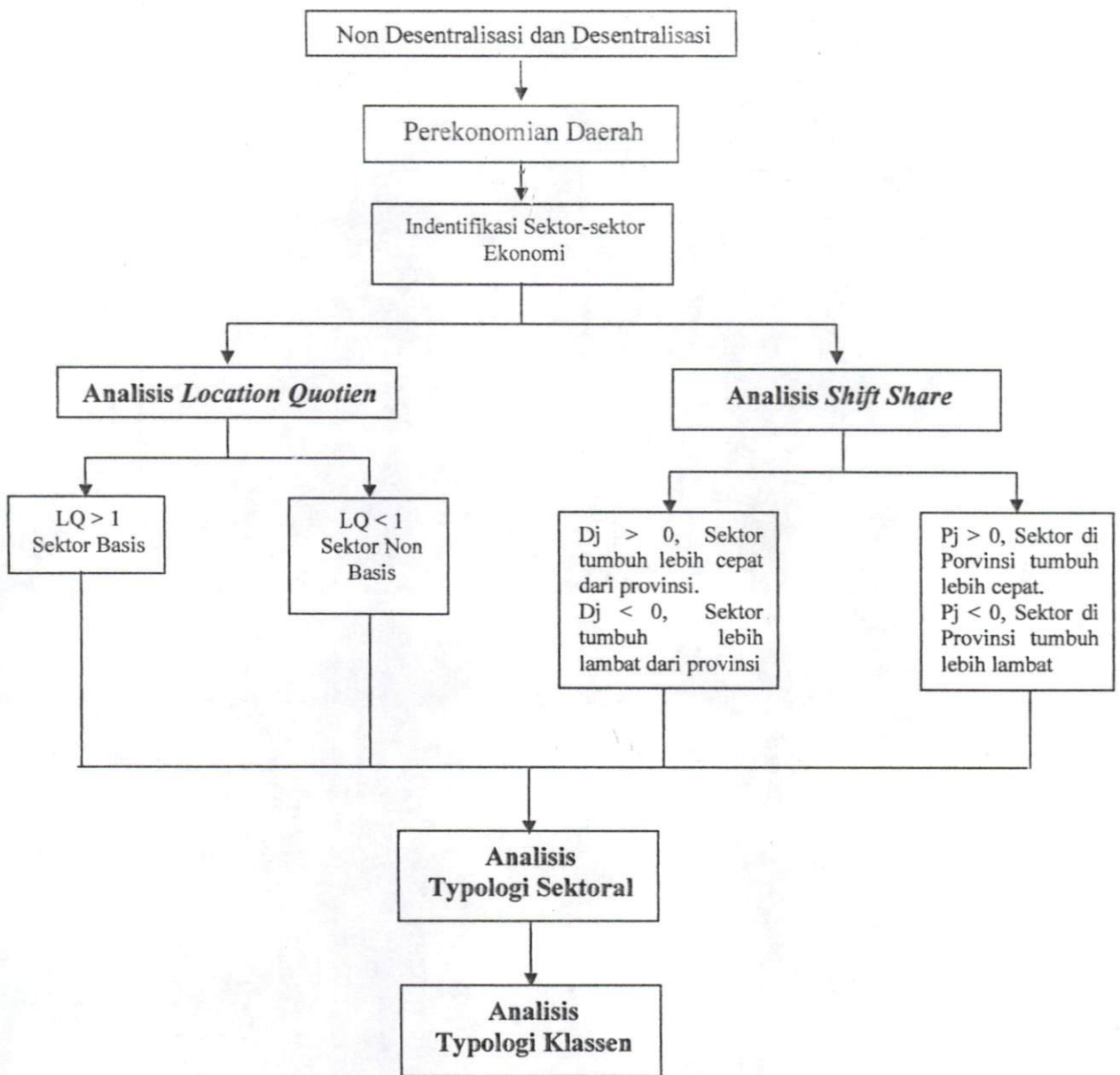
7. Komponen *Differential Shift*

Komponen *Differential Shift* adalah komponen untuk mengukur besarnya *Shift Netto* yang digunakan oleh sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan daerah yang skalanya lebih besar.

8. Komponen *Proportional Shift*

Komponen *Proportional Shift* adalah komponen yang digunakan untuk menghasilkan besarnya *Shift Netto* sebagai akibat dari PDRB daerah yang bersangkutan berubah. Komponen bernilai positif apabila daerah yang diteliti (kota/kabupaten) berspesialisasi dalam sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (propinsi/nasional) tumbuh lebih cepat, sebaliknya bernilai negatif apabila daerah yang diteliti (kota/kabupaten) berspesialisasi pada sektor yang di tingkat daerah dengan skala lebih besar (propinsi/nasional) tumbuh dengan lambat.

3.4 Kerangka Pikir Analisis



Sumber : Adisasmita, dalam Fatmasari (2007)

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, yaitu suatu metode yang menggunakan sejumlah data dan juga beberapa variabel yang mempengaruhi variabel bebas (*independent variable*) dan variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat (*dependent variabel*). Data yang dipergunakan adalah data *time series* atau data runtut waktu dengan bentuk data tahunan yang diamati selama kurang lebih lima belas tahun.

BAB IV

GAMBARAN UMUM SUMATERA BARAT

4.1. Keadaan Geografis

Sumatera Barat terletak antar $0^{\circ} 54'$ LU dan $3^{\circ} 30'$ LS serta antara $98^{\circ} 36'$ dan $101^{\circ} 53'$ BT. Luas daratan mencapai $42229,64 \text{ Km}^2$, yang berarti hanya 2,17 persen dari daratan Indonesia yang luasnya lebih dari 1,9 juta Km^2 . Propinsi Sumatera Barat diapit oleh empat propinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu.

Sebelum adanya desentralisasi, Sumatera Barat terdiri atas 14 daerah kabupaten / kota dengan 8 kabupaten dan 6 kota. Kabupaten Pasaman memiliki wilayah terluas, yaitu 7,8 ribu Km^2 . Sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km^2 . Namun setelah adanya desentralisasi kita dapat melihat perbandingan keadaan Kabupaten dan Kotanya. Kini Sumatera Barat memiliki 19 daerah kabupaten / kota, dimana terdapat 12 kabupaten dan 7 kota. Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km^2 sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km^2 .

Kondisi alam Sumatera Barat sampai saat ini masih diliputi oleh awan lindung yang mencapai sekitar 45,17 persen dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23190,11 Km^2 atau sekitar 54,83 persen dari kawasan seluruhnya.

Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan semua pegunungan yang terdapat hampir di semua kabupaten dan kota. Gunung yang

paling tinggi di Sumatera Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2913 meter dari permukaan laut yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Sumatera Barat juga memiliki sekitar empat danau yang indah, satu berada di Kabupaten Agam yaitu danau Maninjau dan tiganya lagi berada di Kabupaten Solok yaitu danau Singkarak, danau diatas dan danau dibawah. Danau Singkarak adalah danau Terluas di Kabupaten Solok (sekitar 13011 Ha).

4.2 Pemerintahan

Provinsi Sumatera Barat sekarang memiliki wilayah administrasi terdiri atas 12 kabupaten dan 7 kota. Mulai tahun 2001 yang semula berjumlah 14 Kabupaten/ Kota terjadi penambahan Kabupaten/ Kota baru seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Pariaman merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Dan tahun 2004 terjadi pemekaran daerah lagi yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang masing-masing merupakan pecahan dari Kabupaten Pasaman, Sijunjung dan Solok.

Dengan penambahan 5 Kabupaten / Kota baru berarti terjadi juga perubahan kecamatan, yaitu menjadi 175 kecamatan dengan jumlah nagari sekitar 568 nagari dan 260 kelurahan, 1 daerah UPT dan 125 desa dengan 3474 jorong.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2007 membawahi 30 unit organisasi pelayanan, panti dan kantor lainnya. Dari seluruh unit / organisasi yang berada di bawah naungan Pemda Provinsi Sumatera Barat dilengkapi dengan aparatur 8.352 orang. Komposisi aparatur menurut golongan gaji terdiri atas 2,31persen golongan I, 25,26 persen golongan II, 64,48 persen golongan III dan golongan IV sebanyak 7,95 persen.

4.3 Tinjauan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum perekonomian di Provinsi Sumatera Barat selama periode 1994-2007. Kondisi ekonomi tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi makro seperti nilai tambah yang dihasilkan, struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan sebagainya. Namun penulis hanya akan membahas beberapa indikator saja yang sesuai dengan tema yang penulis angkat.

4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Sebelum Desentralisasi

PERTUMBUHAN PDRB SEKTORAL SEBELUM DESENTRALISASI

LAPANGAN USAHA	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	-	-	8.51	7.14	2.00	0.18	1.77	0.80
Pertambangan dan Penggalian	-	-	19.70	6.42	10.71	10.44	-9.91	0.67
Industri Pengolahan	-	-	11.16	13.68	6.81	-8.34	1.26	7.13
Listrik, Gas & Air Bersih	-	-	18.49	33.69	32.31	9.47	14.64	15.11
Bangunan	-	-	4.76	15.49	4.71	35.29	-7.02	4.22
Perdagangan, Hotel dan restoran	-	-	6.99	7.50	3.97	-4.22	1.20	4.32
Pengangkutan & Komunikasi	-	-	11.78	8.62	10.56	-8.05	5.18	5.75
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-	-	3.73	3.44	2.89	15.39	0.42	4.66
Jasa-jasa	-	-	5.74	5.84	4.64	2.36	2.76	3.61
PDRB	-	-	8.34	8.46	5.14	-6.40	1.18	3.84
Laju Pert Eko Sblm Desentralisasi (r)	3.30							

Pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat mengalami sedikit peningkatan pada tahun 1996 yaitu sebesar 8.46% daripada tahun sebelumnya. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari tahun ke tahun berikutnya tidaklah berjalan sesuai dengan rencana. Terlihat bahwa pada tahun 1997 hingga puncaknya di tahun 1998 saat krisis melanda negeri ini, Sumatera Barat pun terkena imbas yang dihasilkan dari krisis moneter tersebut.

bahwa pada tahun 1997 hingga puncaknya di tahun 1998 saat krisis melanda negeri ini, Sumatera Barat pun terkena imbas yang dihasilkan dari krisis moneter tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami penurunan yang sangat luar biasa hingga mencapai posisi -6,40 persen. Terlihat bahwa pada tahun tersebut hanya tiga lapangan usaha yang tumbuh positif, namun tetap mengalami penurunan pertumbuhan yaitu: Pertanian, Listrik, Gas & air bersih, dan Jasa-jasa. Sedangkan lapangan usaha yang lainnya mengalami pertumbuhan yang negatif, terutama pertambangan dan penggalian, bangunan dan keuangan yang mencapai dua digit. Namun akhirnya pada periode tahun 2000 sebelum dilaksanakannya desentralisasi, perekonomian di Sumatera Barat sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sehingga dapat kita ketahui laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebelum desentralisasi yaitu sebesar 3.30 persen per tahun.

Pembahasan di atas hanya berupa penjelasan singkat mengenai bentuk pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sumatera Barat sebelum adanya kebijakan desentralisasi. Maka untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah desentralisasi di Sumatera Barat, perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Setelah Desentralisasi

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	4.87	7.86	7.64	5.79	5.13	5.01	4.97
Pertambangan dan Penggalian	-0.61	1.88	1.06	3.26	3.09	3.04	4.89
Industri Pengolahan	3.11	2.58	1.99	4.53	4.93	4.47	5.79
Listrik, Gas & Air Bersih	15.49	11.26	4.87	5.90	12.51	8.93	6.90
Bangunan	2.30	3.26	6.99	7.62	4.69	7.26	5.33
Perdagangan, Hotel dan restoran	4.46	4.89	4.65	5.29	5.97	6.73	6.95
Pengangkutan & Komunikasi	3.72	6.54	8.06	8.03	9.81	10.27	9.33
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3.42	2.18	5.22	6.35	6.33	7.87	7.17
Jasa-jasa	2.39	1.99	3.63	3.67	4.21	4.85	6.02
PDRB	3.66	4.69	5.26	5.47	5.73	6.14	6.34
Laju Pertumbuhan PDRB 2001-2007	5.61						

Sumber: BPS, Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sumatera Barat selama periode 2001 sampai 2007. Perekonomian berada dalam masa pemulihan pasca krisis moneter yang terjadi di tahun 1998, terlihat dari pertumbuhan PDRB sektoral yang semakin bergerak naik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mulai membaik. Dari tahun 2001 sampai tahun 2007 laju rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5.61 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 dengan nilai laju pertumbuhan rata-rata hanya sebesar 3.30 persen per tahun. Kebijakan diberlakukannya desentralisasi ternyata membawa perubahan yang cukup baik, terlihat dari perkembangan pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat yang sedang meningkat walau dengan jumlah laju pertumbuhan rata-rata yang tidak terlalu besar.

4.3.2 Struktur Perekonomian Sumatera Barat

Tahun 2007 struktur perekonomian Sumatera Barat masih di dominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Dimana sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 24,67 persen, perdagangan dan hotel memberikan kontribusi sebesar 18,40 persen dan jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 16,22 persen. Peranan sektor-sektor tersebut secara total melebihi 57 persen.

Sektor pertanian pada tahun 2007 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,97 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya tumbuh sekitar 5,01 persen. Menurunnya pertumbuhan sektor ini pada tahun 2007 disebabkan karena melemahnya pertumbuhan tiga sub sektor yang membentuknya yaitu sub sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Jika diamati laju pertumbuhan rata-rata semua sektor penyusun PDRB yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebelum maupun setelah adanya kebijakan desentralisasi, maka dilihat sektor-sektor mana saja yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari waktu ke waktunya.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing**Lapangan Usaha(%)**

LAPANGAN USAHA	Sebelum Desentralisasi (1994-2001)	Setelah Desentralisasi (2001-2007)
Pertanian	3.35	6.06
Pertambangan dan Penggalian	2.29	2.86
Industri Pengolahan	5.03	4.04
Listrik, Gas & Air Bersih	20.28	8.36
Bangunan	-3.76	5.85
Perdagangan, Hotel dan restoran	3.21	5.74
Pengangkutan & Komunikasi	5.42	8.67
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-0.31	5.84
Jasa-jasa	4.15	4.05

Sumber: BPS, Data diolah

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di Sumatera Barat sebagian besar mengalami peningkatan. Peningkatan yang cukup besar berada di sektor bangunan, angka laju pertumbuhan yang diperlihatkan sebelum adanya kebijakan desentralisasi adalah sebesar -3.76 persen kemudian meningkat menjadi 5.85 persen atau meningkat sebesar 9.61 persen. Kemudian disusul pada urutan kedua yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, semula sektor ini hanya memiliki angka laju pertumbuhan sebesar -0.31 persen. Namun setelah adanya kebijakan desentralisasi, sektor ini mengalami peningkatan dari angka semula yaitu pada angka 5.84 atau mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 6.15 persen.

Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang hampir sama yaitu sekitar 2.50 sampai 3.50 persen setelah diberlakukannya

kebijakan desentralisasi tersebut. Jika dibandingkan dengan sektor-sektor sebelumnya perkembangan ketiga sektor ini memang terbilang cukup lambat.

Selain mengalami peningkatan terhadap laju pertumbuhan seperti sektor-sektor yang dibahas sebelumnya, ternyata terdapat pula tiga sektor ekonomi yang laju pertumbuhannya semakin menurun, yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor jasa. Dengan penurunan masing – masing laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0.99 persen, 11.92 persen dan 0.10 persen. Tampak bahwa sektor listrik, gas dan air bersih mengalami penurunan yang cukup besar diantara ketiga sektor lainnya.

Setelah membahas mengenai laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masing-masing sektor selama dua periode (sebelum dan setelah kebijakan desentralisasi). Analisis selanjutnya bertujuan untuk melihat bagaimanakah pengaruh kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi tersebut terhadap PDRB yang ada di Sumatera Barat. Untuk membahasnya maka perhatikanlah tabel berikut ini.

Tabel 4. Kontribusi Masing-Masing Lapangan Usaha

LAPANGAN USAHA	Sebelum Desentralisasi							Setelah Desentralisasi						
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	23.5	23.5	23.21	22.52	24.10	24.24	23.53	23.80	24.52	25.08	25.15	25.01	24.74	24.4
Pertambangan dan Penggalian	4.0	4.5	4.39	4.62	4.42	3.94	3.82	3.66	3.56	3.42	3.35	3.26	3.17	3.1
Industri Pengolahan	12.7	13.1	13.69	13.91	13.62	13.63	14.06	13.99	13.70	13.28	13.16	13.06	12.86	12.7
Listrik, Gas & Air Bersih	0.4	0.4	0.50	0.63	0.73	0.83	0.92	1.03	1.09	1.09	1.09	1.16	1.19	1.20
Bangunan	7.6	7.3	7.78	7.75	5.36	4.92	4.94	4.88	4.81	4.89	4.99	4.94	4.99	4.9
Perdagangan, Hotel dan restoran	18.2	18.0	17.82	17.62	18.03	18.04	18.12	18.26	18.29	18.19	18.15	18.20	18.30	18.4
Pengangkutan & Komunikasi	10.2	10.6	10.59	11.13	10.94	11.37	11.58	11.59	11.79	12.10	12.40	12.88	13.38	13.7
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6.3	6.0	5.75	5.63	5.09	5.05	5.09	5.08	4.95	4.95	4.99	5.02	5.10	5.1
Jasa-jasa	17.1	16.7	16.27	16.19	17.71	17.99	17.95	17.73	17.27	17.00	16.71	16.47	16.27	16.2
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Data diolah

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, sepertinya penyumbang kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Sumatera Barat baik sebelum maupun setelah adanya kebijakan desentralisasi tetap dipegang oleh sektor pertanian. Sektor pertanian memang selalu menjadi yang dominan dari tahun ke tahun dalam kontribusinya, terlihat bahwa sumbangannya terhadap PDRB selalu diatas 20 persen setiap tahunnya. Kontribusi sektor pertanian mengalami peningkatan yang besar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 25,15 persen.

Kemudian disusul pada urutan ke dua yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini memberikan kontribusinya terhadap PDRB rata-rata sebesar 18 persen setiap tahunnya, diikuti oleh sektor jasa yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17 persen setiap tahunnya dimana pada tahun 1999 sektor ini memberikan kontribusi hampir 18 persen dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dan sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi rata-rata tiap tahunnya sebesar 12 persen. Namun pada dua tahun belakang, yaitu tahun 2006 dan 2007 sektor ini memberikan kontribusi yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2006-2007 sektor pengangkutan dan komunikasi tersebut memiliki nilai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan sektor industri pengolahan yaitu sebesar lebih 13 persen.

4.3.3 PDRB Perkapita

Tabel 5. PDRB perkapita Harga Konstan 2000 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Kabupaten / Kota	Sebelum Desentralisasi								Setelah Desentralisasi						
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Kabupaten																
1	Pesisir Selatan	2.71	2.85	3.00	3.14	3.23	3.06	3.35	3.38	3.74	4.01	3.65	3.69	3.84	3.98	4.13
2	Solok	2.92	3.07	3.24	3.18	3.55	3.35	3.83	3.89	3.97	4.07	4.36	4.50	4.69	4.91	5.15
3	Sawahlunto / Sijunjung	4.44	4.65	4.83	5.05	5.14	4.86	5.32	5.38	5.40	5.61	5.16	5.30	5.43	5.62	5.79
4	Tanah Datar	3.22	3.42	3.74	3.99	4.16	3.96	4.36	4.50	4.57	4.79	5.34	5.47	5.89	6.21	6.57
5	Padang Pariaman	2.90	3.10	3.35	3.59	3.72	3.52	3.86	3.96	4.18	4.26	4.62	4.75	5.20	6.15	6.47
6	Agam	3.33	3.53	3.77	4.12	4.28	4.09	4.23	4.36	4.50	4.71	4.89	5.12	5.47	5.78	6.13
7	50 Kota	4.47	4.74	5.04	5.37	5.55	5.22	5.34	5.49	5.67	5.88	5.91	6.18	6.55	6.89	7.26
8	Pasaman	2.95	3.10	3.31	3.41	3.48	3.31	3.54	3.61	3.79	3.98	3.56	3.98	4.18	4.34	4.52
Kota																
9	Padang	8.16	8.64	9.22	9.79	10.13	9.16	10.19	10.43	10.58	10.86	10.84	10.99	11.37	11.68	12.13
10	Solok	5.19	5.42	3.48	6.05	6.14	5.74	6.69	6.75	6.77	6.91	6.67	6.85	7.24	7.50	7.79
11	Sawahlunto	7.32	7.77	9.83	9.27	9.34	8.53	8.88	8.25	7.98	7.79	8.03	8.23	8.38	8.42	8.50
12	Padang Panjang	4.77	5.11	5.47	5.88	6.08	5.72	6.02	6.19	6.34	6.62	6.58	6.78	6.50	6.63	6.75
13	Bukittinggi	5.15	5.53	6.00	6.44	6.73	6.17	6.58	6.76	6.95	7.16	7.01	7.17	7.57	7.90	8.27
14	Payakumbuh	4.22	4.48	4.86	5.15	5.36	5.07	5.24	5.36	5.49	5.68	5.63	5.85	6.25	6.57	6.93
Provinsi		4.20	4.46	4.78	5.07	5.27	4.84	5.27	5.39	5.51	5.69	5.91	6.08	6.39	6.68	7.01

Sumber: BPS, Data diolah

Perkembangan PDRB perkapita Sumatera Barat dari tahun 1994 sampai tahun 2007 terus meningkat, penurunan PDRB perkapita hanya terjadi pada tahun 1998, pada saat krisis. Secara umum PDRB perkapita daerah kota lebih besar dibandingkan daerah kabupaten, hal ini dikarenakan perbedaan struktur ekonomi antar kedua daerah. Kota Payakumbuh merupakan kota yang memiliki PDRB perkapita terendah, dimana PDRB perkapita selalu dibawah PDRB perkapita provinsi.

PDRB perkapita kabupaten cenderung lebih rendah daripada PDRB perkapita provinsi, hal ini dikarenakan daerah kabupaten yang cenderung bersifat agraris, rendahnya pengolahan produk agraris membuat PDRB perkapita kabupaten cenderung lebih rendah. Kabupaten 50 Kota adalah kabupaten yang memiliki PDRB perkapita yang paling tinggi dengan pertumbuhan yang mantap, hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB perkapita Kabupaten 50 Kota, yaitu pada tahun 1994 yang hanya Rp 4.47 juta menjadi Rp 7.26 juta. Tanah datar, Padang Pariaman dan Agam juga memiliki pertumbuhan PDRB perkapita yang cukup baik. Pertumbuhan PDRB perkapita yang rendah dan tidak konsisten ditunjukkan oleh Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung terutama pada masa setelah desentralisasi, ketergantungan Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung pada sektor penggalian merupakan salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung ini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Sektor - Sektor Basis

5.1.1 Analisis Sektor - Sektor Basis Pada Kabupaten di Sumatera Barat

a. Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak pada $0^{\circ}50' \text{ LS} - 3^{\circ}30' \text{ LS}$ dan $97^{\circ}30' \text{ BT} - 100^{\circ}30' \text{ BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $5794,95 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 76 orang per KM^2 . Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang mampu meningkatkan kinerja daerahnya setelah adanya kebijakan desentralisasi yang di usung oleh pemerintah pusat. Terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata yang pada daerah ini mengalami peningkatan menjadi 4,60% dari sebelumnya yaitu sebesar 2,81%. Namun, pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kabupaten Pesisir Selatan masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat setelah desentralisasi yaitu menjadi 5,33% (data terlampir).

Dengan menggunakan alat bantu *Location Quotient* (LQ), komponen *proportional shift* (Pj) dan komponen *differential shift* (Dj) dalam *Shift Share* yang kemudian hasil perhitungan tersebut digabungkan dalam analisis *tipologi sektoral*, maka hal tersebut dapat memperjelas dan memperkuat analisa. Berdasarkan hasil data yang telah diolah sebelumnya, penulis membatasi analisa pembahasan hanya untuk mengamati sektor-sektor yang menjadi basis perekonomian dalam kabupaten / kota di Sumatera Barat.

Tabel 5.1 Tipologi Sektor Kabupaten Pesisir Selatan Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
IV	Pertanian	1.48	-856.49 (l)	53023.75 (l)	Lebih dari Cukup	I	Pertanian	1.33	41906.38 (c)	2553154.64 (c)	Istimewa
II	Perdagangan, hotel dan restoran	1.18	-2550.59 (l)	7158.63 (c)	Baik Sekali	I	Perdagangan, hotel dan restoran	1.21	6111.86 (c)	1440408.16 (c)	Istimewa
III	Jasa-jasa	1.14	12619.24 (c)	-8310.05 (l)	Baik	II	Jasa-jasa	1.17	- (l)	1317993.78 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata indeks LQ dari tahun 1994-2007 dan disajikan pada table di atas, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tiga sektor basis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian daerah, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Artinya sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Pesisir Selatan, namun juga memenuhi kebutuhan dari luar daerah lainnya. Dengan kata lain sektor ini merupakan sektor yang berpotensi ekspor.

Hasil analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 untuk sektor pertanian menunjukkan nilai komponen rata-rata P_j sebesar -856.49 yang berarti bahwa daerah ini berspesialisasi dalam sektor yang tumbuh lambat di provinsi. Sedangkan dari hasil perhitungan rata-rata komponen D_j untuk sektor pertanian menyimpulkan bahwa sektor ini memiliki daya saing yang menurun sehingga pertumbuhannya lebih lambat di daerah di banding pertumbuhan untuk sektor yang sama di provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran nilai rata-rata komponen D_j yang negatif, yaitu sebesar -53023.75. Perhitungan analisis tipologi sektoral menunjukkan sektor pertanian termasuk dalam tipologi IV sehingga sektor ini adalah sektor yang tingkat kepotensialannya menunjukkan “lebih dari cukup” untuk dikembangkan.

Namun hasil analisis *Shift Share* selama tahun 2001-2007 memperlihatkan perubahan yang cukup baik untuk sektor pertanian. Terlihat bahwa nilai rata-rata komponen P_j dan D_j masing-masing menjadi 41906.38 dan 2553154.64 yang semula negatif kini cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan yang lebih cepat di provinsi dan daya saingnya pun semakin meningkat. Perhitungan analisis tipologi sektoral menunjukkan sektor pertanian termasuk ke dalam tipologi I sehingga sektor ini adalah sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” dan menunjukkan bahwa

sektor ini memiliki kinerja sektor yang juga dapat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa yang mengalami kemajuan cukup baik setelah adanya kebijakan desentralisasi ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Perhitungan analisis tipologi sektoral sebelum desentralisasi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan tingkat kepotensialan yang "baik sekali" menjadi memiliki tingkat kepotensialan yang "istimewa" setelah desentralisasi dan untuk sektor jasa memiliki tingkat kepotensialan yang "baik" sebelum desentralisasi menjadi tingkat kepotensialan yang "baik sekali" setelah adanya desentralisasi walaupun ternyata sektor ini mengalami pertumbuhan yang lambat di tingkat provinsi dibandingkan sebelumnya.

b. Kabupaten Solok

Kabupaten Solok terletak pada $0^{\circ}32' \text{ LS} - 1^{\circ}45' \text{ LS}$ dan $100^{\circ}27' \text{ BT} - 101^{\circ}41' \text{ BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar 3738 KM^2 dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 95 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kabupaten Solok setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,35% menjadi 5,24%. Namun, pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kabupaten Solok masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat setelah desentralisasi yaitu menjadi 5,33% (data terlampir).

Sebelum desentralisasi ekonomi terjadi, Kabupaten Solok hanya memiliki satu sektor basis ekonomi yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata indeks LQ tahun 1994-2000 yaitu sektor pertanian. Sektor ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan memiliki potensi untuk ekspor. Sedangkan berdasarkan analisis

Tabel 5.2 Tipologi Sektoral Solok Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
III	Pertanian	1.77	628.89 (c)	10012.68 (l)	Baik	I	Pertanian	1.72	19317.06 (c)	2719955.30 (c)	Istimewa
-	-	-	-	-	-	II	Pertambangan dan Penggalian	1.01	-8967.62 (l)	222923.16 (c)	Baik Sekali
-	-	-	-	-	-	I	Bangunan	1.09	1069.70 (c)	467897.93 (c)	Istimewa

Sumber BPS, PDRB Kabupaten Solok dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

Shift Share selama tahun 1994-2000 untuk sektor pertanian menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj sebesar 628,89 yang berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang tumbuh cepat di propinsi. Sedangkan hasil perhitungan komponen Dj, sektor pertanian adalah sektor yang memiliki daya saingnya menurun sehingga pertumbuhannya di daerah lebih lambat dibanding pertumbuhan dengan sektor yang sama di provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen Dj yang negatif, yaitu sebesar -10012,68. Perhitungan analisis tipologi sektoral menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk dalam tipologi III sehingga sektor ini adalah sektor yang tingkat kepotensialannya menunjukkan kategori “baik” untuk dikembangkan.

Kemudian pengolahan data saat desentralisasi tahun 2001-2007 menunjukkan pergerakan sektor perekonomian yang cukup baik untuk Kabupaten Solok. Berdasarkan indeks rata-rata *LQ* yang diamati pada tahun tersebut, terlihat bahwa daerah ini mampu meningkatkan jumlah sektor basisnya yang semula hanya satu yaitu sektor pertanian menjadi tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor bangunan. Di antara ketiga sektor tersebut terdapat dua sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” tentunya sangat baik untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sektor tersebut adalah sektor pertanian dan sektor bangunan. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor pertanian menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj sebesar 19317,06 dan sektor bangunan menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj sebesar 1069,70 yang berarti bahwa pertumbuhan kedua sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan komponen Dj untuk kedua sektor tersebut yang bernilai positif dengan masing-masing nilainya adalah 2719955.30 dan 467897.93, artinya kedua sektor tersebut adalah sektor yang daya saingnya meningkat

sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi.

Sedangkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan nilai Pj sebesar -8967,62 karena memiliki nilai negatif maka sektor ini merupakan sektor yang tumbuh lambat di propinsi. Sedangkan nilai rata-rata komponen Dj untuk sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan angka yang positif sebesar 222923.16 yang berarti bahwa sektor ini pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan di propinsi dan memiliki daya saing yang meningkat. Berdasarkan perhitungan analisis tipologi sektoral, sektor pertambangan dan penggalian termasuk ke dalam tipologi II sehingga sektor ini adalah sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “baik sekali” dan menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kinerja sektor yang juga dapat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung

Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung terletak pada $0^{\circ}18' \text{ LS} - 1^{\circ}42' \text{ LS}$ dan $100^{\circ}42' \text{ BT} - 101^{\circ}52' \text{ BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $3130,80 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 65 orang per KM^2 . Kabupaten ini sebelum desentralisasi memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi yaitu sebesar 3,49% sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi sebesar 3,43%. Namun setelah desentralisasi pertumbuhan rata-rata ekonomi provinsi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten ini yaitu sebesar 5,33% sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di kabupaten hanya sebesar 5,14% (data terlampir). Peningkatan pertumbuhan yang terjadi di provinsi dipicu oleh perkembangan sektor riil dimasing-masing kabupaten/ kota sehingga

Tabel 5.3 Tipologi Sektor Sawahlunto / Sijunjung Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
								LQ	Pj	Dj	
III	Pertanian	1.18	325.08 (c)	-474.33 (l)	Baik	I	Pertanian	1.14	8141.95 (c)	1101374.69 (c)	Istimewa
I	Pertambangan dan penggalian	3.40	10639.20 (c)	50643.51 (c)	Istimewa	II	Pertambangan dan penggalian	4.91	- 27550.39 (l)	542611.27 (c)	Baik Sekali
II	Bangunan	1.87	-8525.45 (l)	9104.29 (c)	Baik Sekali	I	Bangunan	1.99	1237.59 (c)	673469.54 (c)	Istimewa
IV	Jasa-jasa	1.05	-2107.57 (l)	- 18932.01 (l)	Lebih dari Cukup	II	Jasa-jasa	1.06	- 16495.07 (l)	743892.04 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

mampu meningkatkan nilai output di tiap sektornya dan tentu mampu mempengaruhi perkembangan PRDB provinsi setiap tahunnya

Dengan menggunakan analisis tipologi sektoral maka kita dapat melihat bagaimana bentuk perbandingan kondisi perekonomian yang tercermin dalam sektor ekonominya yang terjadi sebelum dan sesudah desentralisasi pada kabupaten ini. Berdasarkan nilai rata-rata indeks *LQ* yang diperoleh dari data tahun 1994-2000 dan 2001-2007 untuk melihat sektor-sektor mana saja di Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung yang menjadi basis perekonomiannya, maka terdapat empat sektor yang menjadi basis dalam kegiatan perekonomian; yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan sektor jasa. Artinya sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan Sawahlunto / Sijunjung, namun juga memenuhi kebutuhan dari luar daerah lainnya. Dengan kata lain sektor ini merupakan sektor yang berpotensi ekspor.

Berdasarkan keempat sektor tersebut hanya sektor pertambangan dan penggalianlah yang sebelum desentralisasi memiliki tingkat kepotensialan yang "Istimewa" karena berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor tersebut menunjukkan nilai rata-rata komponen *Pj* positif sebesar 10639,20 yang berarti bahwa pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan komponen *Dj* untuk sektor tersebut yang bernilai positif sebesar 50643,51, artinya sektor tersebut adalah sektor yang memiliki peningkatan daya saing sehingga pertumbuhannya di daerah lebih cepat dibanding pertumbuhan untuk sektor yang sama di provinsi. Sedangkan ketiga sektor lainnya seperti sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa masing-masingnya memiliki tingkat kepotensialan "baik", "baik sekali" dan "lebih dari cukup". Untuk sektor jasa sendiri nilai kepotensialannya hanya pada tingkat "lebih dari cukup", berdasarkan hasil

analisis *Shift Share* sektor ini memiliki nilai rata-rata komponen Pj dan Dj yang bergerak negatif sehingga sektor tersebut berkembang lebih lambat ditingkat provinsi.

Kemudian setelah kebijakan desentralisasi dilaksanakan, pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja sektor-sektor perekonomiannya. Terlihat bahwa keempat sektor basis tersebut mengalami peningkatan dalam tingkat kepotensialannya. Kini ada dua sektor ekonomi yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” yaitu sektor pertanian dan sektor bangunan yang semula hanya ada dalam kategori “baik”. Kedua sektor ini apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* tahun 2001-2007 sektor pertanian dan sektor bangunan ini memiliki nilai rata-rata Pj masing-masing sebesar 8141.95 dan 1237.59 dan nilai rata-rata masing-masing Dj sebesar 1101374.69 dan 673469.54 yang bergerak positif sehingga kedua sektor tersebut berkembang lebih cepat ditingkat provinsi dan daya saingnya meningkat.

d. Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar terletak pada $0^{\circ}17' \text{ LS} - 3^{\circ}39' \text{ LS}$ dan $100^{\circ}19' \text{ BT} - 101^{\circ}52' \text{ BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar 1336 KM^2 dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 251 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,21% menjadi 5,00%. Namun, pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat setelah desentralisasi yaitu sebesar 5,33% (data terlampir).

Sebelum desentralisasi ekonomi terjadi, Kabupaten Tanah Datar hanya memiliki dua sektor basis ekonomi yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata indeks *LQ* tahun 1994-

Tabel 5.4 Tipologi Sektoral Tanah Datar Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
IV	Pertanian	1.63	-1113.47 (l)	46987.63 (l)	Lebih dari Cukup	I	Pertanian	1.53	26474.47 (c)	3137450.42 (c)	Istimewa
II	Bangunan	1.38	- 51174.16 (l)	13975.97 (c)	Baik Sekali	I	Bangunan	1.50	321.68 (c)	867635.39 (c)	Istimewa
	-	-	-	-	-	II	Jasa-jasa	1.06	- 34135.63 (l)	1316249.72 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kabupaten Tanah Datar dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

2000 yaitu sektor pertanian dan sektor bangunan. Sedangkan berdasarkan analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 nilai rata-rata komponen *Pj* untuk sektor pertanian menunjukkan nilai sebesar -1113,47 dan nilai sektor bangunan -51174,16 yang berarti bahwa kedua sektor ini merupakan sektor yang lambat di propinsi. Sedangkan hasil perhitungan nilai rata-rata komponen *Dj*-nya, sektor pertanian adalah sektor yang memiliki daya saingnya menurun sehingga pertumbuhannya di daerah lebih lambat dibanding pertumbuhannya di provinsi untuk sektor yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen *Dj* yang negatif, yaitu sebesar -46987,63, dan nilai *Dj* untuk sektor bangunan sebesar positif 13975,97 yang berarti sektor ini memiliki peningkatan daya saing sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibanding pertumbuhannya di provinsi. Perhitungan analisis tipologi sektoral menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk dalam tipologi IV dan sektor bangunan termasuk dalam tipologi II, sehingga masing-masing sektor ini adalah sektor yang tingkat kepotensialannya menunjukkan kategori “lebih dari cukup” untuk dikembangkan dan “baik sekali” untuk dikembangkan.

Pengamatan saat desentralisasi tahun 2001-2007 menunjukkan pergerakan sektor perekonomian yang cukup baik untuk Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan indeks rata-rata *LQ* yang diamati pada tahun tersebut, terlihat bahwa daerah ini mampu meningkatkan jumlah sektor basisnya yang semula hanya dua sektor ekonomi yaitu sektor pertanian dan sektor bangunan menjadi tiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Di antara ketiga sektor tersebut terdapat dua sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” dengan kategori I dalam tipologi sektoralnya yaitu sektor pertanian dan sektor bangunan sedangkan sektor jasa-jasa berada pada katagori II dengan tingkat kepotensialan yang “sangat baik”. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola

dengan baik ketiga sektor berpotensi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor pertanian menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj-nya positif sebesar 26474,47 dan sektor bangunan menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj-nya pun positif yaitu sebesar 321,68 yang berarti bahwa pertumbuhan kedua sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan rata-rata komponen Dj untuk kedua sektor tersebut yang bernilai positif dengan masing-masing nilainya adalah 3137450,42 dan 867635,39, artinya kedua sektor tersebut adalah sektor yang memiliki peningkatan daya saing sehingga pertumbuhannya di daerah lebih cepat dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. Sehingga apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya kedua sektor tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar.

e. Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada $0^{\circ}11'$ LS - $0^{\circ}49'$ LS dan $98^{\circ}36'$ BT - $100^{\circ}28'$ BT dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar 1328,79 KM² dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 294 orang per KM². Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang berhasil meningkatkan kinerja daerahnya dengan memanfaatkan sektor-sektor perekonomian yang dimiliki oleh kabupaten tersebut setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang. Terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata yang pada daerah ini mengalami peningkatan menjadi 7,65% dari sebelumnya yaitu sebesar 3,57%. Selain itu pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kabupaten Padang Pariaman tergolong lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 5,33% (data terlampir).

Tabel 5.5 Tipologi Sektoral Padang Pariaman Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
II	Pertanian	1.32	-853.26 (l)	2726.91 (c)	Baik Sekali	I	Pertanian	1.19	20660.45 (c)	2250248.01 (c)	Istimewa
IV	Pertambangan da Penggalian	1.21	-2853.28 (l)	-287.13 (l)	Lebih dari Cukup	II	Pertambangan da Penggalian	1.33	16930.08 (l)	432506.01 (c)	Baik Sekali
I	Industri Pengolahan	1.01	24786.92 (c)	9533.92 (c)	Istimewa	II	Industri Pengolahan	1.02	25134.24 (l)	1023905.85 (c)	Baik Sekali
I	Listrik, gas dan Air Minum	1.20	13269.34 (c)	9492.87 (c)	Istimewa	I	Listrik, gas dan Air Minum	1.24	5767.86 (c)	34993.63 (c)	Istimewa
IV	Bangunan	1.03	- 36746.75 (l)	-186.02 (l)	Lebih dari Cukup	I	Bangunan	1.07	244.90 (c)	721800.92 (c)	Istimewa
III	Jasa-jasa	1.21	14781.88 (c)	-1781.35 (l)	Baik	II	Jasa-jasa	1.15	- 37808.44 (l)	1534997.39 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kabupaten Padang Pariaman dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

Kabupaten Padang Pariaman tergolong kabupaten yang mampu memanfaatkan sektor-sektor ekonomi yang ada pada daerahnya sehingga mampu dikembangkan lagi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sebelum adanya kebijakan desentralisasi, berdasarkan nilai indeks rata-rata LQ yang diperoleh dari tahun 1994-2000 menunjukkan bahwa kabupaten ini mampu mengelola sektor perekonomiannya secara apik. Dari sembilan sektor penyusun PDRB di Kabupaten Padang Pariaman, enam diantaranya merupakan sektor basis yaitu ; sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan dan terakhir adalah sektor jasa-jasa. Artinya keenam sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di kabupaten tersebut dan sisanya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekspor.

Dari keenam sektor unggulan tersebut, dua diantaranya merupakan sektor yang memiliki tingkat kepotensialan “istimewa” atau berada dalam karegori tipologi I, yaitu; sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air minum. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor industri pengolahan menunjukkan nilai rata-rata-rata komponen Pj -nya positif sebesar 24786,92 dan sektor listrik, gas dan air minum menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj -nya pun positif yaitu sebesar 13269,34 yang berarti bahwa pertumbuhan kedua sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan rata-rata komponen Dj untuk kedua sektor tersebut yang bernilai positif dengan masing-masing nilainya adalah 9533,92 dan 9492,87 , artinya kedua sektor tersebut adalah sektor yang daya saingnya meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat di kabupaten dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. Sehingga apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya kedua sektor tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar.

Kemudian pada kategori tipologi urutan ke II dengan tingkat kepotensialan “baik sekali” terdapat pada sektor pertanian. Sektor ini memiliki nilai rata-rata komponen Pj yang negatif sebesar -853,26 artinya sektor tersebut di tingkat provinsi tumbuh lebih lambat sedangkan nilai rata-rata komponen Dj adalah positif 2726.91 yang berarti bahwa sektor tersebut tumbuh di kabupaten lebih cepat dibandingkan dengan provinsi sehingga daya saingnya pun dapat meningkat. Sehingga apabila sektor ini dikelola dengan lebih baik, tentunya akan mendatangkan hasil yang semakin baik lagi dari waktu ke waktu.

Kemudian bentuk pergerakan sektor ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman setelah desentralisasi dilaksanakan dapat dilihat berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata indeks *LQ* dari tahun 2001-2007 dan disajikan pada table di atas. Kabupaten Padang Pariaman memiliki enam sektor basis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian daerah. Sektor-sektor tersebut masih sama dengan sebelum kebijakan desentralisasi di berlakukan, namun kita dapat memperoleh gambaran yang sangat baik dari pergerakan masing-masing sektornya. Semula dari enam sektor unggulan hanya dua sektor yang memiliki tingkat kepotensialan “istimewa” yaitu; sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air minum, kini menjadi tiga sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” yaitu; sektor listrik, gas dan air minum, sektor pertanian, sektor bangunan. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai rata-rata komponen Pj dan nilai rata-rata komponen Dj yang positif artinya sektor tersebut mampu tumbuh lebih cepat di provinsi dan memiliki daya saing yang cukup tinggi, sehingga apabila semakin dikembangkan, sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tiga sektor lainnya pun turut memperlihatkan kemajuannya setelah adanya desentralisasi ini. Terbukti bahwa sektor yang semula berada pada peringkat III dan peringkat IV dalam tipologi kini meningkat ke peringkat II, yaitu memiliki tingkat

kepotensialan yang “baik”. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Berdasarkan analisa *Shift Share* nilai rata-rata komponen Pj yang diperoleh untuk masing-masing sektor bernilai negatif yaitu, -16930,08, -25134,24 dan -37808,44 artinya sektor-sektor tersebut tumbuh lambat di provinsi. Namun jika pemerintah daerah mampu mengelola dengan lebih baik lagi, sektor-sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat dan mendatangkan hasil yang diharapkan.

f. Kabupaten Agam

Kabupaten Agam yang terletak pada $0^{\circ}02'$ LS - $0^{\circ}29'$ LS dan $99^{\circ}52'$ BT - $100^{\circ}33'$ BT dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $2232,30 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 193 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kabupaten Agam setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,85% menjadi 5,54%. Selain itu pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kabupaten Agam tergolong lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 5,33% (data terlampir).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata indeks *LQ* dari tahun 1994-2000 dan disajikan pada table di bawah ini Kabupaten Agam memiliki empat sektor basis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian daerah, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor jasa-jasa. Artinya sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Agam, namun juga memenuhi kebutuhan dari luar daerah lainnya. Dengan kata lain sektor ini merupakan sektor yang berpotensi ekspor. Diantara keempat sektor basis tersebut hanya sektor pertanianlah yang memiliki peringkat yang tertinggi berdasarkan kalsifikasi tipologi

Tabel 5.6 Tipologi Sektoral Kabupaten Agam Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
II	Pertanian	1.23	-960.60 (l)	240521.90 (c)	Baik Sekali	I	Pertanian	1.38	26888.86 (c)	2576619.87 (c)	Istimewa
IV	Pertambangan da Penggalian	1.47	-4027.44 (l)	-79325.53 (l)	Lebih dari Cukup	II	Pertambangan da Penggalian	1.16	- 18428.86 (l)	863615.37 (c)	Baik Sekali
III	Industri Pengolahan	1.13	33264.74 (c)	-19600.01 (l)	Baik	II	Industri Pengolahan	1.09	- 31173.24 (l)	1378645.18 (c)	Baik Sekali
III	Jasa-jasa	1.03	15097.35 (c)	-126.28 (l)	Baik	-	-	-	-	-	-

Sumber BPS, PDRB Kabupaten Agam dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

sektoralnya. Sektor pertanian berada dalam tipologi II dengan tingkat kepotensialan yang dimiliki adalah “baik sekali”. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 nilai rata-rata komponen Pj untuk sektor pertanian menunjukkan nilai sebesar -960,60 yang berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang tumbuh lambat di propinsi. Sedangkan hasil perhitungan nilai rata-rata komponen Dj-nya, sektor pertanian adalah sektor yang memiliki daya saing yang meningkat sehingga pertumbuhannya di kabupaten Agam lebih cepat dibanding pertumbuhannya di provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen Dj yang positif, yaitu sebesar 240521,90.

Sedangkan untuk sektor industri pengolahan dan sektor jasa yang berada dalam tipologi III dengan tingkat kepotensialan sektor tergolong “baik”, jika diamati dengan menggunakan analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 nilai rata-rata komponen Pj untuk masing-masing sektornya adalah 33264.74 dan 15097.35 yang berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang tumbuh cepat di provinsi. Sedangkan hasil perhitungan nilai rata-rata komponen Dj-nya, sektor- sektor tersebut adalah sektor yang memiliki daya saing yang menurun sehingga pertumbuhannya di kabupaten Agam lebih rendah dibanding pertumbuhannya di provinsi untuk sektor yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen Dj yang negatif, yaitu sebesar. -19600.01 dan -126.28.

Kemudian pengamatan saat desentralisasi tahun 2001-2007 menunjukkan pergerakan sektor perekonomian yang kurang baik untuk Kabupaten Agam. Berdasarkan indeks rata-rata *LQ* yang diamati pada tahun tersebut, terlihat bahwa daerah ini memiliki sektor basis yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Semula sektor basis yang terdapat di Kabupaten Agam berjumlah empat namun berubah menjadi tiga yaitu; sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Di antara ketiga sektor tersebut terdapat satu sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” dan sangat baik untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar yaitu sektor pertanian Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor pertanian menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj sebesar 2888,86 yang berarti bahwa pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan nilai rata-rata komponen Dj untuk sektor pertanian yang bernilai positif dengan nilai sebesar, 2576619.87 artinya sektor tersebut adalah sektor yang daya saingnya meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi.

g. Kabupaten 50 Kota

Kabupaten Agam yang terletak pada $0^{\circ}22'$ LS - $0^{\circ}23'$ LS dan $100^{\circ}16'$ BT - $100^{\circ}51'$ BT dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar 3354,30 KM² dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 99 orang per KM² .Kondisi perekonomian Kabupaten 50 Kota setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,07% menjadi 5,28%. Namun, pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kabupaten 50 Kota masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat setelah desentralisasi yaitu menjadi 5,33% (data terlampir).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata indeks *LQ* dari tahun 1994-2007 dan disajikan pada table di atas, Kabupaten 50 Kota memiliki empat sektor basis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian daerah, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Artinya sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten 50 Kota, namun juga memenuhi kebutuhan dari luar daerah lainnya. Dengan kata lain sektor ini merupakan sektor yang berpotensi ekspor. Diantara keempat sektor basis tersebut sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki

Tabel 5.7 Tipologi Sektoral Kabupaten 50 Kota Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
IV	Pertanian	1.40	-1016.60 (l)	23358.64 (l)	Lebih dari Cukup	I	Pertanian	1.40	25714.44 (c)	2868281.98 (c)	Istimewa
II	Pertambangan dan Penggalian	1.51	-4010.75 (l)	3655.29 (c)	Baik Sekali	II	Pertambangan dan Penggalian	1.84	24900.32 (l)	605809.44 (c)	Baik Sekali
II	Perdagangan, Hotel dan restoran	1.19	-3226.48 (l)	12515.22 (c)	Baik Sekali	I	Perdagangan, Hotel dan restoran	1.24	6607.79 (c)	1831937.12 (c)	Istimewa
III	Jasa-jasa	1.01	13958.55 (c)	18723.60 (l)	Baik	-	-	-	-	-	-

Sumber BPS, PDRB Kabupaten 50 Kota dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

peringkat yang tertinggi berdasarkan kalsifikasi tipologi sektoralnya yaitu berada dalam tipologi II dengan tingkat kepotensialan yang dimiliki adalah “baik sekali”. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 nilai rata-rata komponen Pj untuk masing-masing menunjukkan nilai sebesar -4010,75 dan -3226,48 yang berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang tumbuh lambat di propinsi. Sedangkan hasil perhitungan nilai rata-rata komponen Dj-nya, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang memiliki daya saing yang meningkat sehingga pertumbuhannya di kabupaten 50 Kota lebih cepat dibanding pertumbuhannya di provinsi. Untuk sektor yang sama Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen Dj yang positif, masing-masing sebesar 3655,29 dan 12515,22.

Kemudian pengolahan data saat desentralisasi tahun 2001-2007 menunjukkan pergerakan sektor perekonomian yang kurang baik untuk Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan indeks rata-rata *LQ* yang diamati pada tahun tersebut, terlihat bahwa daerah ini memiliki sektor basis yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Semula sektor basis yang terdapat di Kabupaten 50 Kota berjumlah empat, namun berubah menjadi tiga setelah desentralisasi. Sektor-sektor tersebut yaitu; sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Di antara ketiga sektor tersebut terdapat dua sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” dan sangat baik untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* selama tahun 2001-2007 nilai rata-rata komponen Pj untuk masing-masing sektor menunjukkan nilai positif sebesar 25714,44 dan 6607,79 yang berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang cepat di provinsi. Sedangkan hasil perhitungan nilai rata-rata komponen Dj-nya, sektor pertanian dan sektor

perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang memiliki daya saing yang meningkat sehingga pertumbuhannya di kabupaten 50 Kota lebih cepat dibanding pertumbuhannya di provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen Dj yang positif, masing-masing sebesar 2868281.98 dan 1831937.12

h. Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman terletak pada $0^{\circ}54' \text{LS} - 3^{\circ}30' \text{LS}$ dan $99^{\circ}11' \text{BT} - 100^{\circ}22' \text{BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $4447,63 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 58 orang per KM^2 . Kabupaten ini sebelum desentralisasi memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata ekonomi yang lebih rendah yaitu 3,16% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata provinsi yaitu sebesar 3,43%. Namun setelah desentralisasi pertumbuhan rata-rata ekonomi provinsi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten ini yaitu sebesar 5,33% sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di kabupaten hanya sebesar 5,01% (data terlampir).

Sebelum desentralisasi ekonomi terjadi, Kabupaten Pasaman hanya memiliki dua sektor basis ekonomi yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata indeks *LQ* tahun 1994-2000 yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sedangkan berdasarkan analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 nilai rata-rata komponen Pj untuk sektor pertanian menunjukkan nilai sebesar -736,62 yang berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang lambat di propinsi dan nilai rata-rata komponen Pj untuk sektor bangunan adalah 7087,12 artinya sektor ini mampu tumbuh lebih cepat di provinsi. Sedangkan hasil perhitungan nilai rata-rata komponen Dj-nya, sektor pertanian adalah sektor yang memiliki daya saing yang cenderung meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibanding pertumbuhannya di provinsi untuk sektor yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata komponen Dj yang positif, yaitu sebesar 8102,47 dan nilai rata-rata komponen Dj untuk sektor jasa-jasa sebesar -3355,48 yang berarti sektor ini memiliki penurunan daya saing

Tabel 5.8 Tipologi Sektoral Kabupaten Pasaman Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
II	Pertanian	2.08	-736.62 (l)	8102.47 (c)	Baik Sekali	I	Pertanian	2.08	18419.02 (c)	2023312.86 (c)	Istimewa
III	Jasa-jasa	1.05	7087.12 (c)	3355.48 (l)	Baik	II	Jasa-jasa	1.05	17770.29 (l)	738793.69 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kabupaten 50 Kota dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

sehingga pertumbuhannya lebih lambat dibanding pertumbuhannya di provinsi. Perhitungan analisis tipologi sektoral menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk dalam tipologi II dan sektor Jasa-jasa termasuk dalam tipologi III, sehingga masing-masing sektor ini adalah sektor yang tingkat kepotensialannya menunjukkan kategori “lebih dari cukup” untuk dikembangkan dan “baik sekali” untuk dikembangkan.

Pengamatan saat desentralisasi tahun 2001-2007 menunjukan pergerakan sektor perekonomian yang cukup baik untuk Kabupaten Pasaman. Berdasarkan indeks rata-rata LQ yang diamati pada tahun tersebut, terlihat bahwa walaupun jumlah sektor basis yang dimilikinya tidak mengalami peningkatan ataupun pengurangan, namun kedua sektor tersebut telah memberikan peningkatan peringkat dalam pengklasifikasian tipologi sektoral. Semula sektor pertanian memiliki tingkat kepotensialan yang “baik sekali” dengan kategori II dalam tipologi sektoralnya, kini memiliki tingkat kepotensialan yang baik “istimewa” dengan kategori I. Sedangkan sektor jasa-jasa pun mengalami kenaikan satu peringkat menjadi lebih baik dan berada pada katagori II dengan tingkat kepotensialan yang “sangat baik”. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik kedua sektor berpotensi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor pertanian menunjukan nilai rata-rata komponen Pj -nya positif sebesar 18419,02 dan sektor jasa-jasa menunjukan nilai rata-rata komponen Pj -nya yang negatif yaitu sebesar -17770,29 yang berarti bahwa pertumbuhan sektor pertanian tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi sedangkan sektor jasa mengalami penurunan dan tumbuh lebih lambat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan rata-rata komponen Dj untuk kedua sektor tersebut yang bernilai positif dengan masing-masing nilainya adalah 2023312,86 dan 738793,69, artinya kedua sektor

tersebut adalah sektor yang daya saingnya meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. Sehingga apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya kedua sektor tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar.

5.1.2 Analisis Sektor - sektor Basis Pada Kota di Sumatera Barat

a. Kota Padang

Kota Padang yang terletak pada $0^{\circ} 44' \text{ LS} - 1^{\circ} 08' \text{ LS}$ dan $100^{\circ} 06' \text{ BT} - 100^{\circ} 34' \text{ BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $694,96 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1233 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kota Padang setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,80% menjadi 5,34%. Selain itu pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kota Padang tergolong lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 5,33% (data terlampir).

Kota Padang tergolong daerah yang mampu memanfaatkan sektor-sektor ekonomi yang ada pada daerahnya sehingga mampu dikembangkan lagi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sebelum adanya kebijakan desentralisasi, berdasarkan nilai indeks rata-rata *LQ* yang diperoleh dari tahun 1994-2000 menunjukkan bahwa kota ini mampu mengelola sektor perekonomiannya dengan baik. Dari sembilan sektor penyusun PDRB di Kota Padang, lima diantaranya merupakan sektor basis yaitu ; sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, dan terakhir adalah sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Artinya

Tabel 5.9 Tipologi Sektor Kota Padang Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
III	Industri Pengolahan	1.38	161166.53 (c)	118083.06 (l)	Baik	IV	Industri Pengolahan	1.31	- 146845.40 (l)	- 146845.40 (l)	Lebih dari Cukup
I	Listrik, Gas & Air Bersih	1.63	82500.01 (c)	1830.10 (c)	Istimewa	I	Listrik, Gas & Air Bersih	1.52	32773.79 (c)	32773.79 (c)	Istimewa
II	Perdagangan, Hotel dan restoran	1.23	-13925.07 (l)	50815.17 (c)	Baik Sekali	I	Perdagangan, Hotel dan restoran	1.21	27945.59 (c)	27945.59 (c)	Istimewa
I	Pengangkutan & Komunikasi	1.93	216994.27 (c)	68081.32 (c)	Istimewa	I	Pengangkutan & Komunikasi	1.89	380283.27 (c)	380283.27 (c)	Istimewa
II	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.45	- 129278.02 (l)	1011.44 (c)	Baik Sekali	I	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.49	8342.68 (c)	8342.68 (c)	Istimewa
	-	-	-	-	-	IV	Jasa-jasa	1.00	- 148710.30 (l)	- 148710.30 (l)	Lebih dari Cukup

Sumber BPS, PDRB Kota Padang dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi

kelima sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di kabupaten tersebut dan sisanya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekspor. Diantara kelima sektor-sektor tersebut sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi berada pada tingkatan tertinggi dalam pengklasifikasian secara tipologi sektoral. Sektor-sektor tersebut memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” dan berada pada peringkat I dalam tipologi sektoral.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor listrik, gas dan air bersih menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj-nya positif sebesar 82500,01 dan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan nilai rata-rata komponen Pj-nya pun positif yaitu sebesar 216994,27 yang berarti bahwa pertumbuhan kedua sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan rata-rata komponen Dj untuk kedua sektor tersebut yang sama-sama bernilai positif dengan masing-masing nilainya adalah 1830,10 dan 68081,32 artinya kedua sektor tersebut adalah sektor yang daya saingnya meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat didaerah tersebut dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. Sehingga apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya kedua sektor tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar.

Pengamatan saat desentralisasi tahun 2001-2007 menunjukkan pergerakan sektor perekonomian yang cukup baik untuk Kota Padang. Berdasarkan indeks rata-rata *LQ* yang diamati pada tahun tersebut, terlihat bahwa daerah ini mampu meningkatkan jumlah sektor basisnya yang semula hanya memiliki lima sektor basis ekonomi, kini meningkat menjadi enam sektor basis yaitu; sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas & air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Di antara keaman sektor tersebut terdapat empat

sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” dengan kategori I dalam tipologi sektoralnya yaitu sektor listrik, gas & air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan & komunikasi, dan terakhir adalah sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan sedangkan sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan berada pada tipologi IV dengan tingkat kepotensialan yang “lebih dari cukup” untuk dikembangkan.. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik keenam sektor berpotensi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor listrik, gas & air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, dan terakhir adalah sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan menunjukkan nilai rata-rata komponen P_j -nya positif masing-masing sebesar 32773,79, 27945,59, 380283,27, dan 8342,68 berarti bahwa pertumbuhan keempat sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan rata-rata komponen D_j untuk keempat sektor tersebut yang bernilai positif dengan masing-masing nilainya adalah 32773,79, 27945,59, 380283,27 dan 8342,68, artinya keempat sektor tersebut adalah sektor yang daya saingnya meningkat sehingga pertumbuhannya di daerah lebih cepat dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. Sehingga apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya kedua sektor tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar.

b. Kota Solok

Kota Solok terletak pada $0^{\circ}32' \text{ LS} - 00^{\circ}42' \text{ LS}$ dan $100^{\circ}32' \text{ BT} - 101^{\circ}41' \text{ BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $57,64 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1014 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kota Solok setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,58% menjadi 5,26%. Namun,

pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kota Solok masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat setelah desentralisasi yaitu menjadi 5,33% (data terlampir).

Kota Solok tergolong daerah yang mampu memanfaatkan sektor-sektor ekonomi yang ada pada daerahnya sehingga mampu dikembangkan lagi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sebelum adanya kebijakan desentralisasi, berdasarkan nilai indeks rata-rata *LQ* yang diperoleh dari tahun 1994 - 2000 menunjukkan bahwa kota ini mampu mengelola sektor perekonomiannya dengan baik. Dari sembilan sektor penyusun PDRB di Kota Solok, lima diantaranya merupakan sektor basis yaitu ; sektor listrik, gas & air bersih, , sektor bangunan, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan terakhir adalah sektor jasa-jasa artinya kelima sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di kabupaten tersebut dan sisanya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekspor.

Diantara kelima sektor-sektor tersebut sektor jasa-jasa berada pada tingkatan tertinggi dalam pengklasifikasian secara tipologi sektoral. Sektor tersebut memiliki tingkat kepotensialan yang istimewa dan berada pada peringkat I dalam tipologi sektoral. Berdasarkan analisis *Shift Share* untuk sektor jasa-jasa menunjukkan nilai rata-rata komponen *Pj* dan *Dj*-nya positif sebesar 3747,18 dan 5598,05 berarti bahwa sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi dan memiliki daya saing yang meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibanding pertumbuhan sektor yang sama di provinsi.. Sehingga apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya sektor tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar.

Tabel 5.10 Tipologi Sektoral Kota Solok Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
III	Listrik, Gas & Air Bersih	3.08	6479.63 (c)	- 2824.43 (l)	Baik	I	Listrik, Gas & Air Bersih	2.49	2416.62 (c)	21345.71 (c)	Istimewa
II	Bangunan	2.43	- 17795.11 (l)	4225.74 (c)	Baik Sekali	I	Bangunan	2.55	99.00 (c)	307149.20 (c)	Istimewa
III	Pengangkutan & Komunikasi	1.75	8619.48 (c)	- 6583.17 (l)	Baik	I	Pengangkutan & Komunikasi	1.68	14703.05 (c)	288141.63 (c)	Istimewa
II	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.40	-5497.29 (l)	4576.22 (c)	Baik Sekali	I	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.50	366.78 (c)	137779.79 (c)	Istimewa
I	Jasa-jasa	1.46	3747.18 (c)	5598.09 (c)	Istimewa	II	Jasa-jasa	1.51	-9792.51 (l)	375080.74 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kota Solok dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

Kemudian bentuk pergerakan sektor ekonomi di Kota Solok setelah desentralisasi dilaksanakan dapat dilihat berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata indeks LQ dari tahun 2001-2007 dan disajikan pada table di bawah ini.

Kota Solok memiliki lima sektor basis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian daerah. Sektor-sektor tersebut masih sama dengan sebelum kebijakan desentralisasi di berlakukan, namun kita dapat memperoleh gambaran yang sangat baik dari pergerakan masing-masing sektornya. Semula dari lima sektor unggulan hanya satu sektor yang memiliki tingkat kepotensialan "istimewa" yaitu sektor jasa-jasa, kini menjadi empat sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang "istimewa" yaitu; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai rata-rata komponen P_j dan nilai rata-rata komponen D_j yang positif dengan nilai untuk masing-masing sektornya ialah 2416,62 dan 21345,71; 99,00 dan 307149,20; 14703,05 dan 288141,63; 366,78 dan 137779,79 artinya sektor tersebut mampu tumbuh lebih cepat di provinsi dan memiliki daya saing yang cukup tinggi didaerahnya, sehingga apabila semakin dikembangkan, sektor- sektor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto terletak pada $0^{\circ}33' LS - 00^{\circ}43' LS$ dan $100^{\circ}43' BT - 100^{\circ}50' BT$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $273,45 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 199 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kota Sawahlunto setelah adanya desentralisasi tidaklah sama dengan kabupaten atau kota yang sebelumnya yang telah dibahas karena pertumbuhan ekonomi rata-ratanya cenderung mengalami penurunan, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 0,94% menjadi 0,66%. Selain itu pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kota

Tabel 5.11 Tipologi Sektoral Kota Sawahlunto Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
IV	Pertambangan dan Penggalian	10.75	- (l)	- (l)	Lebih dari Cukup	II	Pertambangan dan Penggalian	8.16	- (l)	1971255.85 (c)	Baik Sekali
-	-	-	-	-	-	I	Bangunan	1.04	82.03 (c)	110415.00 (c)	Istimewa
-	-	-	-	-	-	I	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.01	281.71 (c)	112765.31 (c)	Istimewa
-	-	-	-	-	-	II	Jasa-jasa	1.47	- (l)	396057.74 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kota Sawahlunto dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

Sawahlunto masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat setelah desentralisasi yaitu menjadi 5,33% (data terlampir).

Kondisi Kota Sawahlunto sebelum adanya kebijakan desentralisasi, berdasarkan nilai indeks rata-rata LQ yang diperoleh dari tahun 1994-2000 menunjukkan bahwa kota ini kurang mampu mengelola sektor perekonomiannya lainnya dengan baik, karena daerah ini hanya terfokus untuk mengembangkan SDA yang memang paling berpotensi. Dari sembilan sektor penyusun PDRB di Kota Sawahlunto, hanya satu yang merupakan sektor basis yaitu, sektor pertambangan dan penggalian. Hasil analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 untuk sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan nilai rata-rata komponen P_j sebesar -9058,50 yang berarti bahwa daerah ini berspesialisasi dalam sektor yang tumbuh lambat di provinsi. Sedangkan dari hasil perhitungan rata-rata komponen D_j untuk sektor pertambangan dan penggalian menyimpulkan bahwa sektor ini memiliki daya saing yang menurun sehingga pertumbuhannya lebih lambat di banding pertumbuhan untuk sektor yang sama di provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen D_j yang negatif, yaitu sebesar -69457,03. Perhitungan analisis tipologi sektoral menunjukkan sektor ini termasuk dalam tipologi IV sehingga sektor ini adalah sektor yang tingkat kepotensialannya menunjukkan “lebih dari cukup” untuk dikembangkan.

Kemudian setelah kebijakan desentralisasi dilaksanakan, pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja sektor-sektor perekonomiannya. Terlihat berdasarkan nilai indeks rata-rata LQ yang diperoleh dari tahun 2001 - 2007 menunjukkan bahwa kota ini telah mampu mengelola sektor perekonomiannya lainnya dengan cukup baik dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Kini Kota Sawahlunto memiliki empat sektor basis yaitu; sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Dari keempat sektor yang menjadi basis dalam daerah

tersebut, dua sektor ekonomi diantaranya memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” dengan peringkat I dalam tipologi sektoralnya yaitu sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kedua sektor ini apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* tahun 2001-2007 sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ini memiliki nilai rata-rata Pj masing-masing sebesar 82,03 dan 281,71 dan nilai rata-rata masing-masing Dj sebesar 110415,60 dan 112765,31 yang bergerak positif sehingga kedua sektor tersebut berkembang lebih cepat ditingkat provinsi dan daya saingnya meningkat.

Sedangkan dua sektor basis lainnya yaitu; sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa berada pada peringkat tipologi II dengan tingkat kepotensialan sektor tergolong “baik sekali”, jika diamati dengan menggunakan analisis *Shift Share* selama tahun 2001-2007 nilai rata-rata komponen Pj untuk masing-masing sektornya adalah -29441,10 dan -10030,24 yang berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang lambat berkembang di provinsi. Sedangkan hasil perhitungan nilai rata-rata komponen Dj-nya, sektor- sektor tersebut adalah sektor yang memiliki daya saing yang cenderung meningkat sehingga pertumbuhannya di Kota Sawahlunto lebih cepat dibanding pertumbuhannya di provinsi untuk sektor yang sama. Hal ini ditunjukkan dengan besaran rata-rata komponen Dj yang positif, yaitu sebesar 1972155,85 dan 396057,24.

d. Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang terletak pada $0^{\circ}27' \text{ LS} - 00^{\circ}30' \text{ LS}$ dan $100^{\circ}20' \text{ BT} - 100^{\circ}27' \text{ BT}$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $23,00 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2357 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kota Padang Panjang setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,58% menjadi

5,23%. Namun, pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kota Padang Panjang masih lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Sumatera Barat setelah desentralisasi yaitu menjadi 5,33% (data terlampir).

Sebelum adanya kebijakan desentralisasi, berdasarkan nilai indeks rata-rata *LQ* yang diperoleh dari tahun 1994-2000 menunjukkan bahwa kota ini mampu mengelola sektor perekonomiannya dengan baik. Dari sembilan sektor penyusun PDRB di Kota Padang Panjang, lima diantaranya merupakan sektor basis yaitu; sektor listrik, gas & air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa artinya kelima sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di kota tersebut dan sisanya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekspor. Diantara kelima sektor-sektor tersebut sektor jasa-jasa berada pada tingkatan tertinggi dalam pengklasifikasian secara tipologi sektoral. Sektor-sektor tersebut memiliki tingkat kepotensialan yang "istimewa" dan berada pada peringkat I dalam tipologi sektoral.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk sektor jasa-jasa menunjukkan nilai rata-rata komponen *Pj*-nya positif sebesar 2950,86 yang berarti bahwa sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan rata-rata komponen *Dj* untuk sektor jasa-jasa yang bernilai positif dengan nilai adalah 5569,52 artinya sektor tersebut adalah sektor yang daya saingnya meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat di daerah jika dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di provinsi. Sehingga apabila dikembangkan lebih baik lagi tentunya kedua sektor tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang besar bagi masyarakat sekitar.

Kemudian pengolahan data saat desentralisasi tahun 2001-2007 menunjukkan pergerakan sektor perekonomian yang sangat baik untuk Kota Padang Panjang..

Tabel 5.12 Tipologi Sektoral Kota Padang Panjang Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
III	Listrik, Gas & Air Bersih	2.53	4311.24 (c)	-1441.95 (l)	Baik	I	Listrik, Gas & Air Bersih	2.15	1636.88 (c)	14369.83 (c)	Istimewa
II	Bangunan	1.27	7396.20 (l)	1935.69 (c)	Baik Sekali	I	Bangunan	1.44	63.79 (c)	132987.46 (c)	Istimewa
III	Pengangkutan & Komunikasi	1.77	6916.82 (c)	-5700.91 (l)	Baik	I	Pengangkutan & Komunikasi	1.61	11156.05 (c)	232474.35 (c)	Istimewa
IV	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.77	5481.01 (l)	-191.61 (l)	Lebih dari Cukup	I	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.87	360.33 (c)	145096.94 (c)	Istimewa
I	Jasa-jasa	1.45	2950.86 (c)	5569.52 (c)	Istimewa	II	Jasa-jasa	1.56	-7953.96 (l)	303407.79 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kota Padang Panjang dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

Berdasarkan indeks rata-rata LQ yang diamati pada tahun tersebut, terlihat bahwa walaupun daerah ini memiliki sektor basis dengan jumlahnya yang sama dengan pengamatan sebelumnya yaitu terdapat lima sektor unggulan. Namun, diantara kelima sektor tersebut terdapat empat sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang "istimewa" dan menduduki peringkat teratas dalam pengklasifikasian secara tipologi sehingga sangat baik untuk dikembangkan karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sektor –sektor tersebut yaitu; sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* untuk masing-masing sektor menunjukkan nilai rata-rata komponen P_j positif sebesar: 1636,88; 63,79; 11156,05; 360,33 yang berarti bahwa pertumbuhan sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. Begitu juga hasil perhitungan nilai rata-rata komponen D_j untuk masing-masing sektor yang bernilai positif dengan nilai sebesar: 14369,83; 13298,46; 232474,35; 145096,94 artinya sektor tersebut adalah sektor yang memiliki daya saing yang meningkat di daerahnya sehingga pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di provinsi.

e. Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak pada $01^{\circ}16' LS - 00^{\circ}19'LS$ dan $100^{\circ}21'BT - 100^{\circ}25'BT$ dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $25,24 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 4202 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kota Bukittinggi setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 4,00% menjadi 5,56%. Selain itu pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kota Bukittinggi tergolong lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 5,33% (data terlampir).

Tabel 5.13 Tipologi Sektoral Kota Bukittinggi Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
III	Listrik, Gas & Air Bersih	3.09	12520.34 (c)	4842.09 (l)	Baik	I	Listrik, Gas & Air Bersih	2.14	4151.02 (c)	38782.84 (c)	Istimewa
I	Pengangkutan & Komunikasi	2.06	19272.86 (c)	863.73 (c)	Istimewa	I	Perdagangan, Hotel dan restoran	1.08	1943.87 (c)	521736.78 (c)	Istimewa
II	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.87	- 13918.75 (l)	9211.90 (c)	Baik Sekali	I	Pengangkutan & Komunikasi	1.83	30928.11 (c)	666164.92 (c)	Istimewa
I	Jasa-jasa	1.56	7571.16 (c)	2008.03 (c)	Istimewa	I	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.93	918.19 (c)	340171.57 (c)	Istimewa
-	-	-	-	-		II	Jasa-jasa	1.59	- 19896.44 (l)	780008.93 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kota Bukittinggi dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

Sebelum desentralisasi ekonomi terjadi, Kota Bukittinggi memiliki empat sektor basis ekonomi yang diperoleh berdasarkan nilai rata-rata indeks *LQ* tahun 1994-2000 yaitu; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Diantara keempat sektor-sektor yang potensial tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa dalam pengklasifikasian tipologi sektoral berada pada urutan I dengan kategori tingkat kepotensialan “istimewa”, berdasarkan analisis *Shift Share* selama tahun 1994-2000 nilai rata-rata komponen *Pj* untuk sektor pengangkutan dan sektor jasa-jasa menunjukkan nilai sebesar 19272,86 dan 7571,16 yang berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang tumbuh cepat di provinsi dan nilai rata-rata komponen *Dj* untuk sektor pengangkutan dan sektor jasa-jasa adalah 863,73 dan 2008,03 artinya sektor ini memiliki daya saing yang cenderung meningkat di daerah sehingga pertumbuhannya untuk sektor yang sama lebih cepat tumbuh dibandingkan di provinsi.

Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berdasarkan hasil analisis *Shift Share*-nya dengan melihat nilai rata-rata komponen *Pj* yang diperoleh untuk masing-masing sektor adalah 12520,34 dan -13918,75 artinya bahwa sektor listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh lebih cepat di provinsi sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan karena nilai rata-rata *Pj* yang diperoleh menunjukkan angka negatif maka sektor tersebut tumbuh lebih cepat di provinsi. dan nilai rata-rata komponen *Dj* untuk sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan adalah -4842,09 dan 9211,90 artinya sektor listrik, gas dan air bersih memiliki daya saing yang cenderung menurun di daerah sehingga pertumbuhannya untuk sektor yang sama lebih lambat tumbuh dibandingkan di provinsi sedangkan untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki daya saing

yang cenderung meningkat di daerah sehingga pertumbuhannya untuk sektor yang sama lebih cepat tumbuh dibandingkan di provinsi. Berdasarkan perhitungan analisis tipologi sektoral menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih termasuk dalam tipologi III sehingga sektor ini adalah sektor yang tingkat kepotensialannya menunjukkan kategori “baik” untuk dikembangkan sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan bersih termasuk dalam tipologi II sehingga sektor ini adalah sektor yang tingkat kepotensialannya menunjukkan kategori “baik sekali”.

Kemudian bentuk pergerakan sektor ekonomi di Kota Bukittinggi setelah desentralisasi dilaksanakan dapat dilihat berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata indeks LQ dari tahun 2001-2007 dan disajikan pada table di atas. Kota Bukittinggi memiliki lima sektor basis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian daerah. Sektor-sektor basis tersebut telah meningkat jumlahnya dari sebelum kebijakan desentralisasi di berlakukan, namun kita dapat memperoleh gambaran yang sangat baik dari pergerakan masing-masing sektornya.

Semula dari empat sektor unggulan hanya dua sektor yang memiliki tingkat kepotensialan “istimewa” yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa, kini menjadi empat sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “istimewa” yaitu; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai rata-rata komponen P_j dan nilai rata-rata komponen D_j yang positif dengan nilai untuk masing-masing sektornya ialah 4151,02 dan 3878,84; 1943,87 dan 521736,78; 30928,11 dan 666164,92; 918,19 dan 340171,57 artinya sektor tersebut mampu tumbuh lebih cepat di provinsi dan memiliki daya saing yang cukup tinggi didaerahnya dan tumbuh lebih cepat pada sektor yang sam aditingkat provinsi, sehingga

apabila semakin dikembangkan, sektor- sektor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terletak pada $01^{\circ}10'$ LS - $00^{\circ}17'$ LS dan $100^{\circ}35'$ BT - $100^{\circ}45'$ BT dengan luas wilayah yang dimilikinya sebesar $80,43 \text{ KM}^2$ dan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1318 orang per KM^2 . Kondisi perekonomian Kota Payakumbuh setelah adanya desentralisasi mengalami kemajuan yang cukup baik, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang semula sebesar 3,86% menjadi 5,38%. Selain itu pertumbuhan ekonomi rata-rata yang dicapai oleh Kota Payakumbuh tergolong lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di provinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 5,33% (data terlampir).

Berdasarkan nilai indeks rata-rata *LQ* yang diperoleh dari tahun 1994 - 2000 menunjukkan bahwa kota ini mampu mengelola sektor perekonomiannya dengan baik. Dari sembilan sektor penyusun PDRB di Kota Payakumbuh, enam diantaranya merupakan sektor basis yaitu ; sektor listrik, gas & air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor perdagangan, hotel da restoran, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa artinya keenam sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di kota tersebut dan sisanya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan eksport.. Namun berdasarkan hasil analisis *Shift Share*-nya dan pengklasifikasiannya dalam tipologi sektoral, dari keenam sektor basis tersebut hanya terdapat satu sektor saja yang memiliki tingkat kepotensialan "istimewa" yaitu sektor Jasa-jasa. Kemudian sekotr-sektor yang berada pada peringkat II dalam tipologi adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki tingkat kepotensialan "sangat baik" dan sektor berikutnya berada pada tingkat III dalam tipologi

Tabel 5.14 Tipologi Sektoral Kota Payakumbuh Sebelum dan Setelah Desentralisasi

Sebelum Desentralisasi						Setelah Desentralisasi					
Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan	Tipe- logi	Lapangan Usaha	Sektor Basis			Tingkat Ke- potensialan
		LQ	Pj	Dj				LQ	Pj	Dj	
III	Listrik, Gas & Air Bersih	1.45	5016.16 (c)	-1178.17 (l)	Baik	I	Listrik, Gas & Air Bersih	1.25	1935.11 (c)	13528.52 (c)	Istimewa
II	Bangunan	1.13	13342.74 (l)	407464.42 (c)	Baik Sekali	I	Bangunan	1.47	209.92 (c)	191477.81 (c)	Istimewa
II	Perdagangan, Hotel dan restoran	1.04	-831.53 (l)	5528.93 (c)	Baik Sekali	I	Perdagangan, Hotel dan restoran	1.02	1671.69 (c)	460164.65 (c)	Istimewa
III	Pengangkutan & Komunikasi	1.74	13713.00 (c)	-14197.07 (l)	Baik	I	Pengangkutan & Komunikasi	1.56	22373.50 (c)	488103.58 (c)	Istimewa
II	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.87	- 11734.27 (l)	8235.36 (c)	Baik Sekali	I	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.90	749.70 (c)	275018.00 (c)	Istimewa
I	Jasa-jasa	1.45	5965.12 (c)	5967.45 (c)	Istimewa	II	Jasa-jasa	1.49	15733.25 (l)	619380.02 (c)	Baik Sekali

Sumber BPS, PDRB Kota Payakumbuh dan Propinsi Sumatera Barat (diolah)

Keterangan (c) : Sektor tumbuh lebih cepat di tingkat propinsi

(l) : Sektor tumbuh lebih lambat di tingkat propinsi.

yang memiliki tingkat kepotensialan “ baik ”. sehingga apabila sektor-sektor yang menjadi basis dalam daerah tersebut mampu dikembangkan lebih baik tentunya akan memberikan hasil yang sangat besar bagi masyarakat di Kota Payakumbuh.

Kemudian bentuk pergerakan sektor ekonomi di Kota Payakumbuh setelah desentralisasi dilaksanakan dapat dilihat berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan rata-rata indeks LQ dari tahun 2001-2007 dan disajikan pada table di atas. Kota Payakumbuh memiliki enam sektor basis yang menjadi kekuatan dalam pembangunan perekonomian daerah. Semula dari enam sektor unggulan hanya satu sektor yang memiliki tingkat kepotensialan “ istimewa ” yaitu sektor jasa-jasa, kini setelah desentralisasi menjadi lima sektor yang memiliki tingkat kepotensialan yang “ istimewa ” yaitu; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan analisis *Shift Share* sektor-sektor tersebut memiliki nilai rata-rata komponen P_j dan nilai rata-rata komponen D_j yang positif dengan nilai untuk masing-masing sektornya ialah 1935,11 dan 13528,52; 209,92 dan 191477,81; 1671,69 dan 460164,65; 22373,50 dan 488103,58; 749,70 dan 275018,00 artinya sektor tersebut mampu tumbuh lebih cepat di provinsi dan memiliki daya saing yang cukup tinggi didaerahnya dan tumbuh lebih cepat pada sektor yang sama ditingkat provinsi, sehingga apabila semakin dikembangkan, sektor- sektor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Analisis Tipologi Klassen Sebelum dan Setelah Desentralisasi

5.2.1 Tipologi Klassen Sebelum Desentralisasi

Pembahasan pada bagian ini untuk memperjelas bagaimana gambaran kondisi perekonomian di kabupaten / kota sebelum dan setelah berlangsungnya kebijakan desentralisasi. Dalam analisis ini, digabungkan dua pendekatan secara bersamaan, yakni

tipologi klassen dan tipologi sektoralnya. Dengan menggunakan tipologi klassen, dapat dilihat bagaimana perkembangan pola perekonomian secara provinsi yang diwakili oleh masing-masing daerah. Sedangkan dengan pendekatan tipologi sektoral dapat dilihat secara terperinci lagi, bagaimana kondisi ekonomi masing-masing daerah berdasarkan pemanfaatan sektor-sektor unggulan.

Tabel 5.15 Klasifikasi Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat Menurut Tipologi Klassen

Daerah Maju dan Tumbuh Pesat					Daerah Maju Tapi Tertekan				
Daerah	Sektor Basisnya				Daerah	Sektor Basisnya			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
Kab. Sawahlunto	2	5	1	9	Kab. Pdg Pariaman	3, 4	1	9	2, 5
Kota Padang	4, 7	6, 8	3	-	Kab. Agam	-	1	3, 9	2
Kota Solok	9	5, 8	4, 7	-					
Kota Pdg. Panjang	9	5	4, 7	8					
Kota Bukittinggi	9	4, 8	7	8					
Kota Payakumbuh	9	5, 6, 8	7	-					
Daerah Yang Potensial Berkembang					Daerah Tertinggal				
Daerah	Sektor Basisnya				Daerah	Sektor Basisnya			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
Kota Sawahlunto	-	-	-	2	Kab. Pesisir Selatan	-	6	9	1
Kota 50 Kota	-	2, 6	9	1	Kab. Tanah Datar	-	5	-	1
					Kab. Solok	-	-	1	-
					Kab. Pasaman	-	1	9	-

Keterangan: 1 = Sektor Pertanian, 2 = sektor Pertambangan dan Penggalian, 3 = Sektor Industri Pengolahan, 4 = Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, 5 = Sektor Bangunan, 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, 7 = Sektor Pengangkutan & Komunikasi, 8 = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, 9 = Sektor Jasa-jasa.

Tingkat kepotensialan: I = Istimewa, II = Baik Sekali, III = Baik, IV = Lebih dari Cukup

Berdasarkan table diatas daerah yang berada pada kuadran I didominasi oleh sektor-sektor yang bergerak di bidang jasa. Tiap-tiap yang berada pada daerah kuadran I memiliki empat bahkan lebih sektor unggulan yang menjadi basis dalam perekonomiannya. Artinya pada daerah tersebut memang berlangsung kegiatan perekonomian yang sangat aktif dan cepat, karena memang didukung oleh berbagai kelengkapan fasilitas serta sarana penunjang yang memadai.

5.2.2 Tipologi Klassen Setelah Desentralisasi

Setelah adanya kebijakan desentralisasi, masing-masing daerah pun terkonsentrasi pada kuadran III dan kuadran IV. Sedangkan daerah yang berada pada kuadran I menjadi berkurang. Hal itu dapat disebabkan karena pengaruh kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing daerah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pemberian kekuasaan pada pemerintah daerah dalam hal mengelola daerahnya kurangnya maksimal karena adanya keterbatasan yang terdapat pada masing-masing daerah.

Tabel 5. 16 Klasifikasi Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat Menurut Tipologi Klassen

Daerah Maju dan Tumbuh Pesat					Daerah Maju Tapi Tertekan				
Daerah	Sektor Basisnya				Daerah	Sektor Basisnya			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
Kota Padang	4, 6, 7, 8	-	-	3, 9	Kab. Pdg Pariaman	1, 4, 5	2, 3, 9	-	-
Kota Bukittinggi	4, 5, 7, 8	-	-	9	Kab. Agam	1	2	3	-
					Kota Payakumbuh	4, 5, 6, 7, 8	9	-	-
Daerah Yang Potensial Berkembang					Daerah Tertinggal				
Daerah	Sektor Basisnya				Daerah	Sektor Basisnya			
	I	II	III	IV		I	II	III	IV
Kab. 50 Kota	1, 6	2	-	-	Kab. Pesisir Selatan	1	6, 9	-	-
Kota Solok	4, 5, 7, 8	9	-	-	Kab. Solok	1, 5	2	-	-
Kota Sawahlunto	5, 8	2, 9	-	-	Kab. Sawahlunto	1, 5	2, 9	-	-
Kota Pdg. Panjang	4, 5, 6, 8	9	-	-	Kab. Pasaman	1	9	-	-
					Kab. Tanah Datar	1, 5	9	-	-

Keterangan: 1 = Sektor Pertanian, 2 = sektor Pertambangan dan Penggalian, 3 = Sektor Industri Pengolahan, 4 = Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, 5 = Sektor Bangunan, 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, 7 = Sektor Pengangkutan & Komunikasi, 8 = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, 9 = Sektor Jasa-jasa.

Tingkat kepotensialan; I = Istimewa, II = Baik Sekali, III = Baik, IV = Lebih dari Cukup

Banyaknya daerah tertinggal yang terjadi setelah adanya desentralisasi membuktikan bahwa peran pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut kurangnya maksimal. Sehingga untuk kedepannya, dibutuhkan suatu upaya dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan Tipologi Klassen serta penggabungan alat analisa lainnya yaitu tipologi sektoral, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kondisi perekonomian di kabupaten / kota di Sumatera Barat pada sebelum dan setelah adanya desentralisasi ekonomi, yaitu;

1. Tabel berikut ini akan melihat bagaimana bentuk daerah yang maju dan daerah tertinggal di kabupaten / kota sebelum dan setelah desentralisasi.

Tabel 6.1 Pengelompokan Daerah Maju Dan Daerah Tertinggal Di Sumatera Barat

No.	Indikator	Sebelum Desentralisasi		Setelah Desentralisasi	
		Daerah Maju	Daerah tertinggal	Daerah Maju	Daerah tertinggal
1	Jumlah daerah	6 daerah	4 daerah	2 daerah	5 daerah
2	Hubungan g^* dengan g^{**}	$g^* > g^{**}$	$g^* < g^{**}$	$g^* > g^{**}$	$g^* < g^{**}$
3	Hubungan Y^* dengan Y^{**}	$Y^* > Y^{**}$	$Y^* > Y^{**}$	$Y^* > Y^{**}$	$Y^* > Y^{**}$
4	Sektor Basis yang dominan	9, 8, 5, 7, 4	1	4, 7, 8, 9	1, 5, 9
5	Jml rata-rata sektor basis	5 sektor basis	2 sektor basis	5 sektor basis	3 sektor basis
6	Tingkat Kepotensialan Sektor basis	II dan III	II dan III	I	I dan II

Keterangan:

- ♦ 1 = Sektor Pertanian, 2 = Sektor Pertambangan dan Penggalan, 3 = Sektor Industri Pengolahan, 4 = Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, 5 = Sektor Bangunan, 6 = Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran, 7 = Sektor Pengangkutan & Komunikasi, 8 = Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, 9 = Sektor Jasa-jasa.
- ♦ Tingkat kepotensialan; I = Istimewa, II = Baik Sekali, III = Baik, IV = Lebih dari Cukup
- ♦ g^* = rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah dan g^{**} = rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat
- ♦ Y^* = rata-rata tingkat PDRB perkapita daerah dan Y^{**} = rata-rata tingkat PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat.

a. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya ketimpangan perekonomian antar daerah yang terjadi setelah terciptanya kebijakan desentralisasi. Ketimpangan tersebut sebgaiian besar terjadi karena perbedaan jumlah sektor basis dan bentuk sektor basis yang dikelola. Semakin banyaknya sektor basis yang potensial untuk dikembangkan, maka daerah tersebut akan semakin maju. Namun, untuk pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal pada daerah terbelakang, mereka tidak mampu memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya dengan baik sehingga menimbulkan ketidakmampuan daerah untuk bersaing.

b. Perbedaan sumberdaya alam (sektor primer) tidaklah selalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat menjadi lebih baik untuk studi kasus di Sumatera Barat, karena perekonimian pada daerah maju hanya dipengaruhi oleh sektor pendukung saja seperti sektor yang bergerak di bidang jasa, keuangan, transportasi.

2. Setelah adanya kebijakan desentralisasi, dapat terlihat bahwa daerah berusaha memaksimalkan sektor – sektor unggulan yang berpotensi baik untuk dikembangkan yang ada pada daerahnya. Hal tersebut terlihat dalam table tipologi sektoralnya, bahwa sebelum desentralisasi tingkat kepotensialan untuk masing-masing sektor basis berada pada tingkat III dan IV yang mendominasi. Sedangkan setelah desentralisasi tingkat kepotensialan sektor basisnya untuk masing-masing kabupaten / kota di Sumatera Barat berhasil ditingkatkan, terlihat bahwa sektor-sektor basis tersebut berada pada tingkat I dan II.

6.2 Saran

1. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak terutama masyarakat di daerah guna meningkatkan kembali sektor – sektor perekonomian yang dulunya menjadi basis ekonomi daerah.
2. Penyebab perbedaan dalam pembangunan wilayah yang terjadi di Sumatera Barat adalah jumlah sektor yang menjadi basis dalam perekonomian daerah tersebut. Semakin banyak sektor basis yang terdapat pada suatu daerah dapat mengakibatkan daerah tersebut berkembang dan semakin maju. Oleh karena itu, diharapkan peran serta pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan sektor-sektor lainnya, agar sektor basis yang dihasilkan semakin meningkat.
3. Daerah yang termasuk pada kategori daerah maju di Sumatera Barat rata-rata tidak memiliki sektor basis yang bersifat primer (kekayaan sumberdaya alam). Daerah tersebut menjadi maju karena adanya sektor-sektor penunjang seperti sektor jasa-jasa, industri, keuangan, yang pertumbuhannya cepat. Sehingga untuk memajukan daerah yang tertinggal, pemerintah daerah harus melakukan inovasi dalam menjembatani hubungan antara sektor primer yang menjadi basis daerah dengan sektor penunjang. Seperti melakukan kegiatan pengolahan hasil sektor pertanian dan memadukannya dengan sektor industri dalam jumlah yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, Takahiro, 2002, "Decomposing Regional Income Inequality in China and Indonesia Using Two-Stage Nested Theil Decomposition Method." www.proquest.com/pqdweb
- Akai, Nobuo, 2005, "Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence from State-level Cross-sectional Data for the United States". www.proquest.com/pqdweb
- BAPPENAS, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia, 2007, "Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah".
- Badan Pusat Statistik, 2003, "Produk Domestik Bruto Kota Padang", Padang, BPS
- Boediono, 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Brodjonegoro, Bambang P.S, 2001. "The impact of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Regional Economies: A Simultaneous Econometrics Approach." Vanersborg, Sweden: Udavella Symposium 2001: Regional Economies in Transitions.
- Fatmasari, Wulan, 2007, "Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang (Pendekatan Model Basis Ekonomi)" Skripsi S-1, Universitas Negeri Semarang.
- Irawan, Toni dan Hartono, Djoni, 2008, "Decentralization Policy and Equality: A Theil Analysis of Indonesian Income Inequality".
- Islam, Yanatul dan Khan, Habibullah, 1986. "Spatial Patterns of Inequality and Poverty in Indonesia." Bulletin of Indonesia Economics Studies, www.proquest.com/pqdweb

- Kuncoro, Mudrajad dan Hairul Aswandi, 2002, "Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Lemhamnas. 1997. "Pembangunan Nasional". Jakarta, PT Balai Pustaka
- Lincoln, Arsyad, 1999, "Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah", Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Nasjid, Majidi, 1997. "Anggaran Pembangunan dan ketimpangan Pembangunan Antarwilayah." *Prisma*, 3 Maret.
- Parhah, Siti, 2006, "Pengaruh Variable Makroekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia", Tesis S-2 Program Pascasarjana FE, Universitas Indonesia.
- Prayitno, Joko, 2009, "Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta", Tesis S-2 Program Pascasarjana, Unand, tidak dipublikasikan.
- Rahardjo, Adisasmita. 2005. "Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah". Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ramahdani, lili 2009, "Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan di Sumatra Barat", Skripsi S-1, Universitas Andalas, tidak dipublikasikan.
- Sakamoto, Hiroshi, 2006 "Regional Disparity in Indonesia: An Analysis using the Distribution Approach" www.proquest.com/pqdweb
- Sjafrizal, 1997, "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", PRISMA 3.
- _____, 2008, "Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi", Cetakan Pertama. Sumatera Barat, Baduose Media

- Sofwani, Ahmad, 2002 "Mobilisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rangka Pembangunan Daerah (Studi di Kabupaten Muara Enim)". Jurnal Ekonomi
- Sukirno, Sadono, 1985, "Ekonomi Pembangunan", Jakarta.: LPFE UI
- Sutarno dan Kuncoro, Mudrajat, 2003, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000", Jurnal ekonomi pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang.
- Tarigan, Robinson. 2004. "Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi". Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Todaro, Michael, P., 2000, "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", Edisi Ketujuh (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Jakarta: Erlangga.
- Wheeler, H. Christopher, 2006, "Urban Decentralization and Income Inequality: Is Sprawl Associated with Rising Income Segregation Across Neighborhoods". www.proquest.com/pqdweb
- Wibowo, Puji, 2008, "Mencermati Dampak Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah". Jurnal ekonomi
- Wijayanto, Dani Yus, 2005, "Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Daerah di Kabupaten Semarang 1999-2003" Skripsi S-1 Universitas Negeri Semarang.

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

Nilai Skripsi

Nama : Nila Silvia
No. BP : 06151109
Nilai :

Pembimbing Skripsi,

Drs. Zulkarnaini Ras, M.Si

LAMPIRAN

Lampiran 1

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Sumbang													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	4,419,453.02	4,795,647.87	5,138,262.96	5,240,925.20	5,250,164.69	5,342,934.64	5,385,595.71	5,648,004.31	6,091,915.61	6,557,510.72	6,937,172.92	7,293,205.65	7,658,394.83	8,038,919.12
Pertambangan dan Penggalian	762,871.58	913,130.25	971,712.61	1,075,826.87	963,545.12	868,087.69	873,887.57	868,572.82	884,878.74	894,245.03	923,379.06	951,882.62	980,826.77	1,028,828.26
Industri Pengolahan	2,397,936.98	2,665,572.38	3,030,302.95	3,236,601.95	2,966,775.89	3,004,184.44	3,218,470.01	3,318,632.53	3,404,309.81	3,472,186.00	3,629,455.72	3,808,287.01	3,978,641.07	4,209,069.40
Listrik, Gas & Air Bersih	69,670.84	82,553.43	110,365.97	146,027.65	159,860.87	183,267.40	210,962.36	243,639.82	271,084.90	284,293.97	301,070.70	338,722.91	368,981.69	394,432.98
Bangunan	1,423,878.22	1,491,646.84	1,722,724.42	1,803,877.56	1,167,202.28	1,085,264.51	1,131,101.81	1,157,117.15	1,194,839.17	1,278,358.43	1,375,769.34	1,440,337.58	1,544,889.64	1,627,195.26
Perdagangan, Hotel dan restoran	3,430,116.23	3,669,962.28	3,945,152.33	4,101,593.03	3,928,311.89	3,975,370.31	4,147,024.46	4,332,173.03	4,543,977.61	4,755,166.34	5,006,640.26	5,305,757.21	5,662,879.36	6,056,682.55
Pengangkutan & Komunikasi	1,930,531.81	2,157,872.95	2,343,776.99	2,591,283.29	2,382,787.91	2,506,118.01	2,650,332.56	2,749,038.34	2,928,943.45	3,165,005.33	3,419,244.73	3,754,819.81	4,140,569.92	4,526,737.30
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,186,336.31	1,230,554.22	1,272,930.65	1,309,693.25	1,108,096.79	1,112,710.48	1,164,508.32	1,204,302.67	1,230,509.41	1,294,725.54	1,376,937.68	1,464,102.75	1,579,347.52	1,692,546.42
Jasa-jasa	3,218,219.28	3,402,969.51	3,601,818.67	3,769,024.60	3,857,998.59	3,964,537.44	4,107,731.25	4,205,893.26	4,289,729.05	4,445,290.27	4,608,466.14	4,802,364.99	5,035,414.31	5,338,557.30
PDRB	18,839,014.27	20,409,909.73	22,137,047.53	23,274,853.41	21,784,744.02	22,042,474.92	22,889,614.05	23,727,373.93	24,840,187.75	26,146,781.63	27,578,136.55	29,159,480.53	30,949,945.11	32,912,968.59

Lampiran 2

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Pessel													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	395,766.05	421,217.05	451,261.91	466,626.59	438,594.50	444,347.06	434,123.92	449,916.93	468,516.74	489,732.55	512,450.80	531,874.70	554,751.42	578,800.87
Pertambangan dan Penggalian	18,128.99	19,928.82	21,352.29	22,848.88	19,843.94	18,614.61	19,651.06	20,576.63	21,568.42	22,569.19	23,672.99	24,902.31	26,276.29	28,082.15
Industri Pengolahan	99,294.34	107,330.06	119,000.68	127,692.90	142,927.92	146,150.90	156,400.26	161,889.89	172,898.40	182,942.62	195,272.95	207,531.87	221,041.40	234,965.32
Listrik, Gas & Air Bersih	2,692.80	3,324.41	3,762.35	4,526.00	4,734.31	5,561.62	6,214.95	6,840.05	7,553.93	8,374.51	8,949.34	9,724.75	10,554.40	11,488.50
Bangunan	62,370.22	66,857.27	71,494.61	76,061.80	49,227.85	47,956.07	50,567.99	53,015.48	55,614.90	57,451.78	59,904.97	63,860.12	68,121.82	72,821.82
Perdagangan, Hotel dan restoran	233,398.97	248,867.11	269,144.72	283,248.25	272,260.48	276,935.83	288,533.42	299,601.29	312,717.78	326,510.69	342,361.07	360,141.53	379,848.84	400,983.31
Pengangkutan & Komunikasi	30,669.86	33,481.87	37,664.45	39,427.30	32,746.40	32,501.35	34,654.16	35,869.71	37,664.57	39,577.97	41,791.76	44,001.19	46,801.74	49,899.70
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	58,737.39	62,468.56	65,009.75	65,405.81	55,378.21	52,014.84	54,217.04	56,320.91	57,323.20	59,489.51	62,095.58	64,921.68	68,013.03	71,804.40
Jasa-jasa	217,827.05	230,943.53	240,823.74	247,757.58	253,586.77	261,087.28	270,424.43	275,442.22	281,936.33	290,756.30	300,334.40	318,785.25	335,160.73	352,490.20
PDRB	1,118,885.67	1,194,418.68	1,279,514.50	1,333,595.09	1,269,300.37	1,285,169.58	1,314,787.23	1,359,473.11	1,415,794.27	1,477,405.12	1,546,833.86	1,625,743.40	1,710,569.67	1,801,336.27

Lampiran 3

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Solok													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	442,524.21	462,894.42	491,314.94	506,106.05	515,758.89	531,094.65	531,287.38	552,800.61	582,845.09	614,842.87	649,629.21	686,991.28	726,116.64	768,356.70
Pertambangan dan Penggalan	27,897.20	33,579.73	40,760.90	46,106.07	42,142.67	41,170.61	43,069.75	44,515.38	45,736.51	47,244.37	50,773.52	54,693.24	58,871.80	65,029.79
Industri Pengolahan	70,021.03	78,869.71	86,783.15	92,938.73	84,805.10	86,328.69	91,340.36	95,426.10	99,214.51	103,868.67	109,394.48	117,664.70	125,642.37	133,846.81
Listrik, Gas & Air Bersih	2,628.87	2,878.34	3,510.19	3,878.86	4,294.96	4,398.85	4,555.31	4,910.43	5,108.28	5,408.59	5,716.63	6,148.66	6,665.39	7,210.30
Bangunan	69,970.53	72,856.03	78,308.53	82,354.37	62,964.06	61,988.29	65,089.81	68,047.37	70,918.00	75,563.58	82,363.25	88,350.62	95,082.94	101,767.27
Perdagangan, Hotel dan restoran	157,641.39	172,902.62	183,407.72	189,856.49	167,873.54	169,678.06	176,855.52	183,985.60	191,674.71	200,958.84	211,572.54	224,780.62	240,071.32	256,868.34
Pengangkutan & Komunikasi	86,315.81	98,577.74	112,656.22	121,792.23	114,603.67	116,706.17	122,281.46	126,279.86	132,090.97	138,064.86	147,293.07	157,229.46	167,917.31	179,883.22
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	29,955.65	31,922.88	33,832.16	35,640.91	31,241.11	26,131.92	26,925.96	27,722.01	28,550.38	29,845.88	30,883.74	32,138.98	34,049.08	36,795.21
Jasa-jasa	157,445.87	166,005.29	177,325.41	187,606.42	195,263.49	199,952.62	206,068.79	211,536.83	216,226.80	223,348.78	231,784.45	240,663.85	251,079.65	262,103.36
PDRB	1,044,400.56	1,120,486.75	1,207,899.23	1,266,280.12	1,218,947.49	1,237,449.87	1,267,474.34	1,315,224.19	1,372,365.25	1,439,146.44	1,519,410.89	1,608,661.41	1,705,496.50	1,811,861.00

Lampiran 4

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	187,040.81	194,444.18	206,307.54	213,520.76	216,409.64	219,421.38	227,982.56	233,911.02	246,750.48	266,092.42	283,794.24	293,014.72	302,901.00	306,011.88
Pertambangan dan Penggalian	76,841.35	86,183.89	97,053.51	107,140.71	128,922.44	130,769.54	131,171.34	143,073.33	154,087.58	145,333.80	151,032.52	167,425.21	173,796.26	194,172.52
Industri Pengolahan	30,948.82	33,740.56	36,168.05	38,478.91	36,808.26	37,865.43	39,298.51	40,151.29	40,588.94	43,698.05	48,129.03	51,755.00	55,106.48	59,024.55
Listrik, Gas & Air Bersih	2,803.09	3,170.88	3,515.56	4,162.79	4,652.73	5,413.02	6,128.13	6,756.67	7,184.46	7,444.79	7,965.58	9,302.66	12,790.24	14,215.94
Bangunan	87,806.73	103,066.47	108,717.24	113,224.98	74,381.14	73,472.48	76,386.25	77,784.12	78,064.14	89,734.73	96,931.46	103,435.56	113,653.96	117,135.08
Perdagangan, Hotel dan restoran	84,503.39	91,381.48	98,857.82	103,407.78	92,066.87	93,878.33	97,108.44	100,539.14	104,062.72	108,883.70	113,752.57	117,167.44	124,033.19	130,404.07
Pengangkutan & Komunikasi	30,809.50	36,323.48	43,901.00	48,114.97	47,756.98	48,582.99	51,275.86	52,272.98	54,749.64	59,683.01	63,370.89	66,609.34	72,740.80	77,911.98
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	29,128.43	29,309.35	30,270.40	32,433.41	28,831.85	28,457.45	30,434.19	31,040.35	31,835.56	33,063.14	36,703.14	38,209.65	39,533.09	41,666.12
Jasa-jasa	128,897.68	127,316.33	133,124.56	133,931.55	136,369.97	139,860.75	146,334.78	153,514.27	160,675.88	165,147.74	169,861.04	176,321.67	189,579.37	204,465.04
PDRB	658,779.79	704,936.63	757,915.68	794,415.87	766,199.89	777,721.36	806,120.06	839,043.17	877,999.40	919,081.38	971,540.47	1,023,241.25	1,084,134.39	1,145,007.18

Lampiran 5

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Tanah Datar													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	523,887.72	542,636.38	568,799.60	591,590.41	570,065.71	574,621.31	596,013.50	616,413.56	638,653.67	669,415.06	697,532.77	738,309.84	782,235.85	830,488.17
Pertambangan dan Penggalian	22,292.31	26,542.17	30,465.19	32,622.25	30,110.24	30,532.49	30,834.03	31,335.65	31,905.12	33,020.57	34,707.92	36,175.75	37,741.33	38,929.15
Industri Pengolahan	138,800.94	149,325.31	167,291.48	178,332.04	172,775.61	177,032.75	182,711.13	188,544.01	198,766.74	210,832.58	223,844.29	237,345.23	252,820.14	267,482.76
Listrik, Gas & Air Bersih	4,217.97	5,002.44	5,955.99	6,657.91	7,355.11	8,252.73	9,402.32	10,873.36	12,270.37	13,880.91	15,329.49	16,691.11	18,222.43	19,872.44
Bangunan	127,289.37	134,479.32	146,295.74	153,547.36	115,680.64	116,738.01	117,237.19	120,843.33	126,644.88	131,982.35	138,299.00	143,797.51	151,634.47	157,611.81
Perdagangan, Hotel dan restoran	161,078.25	176,136.43	186,125.84	193,824.89	190,667.84	196,409.74	202,787.92	210,059.73	219,160.53	229,884.67	244,522.27	258,851.86	275,284.18	290,650.64
Pengangkutan & Komunikasi	69,043.52	73,075.38	77,963.55	84,622.21	81,011.37	81,584.36	84,543.58	87,627.07	92,206.40	96,928.24	102,156.05	106,565.77	113,081.55	119,111.85
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	61,411.33	71,981.28	76,579.00	81,084.64	73,568.45	70,427.12	72,709.71	74,759.40	76,642.40	79,877.39	62,943.05	66,256.08	70,879.72	75,792.93
Jasa-jasa	194,054.38	218,671.91	241,997.40	251,366.31	254,539.61	260,736.97	269,366.80	277,430.82	288,689.42	301,767.47	344,155.14	357,827.11	374,255.75	401,774.84
PDRB	1,302,075.79	1,397,850.62	1,501,473.79	1,573,648.03	1,495,774.58	1,516,335.49	1,565,606.18	1,617,886.93	1,684,939.53	1,767,589.24	1,863,489.98	1,961,820.26	2,076,155.42	2,201,714.59

Lampiran 6

PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Padang Pariaman														
LAPANGAN USAHA	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	387,518.81	406,557.50	428,126.41	436,603.42	447,549.52	458,218.43	475,837.88	494,456.20	511,196.12	530,859.13	556,098.35	585,866.99	601,858.07	625,144.10
Pertambangan dan Penggalian	61,803.96	64,517.49	74,052.33	82,154.44	76,323.53	71,093.64	71,553.54	73,923.71	79,384.03	84,258.24	90,504.79	87,545.28	86,783.64	88,777.04
Industri Pengolahan	151,915.30	173,020.22	195,855.50	209,574.44	192,083.34	199,801.53	212,245.61	218,867.67	230,563.78	243,913.42	259,748.92	267,280.86	283,290.99	300,978.13
Listrik, Gas & Air Bersih	3,617.29	6,128.58	9,934.35	11,465.80	12,650.14	15,131.10	18,253.60	20,293.29	22,519.60	24,154.48	25,967.58	28,154.78	31,446.46	34,174.73
Bangunan	94,788.09	103,142.31	112,886.56	119,719.66	77,445.51	71,087.78	75,286.26	80,488.54	86,831.04	93,708.06	102,610.33	107,268.83	114,155.49	118,506.37
Perdagangan, Hotel dan restoran	175,678.59	191,313.53	205,436.44	217,577.38	210,274.71	215,935.27	225,332.14	233,365.41	243,073.70	254,794.87	267,911.36	277,493.23	288,307.30	300,883.30
Pengangkutan & Komunikasi	56,268.98	60,378.95	63,447.15	67,135.78	58,829.92	60,171.86	63,020.10	65,521.91	68,926.91	71,515.01	75,069.02	189,186.32	495,358.37	555,615.34
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	37,729.91	40,396.34	43,802.53	45,303.00	38,077.33	36,688.42	37,878.62	41,001.20	41,829.27	44,124.86	46,368.14	48,788.64	51,395.82	54,243.23
Jasa-jasa	249,981.03	268,632.86	284,273.85	292,281.39	299,030.86	306,143.84	317,294.31	326,296.95	342,286.74	355,985.60	368,740.46	379,997.53	393,769.38	411,362.18
PDRB	1,219,301.95	1,314,087.78	1,417,815.12	1,481,815.31	1,412,264.88	1,434,271.88	1,496,702.06	1,554,214.88	1,626,611.19	1,703,313.67	1,793,018.95	1,971,582.46	2,346,365.52	2,489,684.42

Lampiran 7

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Agam													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	333,617.96	354,465.56	548,176.96	555,824.91	530,078.06	542,558.58	562,087.32	589,672.88	632,012.12	685,611.11	749,063.79	813,823.80	884,512.79	962,825.65
Pertambangan dan Penggalian	155,208.40	165,405.65	79,718.24	84,796.30	73,448.55	73,782.88	74,896.99	76,312.54	78,399.82	80,210.87	84,654.54	88,977.89	93,586.76	99,280.97
Industri Pengolahan	217,209.20	239,579.02	255,988.57	272,259.91	262,860.51	266,586.75	277,650.09	287,728.79	296,667.56	304,965.84	314,602.77	327,923.50	341,875.08	356,518.76
Listrik, Gas & Air Bersih	6,279.50	7,231.02	8,190.70	9,551.28	10,634.82	11,507.68	13,257.01	15,644.76	17,974.54	18,690.13	19,839.07	21,232.67	22,752.34	24,388.51
Bangunan	99,767.47	107,761.51	116,899.69	122,369.82	95,259.15	86,161.90	87,704.20	89,677.54	92,215.43	94,327.17	98,487.02	103,554.88	108,906.29	114,550.99
Perdagangan, Hotel dan restoran	256,536.28	274,404.08	293,509.86	310,284.41	304,335.28	311,809.02	320,250.39	331,924.46	346,529.55	364,414.82	383,676.68	407,574.24	432,916.64	460,400.98
Pengangkutan & Komunikasi	56,353.24	61,755.16	67,149.98	71,379.45	68,475.17	70,512.64	76,615.15	84,244.30	88,118.81	92,796.55	98,710.51	102,693.90	107,251.62	112,822.25
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	59,268.19	61,397.10	64,585.95	67,473.72	63,317.68	62,271.56	63,290.68	65,238.75	70,122.06	73,690.57	78,823.03	82,437.83	86,427.68	90,581.59
Jasa-jasa	253,569.61	268,655.01	288,301.31	299,649.71	310,338.90	316,613.98	324,936.03	333,346.12	340,745.63	351,940.57	362,958.24	376,942.98	390,532.61	404,696.88
PDRB	1,444,174.50	1,550,184.13	1,712,771.96	1,787,142.93	1,713,634.19	1,738,951.62	1,800,687.86	1,873,790.14	1,962,785.52	2,066,647.63	2,190,815.65	2,325,161.69	2,468,761.81	2,626,066.58

Lampiran 8

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten 50 Kota													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	468,955.08	491,903.27	525,516.64	533,147.88	522,727.10	529,487.47	550,718.08	582,269.70	617,246.08	659,179.08	701,263.17	745,854.98	789,141.70	836,942.61
Pertambangan dan Penggalan	85,812.66	92,732.61	104,605.24	114,215.63	103,037.62	101,524.68	103,009.81	108,277.10	114,019.69	118,298.57	123,967.85	130,141.45	137,415.79	145,851.39
Industri Pengolahan	136,777.45	157,820.50	176,774.63	187,001.40	170,758.01	174,227.95	179,424.67	180,626.82	184,714.67	189,792.86	196,968.68	205,280.76	214,655.14	223,975.78
Listrik, Gas & Air Bersih	2,312.20	2,537.62	2,824.30	3,124.91	3,303.13	3,670.20	4,166.28	4,709.63	5,334.91	6,185.25	7,252.18	8,587.94	9,314.03	9,941.37
Bangunan	58,465.97	63,400.55	68,465.12	71,679.24	50,285.60	44,216.32	43,368.72	44,391.32	46,095.07	48,368.32	51,050.26	54,496.15	58,757.25	63,826.24
Perdagangan, Hotel dan restoran	295,994.22	316,500.07	338,919.13	354,921.15	341,140.77	351,890.11	369,191.26	385,782.46	402,813.98	424,921.84	452,158.30	482,861.61	520,485.99	555,683.26
Pengangkutan & Komunikasi	72,477.72	77,987.40	82,992.53	89,607.97	76,218.42	75,543.04	78,550.35	80,596.27	82,776.28	85,937.37	90,866.53	96,210.13	103,421.20	111,160.19
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	34,146.34	38,054.00	41,694.95	44,468.76	42,789.32	42,851.66	45,250.95	47,412.28	49,800.69	51,759.48	54,308.08	57,251.61	61,331.80	65,588.11
Jasa-jasa	244,741.97	258,299.24	267,365.71	279,694.86	275,487.24	284,823.68	294,845.31	300,402.55	308,492.47	319,564.04	331,586.97	344,972.10	359,439.11	378,667.14
PDRB	1,399,683.61	1,499,235.27	1,609,158.25	1,677,861.81	1,585,747.20	1,608,235.12	1,668,525.43	1,734,468.13	1,811,293.84	1,904,006.81	2,009,422.02	2,125,656.73	2,253,962.01	2,391,636.09

Lampiran 9

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kabupaten Pasaman													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	326,976.48	348,769.53	373,282.15	384,552.29	387,156.14	397,876.39	406,191.17	423,103.57	445,191.74	469,197.68	498,405.93	528,404.30	560,049.57	595,107.16
Pertambangan dan Penggalian	17,748.88	21,449.06	24,071.10	25,998.29	22,693.18	21,318.92	21,152.15	21,670.85	22,390.19	23,220.22	23,839.02	24,796.09	25,849.47	26,870.74
Industri Pengolahan	33,905.18	35,893.90	36,889.76	37,723.59	34,794.14	35,665.90	37,483.26	38,584.87	39,999.29	41,903.52	43,978.72	46,203.79	48,795.67	51,265.28
Listrik, Gas & Air Bersih	1,571.92	1,768.32	1,921.91	2,187.04	2,352.38	2,638.45	3,017.42	3,082.39	3,163.34	3,282.50	3,420.06	3,571.31	3,794.80	4,034.22
Bangunan	37,916.92	40,406.29	36,666.76	38,588.05	28,180.94	25,527.74	26,438.04	27,382.56	28,447.74	29,782.82	31,274.98	32,979.96	34,676.62	36,376.04
Perdagangan, Hotel dan restoran	74,143.87	83,631.17	89,689.42	94,467.84	94,426.94	97,455.45	101,046.20	104,357.20	108,520.55	113,269.17	118,683.63	126,642.38	135,291.31	144,690.17
Pengangkutan & Komunikasi	28,645.43	31,301.13	33,503.69	35,820.08	31,024.80	30,981.11	32,044.47	33,362.78	34,928.64	36,857.63	39,158.31	41,626.19	44,506.22	47,527.87
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	35,027.27	36,610.11	38,951.87	41,216.60	33,999.92	32,468.05	34,287.98	35,358.31	35,574.89	36,938.82	38,457.06	40,078.67	41,834.45	43,645.51
Jasa-jasa	121,413.84	126,923.74	135,570.94	142,937.33	143,205.80	145,533.39	151,764.28	154,632.09	158,722.35	165,095.53	170,707.73	177,959.98	186,444.07	195,717.56
PDRB	677,349.79	726,753.25	770,547.59	803,491.11	777,834.26	789,465.42	813,424.97	841,534.62	876,938.73	919,547.89	967,925.44	1,022,262.67	1,081,242.18	1,145,234.55

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kota Padang													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	301.616.20	331,441.99	361,668.93	353,511.23	340,776.70	353,071.57	370,872.48	390,178.01	407,403.29	426,292.45	446,450.89	468,549.12	494,412.92	521837.86
Pertambangan dan Penggalian	66,215.76	76,689.29	92,482.12	135,818.92	122,881.18	115,948.00	118,726.28	122,433.24	125,007.62	126,968.39	131,664.79	138,365.88	146,764.69	156188.15
Industri Pengolahan	1,042,397.31	1,170,372.64	1,329,081.33	1,420,956.07	1,210,476.99	1,224,746.68	1,278,969.47	1,322,001.21	1,392,438.10	1,423,308.80	1,475,532.85	1,547,686.41	1,625,745.53	1705202.18
Listrik, Gas & Air Bersih	34,307.26	42,999.77	59,284.89	68,931.58	77,273.32	90,900.25	106,162.72	120,931.96	132,980.13	143,398.20	145,939.51	152,097.75	160,034.16	176334.39
Bangunan	421,139.60	447,982.33	468,355.92	496,204.93	313,449.42	280,632.08	294,382.16	305,465.15	318,508.51	332,873.24	351,114.69	375,159.17	404,260.75	430863
Perdagangan, Hotel dan restoran	1,270,669.66	1,344,779.71	1,471,651.79	1,552,185.17	1,485,850.70	1,517,029.99	1,580,229.95	1,640,839.90	1,727,934.24	1,802,831.96	1,887,278.01	1,998,670.44	2,135,316.57	2249145.42
Pengangkutan & Komunikasi	1,105,767.21	1,276,881.98	1,385,787.92	1,486,719.99	1,451,643.66	1,517,436.27	1,586,317.86	1,640,470.76	1,758,360.23	1,947,897.87	2,148,797.20	2,240,171.36	2,263,328.12	2426344
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	521,506.94	540,172.40	559,491.50	572,427.85	521,472.45	492,687.40	516,605.20	542,144.62	561,635.95	591,224.48	639,568.99	690,671.46	748,768.12	805854.61
Jasa-jasa	938,400.91	986,614.95	1,057,320.02	1,124,808.85	1,144,093.96	1,170,614.52	1,213,250.72	1,268,626.36	1,318,190.41	1,377,317.03	1,426,553.13	1,499,335.85	1,598,864.65	1693991.19
PDRB	5,702,020.85	6,217,935.06	6,785,124.41	7,211,564.59	6,667,918.39	6,763,066.76	7,065,516.84	7,353,091.21	7,742,458.47	8,171,842.43	8,652,900.06	9,110,697.44	9,577,495.51	10165760.8

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kota Solok													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	25,509.07	27,687.26	29,931.09	28,199.76	29,158.76	30,015.67	29,709.49	30,517.59	31,502.62	33,502.62	34,843.80	36,146.92	37,317.42	38,508.95
Pertambangan dan Penggalian	1,927.21	1,973.87	2,076.83	2,191.77	2,262.85	2,171.30	2,218.32	2,245.83	2,271.43	2,297.55	2,426.73	2,546.61	2,669.36	2,791.88
Industri Pengolahan	22,796.99	25,617.29	27,949.36	29,402.62	29,505.67	30,033.83	31,004.69	32,210.77	33,415.46	34,283.13	36,806.37	39,342.33	41,797.29	44,447.24
Listrik, Gas & Air Bersih	3,527.51	4,296.14	4,733.90	5,308.62	5,796.64	6,663.52	7,362.35	8,281.28	8,909.59	9,514.60	10,397.67	11,479.87	12,431.51	13,430.73
Bangunan	44,350.19	47,042.04	51,653.10	54,118.58	40,777.25	38,701.93	40,237.78	41,644.25	43,126.79	44,511.16	46,572.02	48,751.59	51,900.94	55,113.61
Perdagangan, Hotel dan restoran	25,385.26	27,393.61	29,452.25	30,925.27	31,768.39	32,638.67	33,419.23	35,698.83	37,108.76	38,613.55	40,591.83	43,045.55	45,926.01	49,110.71
Pengangkutan & Komunikasi	48,928.52	52,063.59	54,381.67	58,030.25	56,422.77	58,319.67	61,549.97	64,379.35	69,017.43	72,839.45	78,091.93	84,226.50	90,925.78	98,217.43
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	19,462.95	21,821.99	25,194.48	25,584.90	22,062.38	21,810.29	22,434.25	23,471.91	24,773.58	26,239.82	28,473.68	30,415.28	32,456.01	34,636.31
Jasa-jasa	61,176.82	65,737.68	69,390.49	74,404.77	77,722.45	79,915.80	83,119.26	85,532.60	88,011.72	91,320.21	94,194.86	98,261.98	103,129.91	108,894.97
PDRB	253,064.52	273,633.47	294,763.18	308,166.54	295,477.16	300,270.67	311,055.34	323,982.40	338,047.38	353,221.23	372,398.89	394,216.63	418,554.23	445,151.83

Lampiran 12

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kota Sawahlunto													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	20,185.60	21,671.28	23,780.35	22,623.61	19,450.85	20,569.22	21,378.46	22,828.55	24,435.05	26,459.40	28,391.48	30,671.87	32,255.48	34,047.09
Pertambangan dan Penggalian	201,515.18	299,617.82	253,221.50	254,506.19	226,813.50	196,274.91	160,192.67	143,231.58	130,642.01	121,154.42	123,295.01	117,392.99	106,298.03	98,931.16
Industri Pengolahan	38,523.10	42,219.15	46,300.47	47,135.23	43,912.94	44,385.84	45,778.19	47,971.83	49,576.25	50,588.85	53,179.01	56,625.01	58,393.17	60,257.96
Listrik, Gas & Air Bersih	1,618.58	1,770.30	1,938.34	2,293.64	1,440.71	1,668.86	1,808.86	2,042.66	2,253.53	2,442.58	2,580.85	2,826.60	3,121.77	3,482.33
Bangunan	15,134.17	18,148.48	20,044.50	21,815.03	19,317.72	18,788.22	19,125.62	19,679.95	20,547.58	20,948.25	22,010.38	22,798.47	25,051.62	26,368.37
Perdagangan, Hotel dan restoran	40,673.38	49,875.55	52,249.79	52,681.09	47,504.14	45,290.21	43,076.80	42,446.56	43,229.77	41,335.22	43,154.81	43,247.86	43,882.84	46,147.76
Pengangkutan & Komunikasi	32,177.36	34,509.06	37,224.16	40,333.36	32,691.78	32,641.62	36,194.45	35,104.98	35,212.00	32,101.59	33,996.64	35,876.61	38,318.56	40,143.23
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	18,163.49	18,543.21	19,661.73	20,118.18	19,107.70	18,518.54	18,799.63	19,551.03	20,305.96	20,879.27	22,141.07	23,103.74	24,431.30	25,416.02
Jasa-jasa	64,163.24	68,289.07	74,206.09	77,007.11	86,753.16	89,467.95	91,935.43	94,173.07	99,461.17	103,245.06	107,358.86	112,108.43	117,480.08	123,450.44
PDRB	432,154.09	554,643.92	528,626.94	538,513.44	496,992.51	467,605.36	438,290.11	427,030.21	425,663.31	419,190.65	436,108.11	444,651.58	449,232.85	458,244.37

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kota Padang Panjang													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	25,519.03	27,134.07	29,694.10	29,663.45	27,857.39	28,319.10	29,259.96	29,831.71	30,700.01	31,702.53	33,521.07	35,725.26	37,508.98	37763.3
Pertambangan dan Penggalian	2,859.61	3,115.06	3,352.99	3,640.56	3,395.87	3,407.38	3,524.90	3,664.49	3,681.71	3,120.25	2,754.87	2,754.87	1,368.07	1397.26
Industri Pengolahan	18,981.67	22,117.24	24,082.46	25,551.52	24,415.85	24,990.14	25,898.57	26,994.08	27,841.69	29,069.51	29,828.23	31,710.29	33,245.27	34697.29
Listrik, Gas & Air Bersih	2,164.22	2,533.96	3,203.57	3,652.21	4,048.76	4,537.88	4,935.66	5,498.09	6,051.37	6,650.99	6,830.71	7,769.97	8,703.03	9240.14
Bangunan	18,229.62	20,130.93	21,448.57	22,559.14	16,445.81	16,342.45	16,548.91	16,987.46	17,857.21	19,103.65	20,670.15	22,503.60	24,539.92	26675.51
Perdagangan, Hotel dan restoran	24,293.07	26,704.95	29,597.42	29,945.93	28,741.85	29,234.97	30,399.69	31,575.01	32,736.41	33,753.06	34,914.45	36,370.08	38,611.58	41093
Pengangkutan & Komunikasi	39,072.16	40,853.10	43,640.01	47,166.76	46,134.96	47,086.83	48,763.40	50,641.15	52,344.86	55,085.85	59,164.50	63,622.00	68,167.38	74072.33
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	22,167.37	23,132.74	23,988.32	24,333.36	21,412.03	21,137.78	21,730.51	22,607.46	24,001.17	25,818.89	28,577.11	28,577.11	31,080.03	36658.47
Jasa-jasa	47,013.02	51,890.30	56,434.58	59,086.95	61,148.32	62,375.33	64,826.78	66,602.68	70,617.37	75,091.94	78,025.24	81,016.74	84,355.64	89701.38
PDRB	200,299.76	217,612.35	235,442.02	245,599.89	233,600.84	237,431.88	245,888.38	254,402.13	265,831.80	279,396.67	294,286.33	311,166.04	330,172.93	351227.59

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kota Bukittinggi													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	30,190.31	31,913.24	32,535.18	32,643.74	32,376.52	32,518.59	32,590.36	33,690.81	34,375.49	20,052.88	20,325.60	20,783.83	20,977.34	20015.6
Pertambangan dan Penggalian	190.67	222.66	236.42	261.61	238.45	221.35	231.97	246.69	251.47	289.31	332.68	346.25	196.71	118.03
Industri Pengolahan	54,060.90	59,919.60	63,818.80	67,000.64	61,303.55	62,784.69	66,173.39	67,252.48	70,147.21	75,553.65	79,822.14	84,048.75	87,898.18	92863.53
Listrik, Gas & Air Bersih	6,478.67	7,768.87	8,931.97	10,836.69	11,678.10	13,021.62	14,108.42	14,778.07	15,608.85	16,433.25	17,149.69	18,655.10	19,038.27	20494.34
Bangunan	24,552.53	32,991.24	35,610.29	37,493.43	24,737.01	23,130.47	24,125.94	24,976.37	26,142.83	27,084.76	27,806.90	28,986.90	30,248.00	32024.12
Perdagangan, Hotel dan restoran	78,779.88	83,123.35	90,693.90	94,838.24	90,982.56	94,455.36	97,534.38	104,854.92	113,028.45	138,568.92	148,501.77	158,240.77	168,109.99	180653.66
Pengangkutan & Komunikasi	97,341.02	112,613.19	130,688.83	141,810.70	128,243.77	127,627.51	133,022.75	138,554.88	147,615.28	153,251.99	163,208.57	176,127.57	190,110.82	204077.4
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	51,100.82	56,151.49	61,684.75	64,417.11	55,388.71	55,002.09	57,239.47	62,096.08	62,927.16	66,672.55	71,286.40	74,894.88	79,585.38	85124.28
Jasa-jasa	128,229.18	134,303.30	141,538.95	149,508.45	154,759.25	159,524.72	165,554.63	170,390.28	175,780.48	182,620.42	191,395.10	200,349.02	213,448.93	226786.58
PDRB	470,923.98	519,006.93	565,739.08	598,810.60	559,707.92	568,286.39	590,581.31	616,840.58	645,877.22	680,527.73	719,828.85	762,433.07	809,613.62	862157.54

LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Sektor Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 di Kota Payakumbuh													
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	48,792.01	54,158.86	57,824.50	58,910.33	56,814.85	57,232.40	58,044.09	60,385.34	63,296.13	66,181.23	69,617.21	72,504.24	75,518.21	79,028.35
Pertambangan dan Penggalian	1,434.18	1,635.13	1,775.33	1,896.99	1,859.07	1,931.70	2,018.10	2,107.14	2,207.97	2,326.07	2,461.00	2,461.00	2,578.46	2,679.54
Industri Pengolahan	27,356.74	30,324.89	31,757.49	33,053.90	31,435.76	32,209.31	33,456.23	35,107.87	37,045.22	38,840.16	40,862.69	43,982.72	46,128.50	48,409.29
Listrik, Gas & Air Bersih	2,506.42	3,064.07	3,463.68	3,927.92	4,578.12	5,356.15	6,280.07	7,062.50	7,665.95	8,078.56	8,564.91	9,075.01	9,618.65	10,255.52
Bangunan	32,672.62	3,820.21	46,814.87	49,772.70	34,502.94	34,459.13	35,554.22	37,090.49	39,819.93	42,394.56	44,704.60	46,925.82	49,184.28	51,491.98
Perdagangan, Hotel dan restoran	75,056.65	81,070.61	87,396.27	91,658.34	88,311.49	91,290.84	95,643.26	99,336.60	103,545.92	109,169.47	114,339.43	119,845.73	125,928.94	132,953.65
Pengangkutan & Komunikasi	77,720.06	84,214.52	88,975.53	94,072.35	89,451.16	91,321.16	94,225.22	96,511.87	101,540.89	107,329.48	117,018.52	128,703.20	141,963.95	155,481.59
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	43,557.24	46,885.53	48,329.65	51,045.46	49,685.39	48,559.46	49,989.27	51,683.34	54,337.72	55,995.61	59,138.72	59,138.72	61,377.44	70,446.31
Jasa-jasa	97,265.87	105,957.43	112,864.64	118,346.01	125,075.97	125,404.39	129,288.66	134,260.29	139,235.18	146,526.54	152,479.30	159,376.41	167,636.87	176,933.5
PDRB	406,361.78	411,131.25	479,201.94	502,684.00	481,714.74	487,764.54	504,499.12	523,545.44	548,694.91	576,841.68	609,186.38	644,369.03	684,222.31	727,784.23

Lampiran 16.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi Sblm Desentralisasi						Rata	Pertumbuhan Ekonomi Stelah Desentralisasi							R
		1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	R
Kabupaten																
1	Pesisir Selatan	6.75	7.12	4.23	-4.82	1.25	2.30	2.81	3.40	4.14	4.35	4.70	5.10	5.22	5.31	4.
2	Solok	7.29	7.80	4.83	-3.74	1.52	2.43	3.35	3.77	4.34	4.87	5.58	5.87	6.02	6.24	5.
3	Sawahlunto / Sijunjung	7.01	7.52	4.82	-3.55	1.50	3.65	3.49	4.08	4.64	4.68	5.71	5.32	5.95	5.61	5.
4	Tanah Datar	7.36	7.41	4.81	-4.95	1.37	3.25	3.21	3.34	4.14	4.91	5.43	5.28	5.83	6.05	5.
5	Padang Pariaman	7.77	7.89	4.51	-4.69	1.56	4.35	3.57	3.84	4.66	4.72	5.27	9.96	19.01	6.11	7.
6	Agam	7.34	10.49	4.34	-4.11	1.48	3.55	3.85	4.06	4.75	5.29	6.01	6.13	6.18	6.37	5.
7	50 Kota	7.11	7.33	4.27	-5.49	1.42	3.75	3.07	3.95	4.43	5.12	5.54	5.78	6.04	6.11	5.
8	Pasaman	7.29	6.03	4.28	-3.19	1.50	3.03	3.16	3.46	4.21	4.86	5.26	5.61	5.77	5.92	5.
Kota																
9	Padang	9.05	9.12	6.28	-7.54	1.43	4.47	3.80	4.07	5.30	5.55	5.89	5.29	5.12	6.14	5.
10	Solok	8.13	7.72	4.55	-4.12	1.62	3.59	3.58	4.16	4.34	4.49	5.43	5.86	6.17	6.35	5.
11	Sawahlunto	28.34	-4.69	1.87	-7.71	-5.91	-6.27	0.94	-2.57	-0.32	-1.52	4.04	1.96	1.03	2.01	0.
12	Padang Panjang	8.64	8.19	4.31	-4.89	1.64	3.56	3.58	3.46	4.49	5.10	5.33	5.74	6.11	6.38	5.
13	Bukittinggi	10.21	9.00	5.85	-6.53	1.53	3.92	4.00	4.45	4.71	5.36	5.78	5.92	6.19	6.49	5.
14	Payakumbuh	1.17	16.56	4.90	-4.17	1.26	3.43	3.86	3.78	4.80	5.13	5.61	5.78	6.18	6.37	5.
Provinsi		8.34	8.46	5.14	-6.40	1.18	3.84	3.43	3.66	4.69	5.26	5.47	5.73	6.14	6.34	5.

Sumber : Data BPS, diolah

Lampiran 17

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KAB. PESSEL															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	avr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	avr
Pertanian	1.51	1.50	1.52	1.55	1.43	1.43	1.40	1.48	1.39	1.35	1.32	1.32	1.31	1.31	1.32	1.33
Pertambangan dan Pengegalian	0.37	0.35	0.36	0.39	0.35	0.36	0.38	0.37	0.40	0.41	0.43	0.43	0.45	0.46	0.50	0.44
Industri Pengolahan	0.70	0.69	0.68	0.69	0.83	0.83	0.85	0.75	0.85	0.89	0.93	0.96	0.98	1.01	1.02	0.95
Listrik, Gas & Air Bersih	0.65	0.69	0.59	0.54	0.51	0.52	0.51	0.57	0.49	0.49	0.52	0.53	0.51	0.52	0.53	0.51
Bangunan	0.74	0.77	0.72	0.74	0.72	0.76	0.78	0.75	0.80	0.82	0.80	0.78	0.80	0.80	0.82	0.80
Perdagangan, Hotel dan restoran	1.15	1.16	1.18	1.21	1.19	1.19	1.21	1.18	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21
Pengangkutan & Komunikasi	0.27	0.27	0.28	0.27	0.24	0.22	0.23	0.25	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.22
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.83	0.87	0.88	0.87	0.86	0.80	0.81	0.85	0.82	0.82	0.81	0.80	0.80	0.78	0.78	0.80
Jasa-jasa	1.14	1.16	1.16	1.15	1.13	1.13	1.15	1.14	1.14	1.15	1.16	1.16	1.19	1.20	1.21	1.17

Sumber : Data BPS sudah diolah

Lampiran 18

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KAB. SOLOK															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	avr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	avr
Pertanian	1.81	1.76	1.75	1.77	1.76	1.77	1.78	1.77	1.77	1.73	1.70	1.70	1.71	1.72	1.74	1.72
Pertambangan dan Penggalian	0.66	0.67	0.77	0.79	0.78	0.84	0.89	0.77	0.92	0.94	0.96	1.00	1.04	1.09	1.15	1.01
Industri Pengolahan	0.53	0.54	0.52	0.53	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.55
Listrik, Gas & Air Bersih	0.68	0.64	0.58	0.49	0.48	0.43	0.39	0.53	0.36	0.34	0.35	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34
Bangunan	0.89	0.89	0.83	0.84	0.96	1.02	1.04	0.92	1.06	1.07	1.07	1.09	1.11	1.12	1.14	1.09
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.83	0.86	0.85	0.85	0.76	0.76	0.77	0.81	0.77	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
Pengangkutan & Komunikasi	0.81	0.83	0.88	0.86	0.86	0.83	0.83	0.84	0.83	0.82	0.79	0.78	0.76	0.74	0.72	0.78
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.46	0.47	0.49	0.50	0.50	0.42	0.42	0.47	0.42	0.42	0.42	0.41	0.40	0.39	0.39	0.41
Jasa-jasa	0.88	0.89	0.90	0.91	0.90	0.90	0.91	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.91

Sumber : Data BPS sudah diolah

Lampiran 19

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	avr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	avr
Pertanian	1.21	1.17	1.17	1.19	1.17	1.16	1.20	1.18	1.17	1.15	1.15	1.16	1.14	1.13	1.09	1.14
Pertambangan dan Penggalian	2.88	2.73	2.92	2.92	3.80	4.27	4.26	3.40	4.66	4.93	4.62	4.64	5.01	5.06	5.43	4.91
Industri Pengolahan	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.36	0.34	0.34	0.36	0.38	0.39	0.40	0.40	0.37
Listrik, Gas & Air Bersih	1.15	1.11	0.93	0.84	0.83	0.84	0.82	0.93	0.78	0.75	0.74	0.75	0.78	0.99	1.04	0.83
Bangunan	1.76	2.00	1.84	1.84	1.81	1.92	1.92	1.87	1.90	1.85	2.00	2.00	2.05	2.10	2.07	1.99
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.70	0.72	0.73	0.74	0.67	0.67	0.66	0.70	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.63	0.62	0.64
Pengangkutan & Komunikasi	0.46	0.49	0.55	0.54	0.57	0.55	0.55	0.53	0.54	0.53	0.54	0.53	0.51	0.50	0.49	0.52
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.70	0.69	0.69	0.73	0.74	0.72	0.74	0.72	0.73	0.73	0.73	0.76	0.74	0.71	0.71	0.73
Jasa-jasa	1.15	1.08	1.08	1.04	1.01	1.00	1.01	1.05	1.03	1.06	1.06	1.05	1.05	1.07	1.10	1.06

Sumber : Data BPS sudah diolah

Lampiran 20

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KAB. TANAH DATAR															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	avr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	avr
Pertanian	1.72	1.65	1.63	1.67	1.58	1.56	1.62	1.63	1.60	1.55	1.51	1.49	1.50	1.52	1.54	1.53
Pertambangan dan Penggalian	0.42	0.42	0.46	0.45	0.46	0.51	0.52	0.46	0.53	0.53	0.55	0.56	0.56	0.57	0.57	0.55
Industri Pengolahan	0.84	0.82	0.81	0.81	0.85	0.86	0.83	0.83	0.83	0.86	0.90	0.91	0.93	0.95	0.95	0.90
Listrik, Gas & Air Bersih	0.88	0.88	0.80	0.67	0.67	0.65	0.65	0.74	0.65	0.67	0.72	0.75	0.73	0.74	0.75	0.72
Bangunan	1.29	1.32	1.25	1.26	1.44	1.56	1.52	1.38	1.53	1.56	1.53	1.49	1.48	1.46	1.45	1.50
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.68	0.70	0.70	0.70	0.71	0.72	0.71	0.70	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73	0.72	0.72	0.72
Pengangkutan & Komunikasi	0.52	0.49	0.49	0.48	0.50	0.47	0.47	0.49	0.47	0.46	0.45	0.44	0.42	0.41	0.39	0.44
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.75	0.85	0.89	0.92	0.97	0.92	0.91	0.89	0.91	0.92	0.91	0.68	0.67	0.67	0.67	0.78
Jasa-jasa	0.87	0.94	0.99	0.99	0.96	0.96	0.96	0.95	0.97	0.99	1.00	1.11	1.11	1.11	1.13	1.06

Sumber : Data BPS sudah diolah

Lampiran 21

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KAB. PADANG PARIAMAN															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	avr	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	avr
Pertanian	1.35	1.32	1.30	1.31	1.31	1.32	1.35	1.32	1.34	1.28	1.24	1.23	1.19	1.04	1.03	1.19
Pertambangan dan Penggalian	1.25	1.10	1.19	1.20	1.22	1.26	1.25	1.21	1.30	1.37	1.45	1.51	1.36	1.17	1.14	1.33
Industri Pengolahan	0.98	1.01	1.01	1.02	1.00	1.02	1.01	1.01	1.01	1.03	1.08	1.10	1.04	0.94	0.95	1.02
Listrik, Gas & Air Bersih	0.80	1.15	1.41	1.23	1.22	1.27	1.32	1.20	1.27	1.27	1.30	1.33	1.23	1.12	1.15	1.24
Bangunan	1.03	1.07	1.02	1.04	1.02	1.01	1.02	1.03	1.06	1.11	1.13	1.15	1.10	0.97	0.96	1.07
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.79	0.81	0.81	0.83	0.83	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.77	0.67	0.66	0.77
Pengangkutan & Komunikasi	0.45	0.43	0.42	0.41	0.38	0.37	0.36	0.40	0.36	0.36	0.35	0.34	0.75	1.58	1.62	0.76
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.49	0.51	0.54	0.54	0.53	0.51	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.49	0.43	0.42	0.49
Jasa-jasa	1.20	1.23	1.23	1.22	1.20	1.19	1.18	1.21	1.18	1.22	1.23	1.23	1.17	1.03	1.02	1.15

Sumber : Data BPS sudah diolah

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KOTA PADANG															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	AVG	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	AVG
Pertanian	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
Pertambangan dan Penggalian	0.26	0.25	0.29	0.44	0.41	0.42	0.42	0.36	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.46	0.49	0.44
Industri Pengolahan	1.44	1.44	1.43	1.42	1.33	1.33	1.29	1.38	1.29	1.31	1.31	1.30	1.30	1.32	1.31	1.31
Listrik, Gas & Air Bersih	1.63	1.71	1.75	1.52	1.58	1.62	1.63	1.63	1.60	1.57	1.61	1.54	1.44	1.40	1.45	1.52
Bangunan	0.98	0.99	0.89	0.89	0.88	0.84	0.84	0.90	0.85	0.86	0.83	0.81	0.83	0.85	0.86	0.84
Perdagangan, Hotel dan restoran	1.22	1.20	1.22	1.22	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	1.22	1.21	1.20	1.21	1.22	1.20	1.21
Pengangkutan & Komunikasi	1.89	1.94	1.93	1.85	1.99	1.97	1.94	1.93	1.93	1.93	1.97	2.00	1.91	1.77	1.74	1.89
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.45	1.44	1.43	1.41	1.54	1.44	1.44	1.45	1.45	1.46	1.46	1.48	1.51	1.53	1.54	1.49
Jasa-jasa	0.96	0.95	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.97	0.99	0.99	0.99	1.00	1.03	1.03	1.00

Sumber : Data BPS sudah diolah

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KOTA SOLOK															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	AVG	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	AVG
Pertanian	0.43	0.43	0.44	0.41	0.41	0.41	0.41	0.42	0.40	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.37
Pertambangan dan Penggalian	0.19	0.16	0.16	0.15	0.17	0.18	0.19	0.17	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19
Industri Pengolahan	0.71	0.72	0.69	0.69	0.73	0.73	0.71	0.71	0.71	0.72	0.73	0.75	0.76	0.78	0.78	0.75
Listrik, Gas & Air Bersih	3.77	3.88	3.22	2.75	2.67	2.67	2.57	3.08	2.49	2.42	2.48	2.56	2.51	2.49	2.52	2.49
Bangunan	2.32	2.35	2.25	2.27	2.58	2.62	2.62	2.43	2.64	2.65	2.58	2.51	2.50	2.48	2.50	2.55
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.55	0.56	0.56	0.57	0.60	0.60	0.59	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Pengangkutan & Komunikasi	1.89	1.80	1.74	1.69	1.75	1.71	1.71	1.75	1.72	1.73	1.70	1.69	1.66	1.62	1.60	1.68
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.22	1.32	1.49	1.48	1.47	1.44	1.42	1.40	1.43	1.48	1.50	1.53	1.54	1.52	1.51	1.50
Jasa-jasa	1.42	1.44	1.45	1.49	1.49	1.48	1.49	1.46	1.49	1.51	1.52	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51

Sumber : Data BPS sudah diolah

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KOTA SAWAHLUNTO															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	AVG	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	AVG
Pertanian	0.20	0.17	0.19	0.19	0.16	0.18	0.21	0.19	0.22	0.23	0.25	0.26	0.28	0.29	0.30	0.26
Pertambangan dan Penggalian	11.52	12.07	10.91	10.22	10.32	10.66	9.57	10.75	9.16	8.62	8.45	8.44	8.09	7.47	6.91	8.16
Industri Pengolahan	0.70	0.58	0.64	0.63	0.65	0.70	0.74	0.66	0.80	0.85	0.91	0.93	0.98	1.01	1.03	0.93
Listrik, Gas & Air Bersih	1.01	0.79	0.74	0.68	0.40	0.43	0.45	0.64	0.47	0.49	0.54	0.54	0.55	0.58	0.63	0.54
Bangunan	0.46	0.45	0.49	0.52	0.73	0.82	0.88	0.62	0.95	1.00	1.02	1.01	1.04	1.12	1.16	1.04
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.52	0.50	0.55	0.56	0.53	0.54	0.54	0.53	0.54	0.56	0.54	0.55	0.53	0.53	0.55	0.54
Pengangkutan & Komunikasi	0.73	0.59	0.67	0.67	0.60	0.61	0.71	0.65	0.71	0.70	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64	0.65
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.67	0.55	0.65	0.66	0.76	0.78	0.84	0.70	0.90	0.96	1.01	1.02	1.03	1.07	1.08	1.01
Jasa-jasa	0.87	0.74	0.86	0.88	0.99	1.06	1.17	0.94	1.24	1.35	1.45	1.47	1.53	1.61	1.66	1.47

Sumber : Data BPS sudah diolah

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KOTA PDG. PANJANG															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	AVG	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	AVG
Pertanian	0.54	0.53	0.54	0.54	0.49	0.49	0.51	0.52	0.49	0.47	0.45	0.45	0.46	0.46	0.44	0.46
Pertambangan dan Penggalian	0.35	0.32	0.32	0.32	0.33	0.36	0.38	0.34	0.39	0.39	0.33	0.28	0.27	0.13	0.13	0.27
Industri Pengolahan	0.74	0.78	0.75	0.75	0.77	0.77	0.75	0.76	0.76	0.76	0.78	0.77	0.78	0.78	0.77	0.77
Listrik, Gas & Air Bersih	2.92	2.88	2.73	2.37	2.36	2.30	2.18	2.53	2.10	2.09	2.19	2.13	2.15	2.21	2.20	2.15
Bangunan	1.20	1.27	1.17	1.19	1.31	1.40	1.36	1.27	1.37	1.40	1.40	1.41	1.46	1.49	1.54	1.44
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.67	0.68	0.71	0.69	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.64	0.66
Pengangkutan & Komunikasi	1.90	1.78	1.75	1.72	1.81	1.74	1.71	1.77	1.72	1.67	1.63	1.62	1.59	1.54	1.53	1.61
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.76	1.76	1.77	1.76	1.80	1.76	1.74	1.77	1.75	1.82	1.87	1.94	1.83	1.84	2.03	1.87
Jasa-jasa	1.37	1.43	1.47	1.49	1.48	1.46	1.47	1.45	1.48	1.54	1.58	1.59	1.58	1.57	1.57	1.56

Sumber : Data BPS sudah diolah

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KOTA BUKITTINGGI															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	AVG	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	AVG
Pertanian	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.25	0.23	0.22	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.14
Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
Industri Pengolahan	0.90	0.88	0.82	0.80	0.80	0.81	0.80	0.83	0.78	0.79	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.83
Listrik, Gas & Air Bersih	3.72	3.70	3.17	2.88	2.84	2.76	2.59	3.09	2.33	2.21	2.22	2.18	2.11	1.97	1.98	2.14
Bangunan	0.69	0.87	0.81	0.81	0.82	0.83	0.83	0.81	0.83	0.84	0.81	0.77	0.77	0.75	0.75	0.79
Perdagangan, Hotel dan restoran	0.92	0.89	0.90	0.90	0.90	0.92	0.91	0.91	0.93	0.96	1.12	1.14	1.14	1.13	1.14	1.08
Pengangkutan & Komunikasi	2.02	2.05	2.18	2.13	2.09	1.98	1.95	2.06	1.94	1.94	1.86	1.83	1.79	1.76	1.72	1.83
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.72	1.79	1.90	1.91	1.95	1.92	1.91	1.87	1.98	1.97	1.98	1.98	1.96	1.93	1.92	1.96
Jasa-jasa	1.59	1.55	1.54	1.54	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.58	1.58	1.59	1.60	1.62	1.62	1.59

Sumber : Data BPS sudah diolah

LAPANGAN USAHA	HASIL PERHITUNGAN LQ UNTUK KOTA PAYAKUMBUH															
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	AVG	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	AVG
Pertanian	0.51	0.56	0.52	0.52	0.49	0.48	0.49	0.51	0.48	0.47	0.46	0.45	0.45	0.45	0.44	0.46
Pertambangan dan Penggalian	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Industri Pengolahan	0.53	0.56	0.48	0.47	0.48	0.48	0.47	0.50	0.48	0.49	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.51
Listrik, Gas & Air Bersih	1.67	1.84	1.45	1.25	1.30	1.32	1.35	1.45	1.31	1.28	1.29	1.29	1.21	1.18	1.18	1.25
Bangunan	1.06	0.13	1.26	1.28	1.34	1.43	1.43	1.13	1.45	1.51	1.50	1.47	1.47	1.44	1.43	1.47
Perdagangan, Hotel dan restoran	1.01	1.10	1.02	1.03	1.02	1.04	1.05	1.04	1.04	1.03	1.04	1.03	1.02	1.01	0.99	1.02
Pengangkutan & Komunikasi	1.87	1.94	1.75	1.68	1.70	1.65	1.61	1.74	1.59	1.57	1.54	1.55	1.55	1.55	1.55	1.56
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.70	1.89	1.75	1.80	2.03	1.97	1.95	1.87	1.94	2.00	1.96	1.94	1.83	1.76	1.88	1.90
Jasa-jasa	1.40	1.55	1.45	1.45	1.47	1.43	1.43	1.45	1.45	1.47	1.49	1.50	1.50	1.51	1.50	1.49

Sumber : Data BPS sudah diolah

Lampiran 31

LAPANGAN USAHA	Hasil Perhitungan Differential Shift Kab. Peairsir Selatan														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-63523.95989	-348.641072	42835.57583	-186722.2073	-13898.54865	-94584.69587	18254800.32	-53023.74615	-133600.1882	-111688.8829	-41288.94896	-48119.4082	-25321.18402	-22719.21358	2545579.821
Pertambangan dan Pengalihan	-13711.98535	1020.802591	-5201.34824	-3810.411801	5210.372703	6877.775578	883145.7175	-1802.465719	4933.308977	8004.304881	2737.341325	3530.745441	4152.226874	3317.084876	126602.6091
Industri Pengolahan	-27577.22998	-25251.11158	4482.325382	182165.3858	8934.55948	-1079.948574	4238415.598	23609.16375	58066.60902	52521.81287	30429.81887	18591.82563	28031.50705	6987.380107	636864.7851
Listrik, Gas & Air Bersih	1529.970791	-8322.587272	-3702.596574	-1500.885202	873.0380824	-1038.889638	117211.4788	-1693.321638	-525.582021	3802.961654	811.271499	-2438.889188	-255.1298445	1239.834286	16850.34768
Bangunan	10336.49698	-36320.17142	7121.226025	68.53388001	18834.84887	5191.517134	3129825.229	871.7418745	7078.471039	-15883.88168	-14431.50158	8224.348172	-2521.703501	8771.168955	445704.8389
Perdagangan, Hotel dan restoran	-6834.842787	12161.65223	23868.00787	8489.806266	9723.434878	-2438.28214	10194588.22	7158.829355	-12380.29565	-5740.845544	-10511.24381	-18915.23588	-30488.77308	-33672.92835	1441430.818
Pengangkutan & Komunikasi	-6287.743652	9349.058411	-14178.74836	-21459.12618	-14285.90197	2086.157283	1427914.549	-7481.050582	-4593.703759	-8807.858802	-7210.840354	-13383.72172	-11554.52769	-8002.379332	195277.2381
Keruangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10847.44731	2579.887444	-9418.763916	253.2595233	-26817.91705	-1741.029872	2722217.02	-4049.219428	-1744.417218	-8333.548996	-8663.203253	-7827.894478	-13681.6838	-7008.5688	381844.0992
Jasa-jasa	4835.884205	-26959.98183	-30387.80004	-135.7388378	3380.484028	-813.3547449	8207421.208	-8310.054553	7852.887709	-10731.63254	-8114.435141	41718.683	8120.66681	-18310.74979	1316806.825

Sumber data : BPS diolah

Lampiran 32

LAPANGAN USAHA	Hasil Perhitungan Differential Shift Kab. Solok														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-138073.7575	-34968.21444	35245.59215	60255.12769	41996.14273	-26530.98201	19156701.99	-10012.67857	-111087.5903	-98637.21393	-8046.293466	28362.11577	31517.79186	38876.29553	2718524.917
Pertambangan dan Pengaliam	1849.115423	41126.32648	6590.572135	5058.43801	20880.05868	10837.24279	1479331.287	14389.95859	3176.484077	8211.743668	15452.49698	16997.32566	16873.08194	20419.74663	224978.8693
Industri Pengolahan	8725.042351	-21571.37532	1685.717053	-2452.410415	3166.237888	-7847.083678	3215591.247	-3048.978754	10898.8704	21174.38804	6206.521958	20668.81651	18109.36798	5796.556241	470770.97
Listrik, Gas & Air Bersih	-2353.273092	-3069.117093	-5702.154909	327.9462749	-3195.708404	-3021.073365	119867.1246	-2835.583431	-2976.703369	414.2425551	-84.72694497	-2037.285542	-217.8833887	525.9267208	16093.30446
Bangunan	-3136.741745	-39519.54432	2249.508115	57989.20917	26997.62326	3848.499628	3237230.713	8071.425684	5579.803459	-2557.508519	8024.779422	14998.00777	2102.200428	9909.517598	489050.9913
Perdagangan, Hotel dan restoran	32753.1667	-17331.66584	-5473.55815	-89587.40469	-1498.417104	-1070.784249	7118701.112	-13701.44385	-10719.10547	2959.858898	-104.282481	4062.743401	1081.957113	642.8687185	1014701.929
Pengangkutan & Komunikasi	18760.69714	43797.92793	-18940.83882	16589.48909	-25825.9142	-7553.881066	4083942.823	4471.243348	-20372.36404	-37095.31315	-14148.28396	-32179.11281	-36453.30648	-23076.44342	560727.2917
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6124.213824	5471.550401	5301.179045	6572.874667	-38165.49431	-3486.04735	1504130.134	-2698.987321	1788.365384	-1498.252427	-8318.803668	-4984.762685	-4241.553455	1974.947213	212593.0124
Jasa-jasa	-3924.981587	12583.72654	14902.8256	22182.51008	-4643.720338	-7132.587088	6750814.198	5862.965535	3983.040511	-5443.976223	1737.337252	-8183.353003	-8590.576803	-28873.95233	959288.5262

Sumber data : BPS diolah

LAPANGAN USAHA	Hasil Perhitungan Differential Shift Kab. Sewahlunto / sijnunjung														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-86723.24636	-15283.15246	21952.74601	17239.81875	-5498.716458	45466.54469	7879104.294	-474.334306	-45810.83319	3784.323402	16672.96895	-36393.22359	-31562.4392	-78172.25402	1101306.929
Pertambangan dan Pengalihan	-57146.05237	48975.17288	-2433.944185	233237.8625	85983.65145	-2735.816282	3627740.085	50643.51234	65714.52385	-78083.92553	7486.758337	87881.88078	8631.553649	77108.02787	549848.0563
Industri Pengolahan	-5422.213851	-18435.78118	-1060.448275	10119.81682	4081.311249	-8481.404697	1371572.824	-2886.483302	-5048.715241	19177.31429	18989.19411	8822.231805	6777.250021	4482.0492	203128.5235
Listrik, Gas & Air Bersih	-1602.582171	-8810.981475	-4149.150724	685.3751699	507.088798	-587.32339	110892.4881	-1989.598965	-3239.181199	-820.1986811	718.4363445	2810.011845	18750.58499	2789.953703	18558.92802
Bangunan	80392.22967	-83761.53625	-3595.876589	6294.394244	36938.86834	-1842.340045	4881283.189	9104.289895	-19825.45782	53888.43851	2708.992551	13848.15488	17731.53064	-15328.06754	674770.1527
Perdagangan, Hotel dan restoran	7584.480512	4518.1403	4212.756711	-44581.32565	5088.727827	-5800.056329	3811365.042	-4829.879472	-11059.35809	-119.0150077	-8525.040169	-23744.71832	-8958.447376	-14520.43992	534801.1637
Pengangkutan & Komunikasi	18776.8781	37588.59447	-2949.075093	22399.97808	-10571.93143	-849.3485167	1517072.306	10782.18294	-8080.533506	4254.883739	-8292.383335	-21042.77623	-4779.188302	-9919.199247	211425.0421
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-8487.859533	-344.0275929	8892.638858	8958.51802	-3581.908	4785.504834	1217405.937	2036.844397	972.3285295	-3434.598112	11744.23078	-5810.082391	-11109.73083	-4468.070499	172505.5498
Jasa-jasa	-65901.94109	-12119.52305	-38174.57422	-5107.885884	-1907.902968	9619.549557	5144975.307	-18932.01291	32584.54467	-10283.48128	-9961.022807	-4926.666174	32516.51305	22339.09804	741187.4886

Sumber data : BPS diolah

Lampiran 34

LAPANGAN USAHA	Differential Shift Kab. Tanah Datar														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-195742.0003	-92159.40302	79702.6607	-151354.1905	-38400.77065	118027.9045	22251162.84	-46987.63321	-211435.5473	-140550.112	-79041.16755	35490.41099	48880.25009	59886.2309	3130737.897
Pertambangan dan Penggalian	-1285.883833	17013.78785	-7391.68071	5585.952034	23002.87779	849.8113295	1139571.031	6259.144077	-146.2898486	6943.403508	4515.583538	2784.902205	3137.853929	-4258.765578	165400.9804
Industri Pengolahan	-41737.57458	-19280.29608	-2428.999037	80890.0674	14030.87775	-45780.42207	6241885.814	-5714.391103	44885.28818	64394.17427	25940.28734	17441.9807	32331.25892	126.2279973	917324.3744
Listrik, Gas & Air Bersih	50.43484422	-6852.698254	-9815.76039	487.8408269	-1141.97206	-553.7006516	179289.1546	-2940.975981	1898.450789	8842.027427	4858.354216	-3882.48499	258.4990405	2311.139506	27204.59452
Bangunan	8101.7681	-81097.24946	2242.399209	96900.12493	72300.53067	-34591.74967	8150924.203	13975.9703	14959.12212	-28944.76111	-27513.03443	-8064.93302	-17560.66418	-13452.22114	889631.9545
Perdagangan, Hotel dan restoran	30793.71345	-23879.93267	2236.128289	33929.37161	23703.47269	-13992.48867	7058833.979	8798.377783	-9620.78574	4245.304812	18648.39165	-1973.25143	-6614.402132	-23715.23097	1008943.198
Pengangkutan & Komunikasi	-32780.15305	-10828.17911	-11144.02364	20854.30828	-24659.59028	-11739.4427	3029872.368	-11879.51341	-9461.578129	-21090.22612	-18941.94886	-39455.38997	-29849.17385	-28682.08199	410078.0651
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	68468.92771	14946.93974	15210.84417	31090.65832	-23795.26813	-7179.904327	3020792.372	16456.99958	1737.774872	-5060.220885	-139721.0601	-5410.393528	-4528.448708	-1195.304925	411867.3884
Jasa-jasa	117423.6089	81552.32856	-13031.67185	-18568.38015	-5524.848373	-5107.400531	8881081.8	26123.93942	48439.83207	21201.79251	243403.8178	-5508.886799	-8136.414184	31268.1126	1319981.713

Sumber data : BPS diolah

LAPANGAN USAHA	Hasil Perhitungan Differential Shift Kab. Pdg. Pariaman														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-109432.8564	-55914.31522	-548.3751257	70866.21925	18755.02538	82833.7765	16238451.47	2728.91239	-174734.7229	-148286.2342	-40434.22215	8626.412268	-88958.18523	-42948.48484	2250637.568
Pertambangan dan Penggalian	-78758.98252	41941.09527	1138.101741	16746.53964	15318.94453	-106.4779981	3016418.003	-287.12989	32568.53208	30040.97429	24567.12047	-37580.38944	-23119.28028	-15352.89381	432464.991
Industri Pengolahan	38451.65824	-6471.895878	2625.682692	-124.0980098	38796.11148	-12072.96532	7014826.86	9533.915531	49848.12654	68507.30195	35422.40548	-38589.5203	27372.04389	8153.724144	1025287.837
Listrik, Gas & Air Bersih	39311.39947	21925.79698	-13040.86028	660.9117104	3836.142152	4263.853178	237204.3879	9492.873868	-548.8203835	4457.051412	2998.854124	-7823.952243	5149.818148	3320.112404	38349.75761
Bangunan	26528.4428	-39540.62776	8783.56218	-105.5703209	-7782.127345	11009.18773	5017979.221	-188.0221587	32504.89818	6543.200574	13227.12439	-1078.252862	-5901.934853	-10867.80523	721774.347
Perdagangan, Hotel dan restoran	27495.85113	-1677.501798	28029.97908	12517.99999	21537.48626	488.7775411	7718304.7	14731.78203	-13801.5831	3254.044308	-2822.854812	-44740.66424	-52873.58811	-48384.22305	1081726.799
Pengangkutan & Komunikasi	-19195.93144	-15188.00209	-20374.21217	-18568.24188	-12426.08834	-4382.682819	2478558.778	-15019.18612	-20498.94948	-85483.98786	-48597.58838	2183169.742	2305582.323	43169.74917	977551.2687
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8347.56983	13980.8857	1504.357441	-1558.887092	-11374.09115	-3949.147575	1778498.301	1321.781191	-512.8279057	882.7540713	-4148.794828	-3638.620422	-8284.015884	-5333.458975	251255.0174
Jasa-jasa	34714.28745	-422.93748	-36830.41101	-1037.580012	-7724.08223	812.8408825	10764076.26	-1781.348766	74957.44792	9689.62942	-2263.552827	-28770.78382	-31678.92005	-40028.3709	1534742.908

Sumber data : BPS diolah

LAPANGAN USAHA	Hasil Perhitungan Differential Shift Kab. Agam														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-71101.77337	1563720.803	-13424.44132	-182582.8481	24807.71511	101691.7271	17254831.44	240521.8975	-36132.03179	44553.09137	184261.5989	188815.968	195819.908	208589.1216	2810980.142
Pertambangan dan Penggalian	-91597.04884	-416139.1057	-29189.3188	-20470.09689	74304.01517	7138.369913	5988722.336	-79325.52716	5159.308778	7527.02528	13724.70847	12149.80549	12864.84091	7159.559948	852283.1511
Industri Pengolahan	-11984.12608	-144914.9028	-4130.725541	88548.18333	5241.897093	-50361.20411	8705408.231	-19800.01299	11708.10771	17918.60382	-30541.75537	-15457.59535	-4878.153317	-33839.18285	1375845.18
Listrik, Gas & Air Bersih	-2088.408335	-14485.58484	-10294.44237	1292.327928	-4188.116393	185.5587389	257808.9238	-4929.773847	5098.940865	-1252.807141	345.848742	-7702.828332	-2495.629494	412.4399189	35297.30251
Bangunan	24830.53517	-59305.04085	1331.23187	94384.21299	-17234.16848	-18217.55806	5105257.581	4594.86874	-3017.271418	-32980.7586	-22525.02868	3175.052448	-14874.0298	-1014.181764	719830.8935
Perdagangan, Hotel dan restoran	3311.387971	-37153.32905	40761.71702	49018.97496	28878.28053	-29849.98128	11214687.1	9181.171892	-13338.89045	14007.89249	-74.72359802	8932.124858	-13991.24145	-18513.84158	1800124.542
Pengangkutan & Komunikasi	-9430.493192	-5471.648845	-19089.12505	18050.38319	-9732.204487	14528.91748	2417310.049	-1887.894819	-13358.18197	-18890.83952	-11398.73593	-39879.98751	-40087.41733	-28374.95889	323408.0847
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	203.8451971	2258.421643	7945.225911	41007.5953	-8547.324810	-12588.18691	2621250.65	5048.899053	29058.38307	-709.882108	3368.811558	-9547.40848	-18592.21072	-12923.4893	374135.8814
Jasa-jasa	8119.224004	4248.3521	-10098.35018	28189.20422	-12419.11418	-16794.98485	10958711.02	-126.2788115	5800.381561	-8732.037447	-13835.88026	-9078.299009	-31952.59589	-81206.53161	1548498.571

Sumber data : BPS diolah

Lampiran 37

LAPANGAN USAHA	Hasil Perhitungan Differential Shift Kab. 50 Kota														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-131088.5783	-11284.48814	-19773.31844	-77189.86723	-17159.68168	116324.1215	20028460.85	-23358.6354	-91373.73821	-41885.27524	29324.45387	60491.62831	39276.92357	53689.02327	2884945.033
Pertambangan dan Penggalian	-82001.49786	45028.07548	-10765.91188	4582.272575	59486.64229	5802.162703	4123529.875	3855.290583	30081.79093	23654.95342	13471.61412	16821.10946	22378.07524	10928.63311	806331.6203
Industri Pengolahan	49958.6432	-19789.02579	-12095.87736	-4134.234679	9121.197011	-49087.77946	6577435.19	-4337.846164	-4447.110843	10545.16805	-10449.81052	-9872.891588	1303.426515	-20235.06331	934277.2946
Listrik, Gas & Air Bersih	-1917.773984	-4912.698479	-4753.825714	-827.0563648	-774.1967729	-349.9838882	90186.89996	-2255.922534	1032.672931	5879.912322	5824.598795	3034.67832	-245.5588432	-83.29097945	14739.11314
Bangunan	14718.25232	-30004.04486	-64.83355828	21787.37853	-20182.37879	-24554.93064	3278030.984	-8385.0928	2121.282839	-7553.808592	-7615.582334	7547.952186	2055.944828	12108.28408	468615.7091
Perdagangan, Hotel dan restoran	-1529.374093	-9829.837536	17908.52286	8102.086202	46259.54259	14180.38117	12721237.33	12515.2202	-15295.05075	27109.87339	36159.34739	26313.12515	34217.91838	-8182.736743	1833725.004
Pengangkutan & Komunikasi	-23099.00363	-12159.25811	-14327.04002	-38182.80937	-33545.62782	-9814.592899	3324488.381	-21851.38864	-24993.52646	-27806.18583	-14953.17986	-25806.41782	-18086.10206	-12000.25854	454198.7803
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	22320.74087	17714.49414	10889.33857	33599.92109	-782.9197711	2730.421315	1549859.661	14411.99904	11066.71802	-4980.322168	-5524.484318	-3526.967875	-2884.925581	-881.9875571	222508.5298
Jasa-jasa	-3836.193419	-44456.07844	-569.1420448	-73638.7036	11956.68177	-1778.164091	10360780.26	-18723.60334	16395.81623	-877.2084518	2144.727033	-4001.146343	-15444.18389	-15716.86702	1474936.799

Sumber data : BPS diolah

LAPANGAN USAHA	Hasil Perhitungan Differential Shift Kab. Pasaman														
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	Rata-rata	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	Rata-rata
Pertanian	-48486.13572	-3044.210416	28804.64875	13145.50775	26300.08088	33894.91915	14208768.44	8102.465067	-92882.13658	-79207.78888	15324.34362	31204.15468	34548.4789	45438.53056	2024470.358
Pertambangan dan Penggalian	1777.444382	8970.824038	-4182.402593	-3514.876889	5947.279101	-2239.877287	974010.708	1126.398495	2431.851734	4468.561825	-1000.082899	1584.886274	2036.190521	-1590.491008	140435.1202
Industri Pengolahan	-13363.59148	-27528.3519	-11475.98313	1441.353891	3140.717542	-5141.491558	1438773.419	-8821.224469	3368.428207	8587.397227	1314.12363	410.7977273	3531.221151	-2289.918091	206414.8921
Listrik, Gas & Air Bersih	-928.8019127	-3865.089535	-2862.334229	-295.8679307	-383.5086292	-115.6757754	61332.80195	-1408.179669	-2103.331909	-289.2383819	-416.4789177	-1988.260959	-651.3907929	-143.3040293	7767.486185
Bangunan	4220.828583	-57838.15861	1238.701788	19457.871	-5597.363675	-1537.147528	1827138.276	-8676.245074	1391.787583	-5074.335271	-5765.728348	1875.312937	-4871.015081	-942.9761387	258153.2966
Perdagangan, Hotel dan restoran	38843.73278	-1615.330117	8849.084475	26548.29533	12758.41182	-4021.4774	3325548.298	13193.11611	-7659.585334	-2314.957129	-4327.843342	8227.950879	839.2768518	-59.50119748	475820.9936
Pengangkutan & Komunikasi	-5594.544615	-3525.037951	-8142.940988	-11927.76584	-11873.29883	-5188.002823	1324703.725	-7708.285141	-5144.7882	-7051.944013	-4977.717882	-9762.193884	-9324.902888	-7052.469488	181954.4919
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1999.297598	7457.659422	7390.328408	-5345.510996	-12430.74897	2399.791252	1599152.359	245.1361194	-4251.136228	-3784.812698	-6089.287907	-5748.636018	-6490.305982	-7717.085914	223191.15
Jasa-jasa	-11633.751	9378.537522	7855.038351	-21018.94098	-10990.62879	6476.858783	5175442.896	-3355.481019	7882.840294	4703.32539	-3281.90286	494.5268902	-1032.586659	-12653.25889	738314.3369

Sumber data : BPS diolah